

WAJIDI

Milik Negara
Tidak Diperdagangkan

PERANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN
DI KALIMANTAN SELATAN

WAJIDI

PERANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN DI KALIMANTAN SELATAN



Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2017

Milik Negara
Tidak Diperdagangkan

**PERANAN PENDIDIKAN ISLAM
DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN
DI KALIMANTAN SELATAN**

WAJIDI

**DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta:

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PERANAN PENDIDIKAN ISLAM
DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN
DI KALIMANTAN SELATAN**



**DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017**

Peranan Pendidikan Islam dalam Pergerakan Kebangsaan di Kalimantan Selatan

Penulis: Wajidi

Hak cipta © 2017, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-undang

All rights reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah

Milik Negara Tidak Diperdagangkan

Penyunting Materi	:	M.Z. Arifin Anis
Penyelarar Bahasa	:	Mansyur
Desain Cover	:	Rizal

Penerbit:

Direktorat Sejarah

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kompleks Kemdikbud Gedung E, Lantai 9

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270

Telepon: (021) 5725540

Faximil: (021) 5725539

e-mail: subditsejarah@gmail.com

Website: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditsejarah/>

ISBN 978-602-50690-3-1

PENGANTAR PENULIS

Sejarah pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan akumulasi proses dari berbagai faktor pendorong dan peran pelopor pergerakan kebangsaan, salah satunya adalah peran elite agama dan pendidikan Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran tersebut yakni kontribusi elite agama, pengajian, pesantren, dan sekolah Islam atau madrasah di dalam pergerakan kebangsaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa elite agama, pengajian, pesantren dan madrasah sangat berperan dalam pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

Besarnya pengaruh agama Islam pada awal pergerakan membuktikan bahwa elite agama yang dihasilkan prana pendidikan Islam merupakan salah satu pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Dapat dikatakan pada dekade pertama abad ke-20 pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan dimulai dengan nasionalisme Islam namun kemudian berkembang menjadi nasionalisme Indonesia.

Pendidikan Islam yang dibangun oleh para elite agama telah berkontribusi terhadap upaya pencarian identitas dan ikatan solidaritas nasional, karena pendidikan telah membuat orang menjadi semakin rasional. Peran pendidikan Islam ini diperkuat oleh *print capitalime* (kapitalisme cetak). Berbagai bentuk bahasa cetak seperti buku, surat kabar dan majalah itu hanya dapat dipahami oleh kalangan terpelajar. Di sini peran pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pun swasta termasuk pendidikan Islam berkorelasi dengan media massa. Para guru dan santri dapat mengetahui perkembangan dunia luar, karena mereka menjadikan

media cetak seperti buku, surat kabar dan majalah sebagai sumber informasi.

Melalui dunia pendidikan dan perpustakaan mereka ini mengenal huruf latin, memiliki kebiasaan membaca buku, koran atau majalah, dan mengenal dunia lain di luar tanah Hindia. Mereka juga mengenal paham-paham kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (*liberti, egalite, fraternite*). Karena adanya pendidikan itulah, mereka mempunyai wawasan dan pola pikir yang lebih maju dibanding dengan kebanyakan masyarakat awam, sehingga lebih memiliki kesadaran akan rasa kebangsaan yang mereka tuangkan dalam berbagai bentuk, baik melalui tulisan, mengajar, maupun sebagai pengurus organisasi pergerakan.

Para elite agama, yang karena memiliki pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan hubungan dengan dunia luar, menjadikan mereka mempunyai kemampuan untuk merasakan dan melihat adanya kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap kalangan pribumi dan memformulasikan cara menghadapinya melalui organisasi pergerakan guna meraih cita-cita kebangsaan.

Benar apa yang dikatakan oleh Dr. Danudirja Setiabudi (Ernest Douwes Dekker 1879-1950) pejuang, pahlawan nasional, dan salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia dalam ceramahnya di Yogyakarta: *“Jika tidak karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti yang diperlihatkan oleh sejarah bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.”*

Pernyataan Douwes Dekker tidaklah berlebihan. Dengan melihat berbagai kiprah organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Perguruan Islam, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratutthalibin dengan sistem persekolahannya, maka gambaran itu terlihat nyata pada masa pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Rosihan Anwar yang melihat besarnya peran organisasi Sarekat Islam pada awal pergerakan, mengatakan: *“pelopor*

gerakan nasionalisme, gerakan membebaskan diri dari kolonialisme-imperialisme Belanda ialah Islam. Tariklah pelajaran ini dari sejarah Indonesia”.

Dengan selesainya penulisan sampai dengan purnanya buku ini maka penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembiayaan, saat pengumpulan data di lapangan, dan penulisan.

Pertama dan yang utama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan (Hilmar Farid) dan Ibu Direktur Sejarah (Dra.Triana Wulandari, M.Si) beserta jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis sebagai salah seorang penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Kesejarahan 2017, sehingga dengan fasilitasi itu penulis sangat terbantu untuk mewujudkan buku ini.

Penulis juga merasa berhutang budi dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam pengumpulan data seperti jajaran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta museum di Kalimantan Selatan, Perpustakaan dan ANRI di Jakarta. Rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam juga disampaikan kepada keluarga perintis dan veteran pejuang kemerdekaan yang dari mereka sumber data didapatkan seperti keluarga almarhum Mawardi, Anang Ahmad Nawier, Artum Artha, Muhammad Zein, Zainal, Merah Johansyah, Achmad Darmawi, dan Abdul Muis.

Terima kasih juga kepada Drs. M.Z. Arifin Anis, M.Hum, dan Mansyur, S.Pd., M.Hum keduanya sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan sebagai *proofreader*, sekaligus sebagai penyunting dan penyelaras bahasa buku ini. Terima kasih juga kepada para pakar, sejarawan, atau penulis lainnya yang buah penanya telah penulis kutip secara langsung maupun tidak langsung, dan sebagai bentuk penghargaan saya cantumkan karya tulis mereka dalam Daftar Pustaka.

Penulis meyakini bahwa segala bantuan dan selesainya buku ini tentunya tidak terlepas dari karunia Allah SWT, Tuhan semesta alam. Akhir kata, penulis mengucapkan puji dan syukur atas limpahan taufik, hidayah, dan inayah-Nya, dan semoga apa yang kita kerjakan ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Banjarmasin, Desember 2017

Wajidi

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis ~ v

Daftar Isi ~ ix

Daftar Gambar ~ xi

Daftar Singkatan ~ xii

Bab I Pendahuluan ~ 1

1.1 Latar Belakang ~ 1

1.2 Konseptual ~ 9

1.3 Tinjauan Bibliografi ~ 15

1.4 Sumber Data ~ 18

Bab II Latar Belakang Pergerakan Kebangsaan ~ 23

2.1 Dampak Modernisasi dan Eksploitasi ~ 23

2.2 Pengaruh Pendidikan dan Media Massa 30

2.3 Organisasi Pergerakan ~ 37

2.4 Hubungan Antar Elite ~ 45

Bab III Perkembangan Organisasi Islam ~ 53

3.1 Sarekat Islam ~ 53

3.2 Muhammadiyah ~ 69

3.3 Nahdlatul Ulama ~ 74

3.4 Musyawaratutthalibin ~ 79

Bab IV Kiprah Elite Agama Dalam Pergerakan
Kebangsaan ~ 85

4.1 Elite Agama dan Pendidikan Islam ~ 85

4.2 Elite Agama dan Perjuangan
Kemerdekaan ~ 93

Bab V Pendidikan Islam Pada Masa Pergerakan ~ 103

5.1 Madrasah: Resistensi dan Adaptasi ~ 105

5.1.1 Sekolah Sarekat Islam ~ 114

5.1.2 Sekolah Persatuan

Perguruan Islam ~ 116

5.1.3 Sekolah Muhammadiyah ~ 118

5.1.4 Sekolah Musyawaratutthalibin ~ 121

5.2 Pengajian dan Pesantren ~ 127

Bab VI	Analisis Peranan Pendidikan Islam Dalam Pergerakan Kebangsaan ~ 135
Bab VII	Penutup ~ 147
Tinjauan Pustaka ~ 151	
Indeks ~163	
Riwayat Hidup Penulis ~ 177	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Leesgezelschap (Taman Bacaan) Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) ~32
Gambar 2	Kongres I Bindo (Barisan Indonesia) di Banjarmasin ~ 36
Gambar 3	Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) Cabang Kandangan ~ 39
Gambar 4	Kongres Bond Indonesische Chauffeur di Barabai ~ 41
Gambar 5	Kunjungan Mohammad Husni Thamrin di Kandangan ~ 46
Gambar 6	Parindra Cabang Banjarmasin dan Pemuda Surya Wirawan, 3 April 1938 ~ 50
Gambar 7	Hoofd Bestuur (Pengurus Besar) Sarekat Islam Cabang Banjarmasin tahun 1920 ~ 56
Gambar 8	Tokoh-tokoh Organisasi Muhammadiyah ~ 72
Gambar 9	Pengurus Musyawaratutthalibin di Banjarmasin ~ 80
Gambar 10	Cabang Organisasi Musyawaratutthalibin di Banjarmasin. ~ 82
Gambar 11	Peserta Openbare Vervolgschool Banoea Koepang 1923 ~ 90
Gambar 12	Tuan Guru Abdurrasyid ~ 102
Gambar 13	Elite Islam dari organisasi Musyawaratutthalibin ~ 123
Gambar 14	Kursus Bagian Pertanian di Barabai ~ 138
Gambar 15	Sekolah Agama di Pulang Pisau ~ 140

DAFTAR SINGKATAN

AMS	: Algemene Middelbare School
ANO	: Ansor Nahdlatol Oelama
BINDO	: Barisan Indonesia
BIC	: Bond Indonesische Chauffeur
BPO	: Borneo Padvinder Organisatie
CSI	: Centraal Sarekat Islam
ELS	: Europese Lagere School
GAPI	: Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia
GERINDO	: Gerakan Rakyat Indonesia
GG	: Gouverneur Generaal
HCS	: Hollands Chinese School
HIS	: Hollands Inlandse School
HPB	: Hoofd van Plaatselijk Bestuur
IHS	: Inheemse Hollandse School
IS	: Indische Staatsregeling
ISDV	: Indische Social Democratische Vereniging
KBI	: Kepanduan Bangsa Indonesia
KPM	: Koninklijk Pakketvaart Maatschappij
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
M.Th	: Musyawaratutthalibin
MP	: Militair Politie
MULO	: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
NBC	: National Borneo Conferentie
NIAS	: Nederlands Indische Artsen School
NIC	: National Indische Congres
NMM	: Nederlands Militaire Missie
NO	: Nahdlatol Oelama
NU	: Nahdlatul Ulama
OSVIA	: Opleidingschool voor Inlandse Ambtenaren
PARINDRA	: Partai Indonesia Raya
PARTINDO	: Partai Indonesia
PBI	: Persatuan Bangsa Indonesia
PHIS	: Particuliere Hollands Inlandse School
PID	: Politieke Inlichtingen Dienst
PII	: Partai Islam Indonesia

PMM	: Pemuda Muslimin MULO
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNI	: Pendidikan Nasional Indonesia
POC	: Pengawas Onderwijs Commissie
PPI	: Persatuan Perguruan Islam
PPI	: Pelajar Islam Indonesia
PPM	: Persatuan Pemuda Marabahan
PSI	: Partij Sarekat Islam
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
RMG	: <i>Rheinische Missions Gesellschaft</i>
SERI	: Serikat Rakyat Indonesia
SORAK	: Soeara Rakyat Kalimantan
SRI	: Serikat Rakyat Islam
STOVIA	: School tot Opleiding van Indische Artsen

1.1 Latar Belakang

Dasawarsa pertama abad ke-20 merupakan puncak dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, namun pada saat bersamaan juga dikenang sebagai masa pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme tumbuh ketika modernisasi berupa penetrasi kebudayaan Eropa dan eksploitasi di berbagai bidang menimbulkan perubahan, kegoncangan, kesengsaraan, dan kesadaran di kalangan rakyat pribumi.

Seperti halnya pergerakan kebangsaan yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia, maka tumbuhnya pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan¹ pada awal abad ke-20 merupakan suatu fenomena historis yang lahir dari akumulasi proses berbagai faktor yang memengaruhinya seperti faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bahkan agama. Dapat dikatakan, bahwa sebab utama tumbuhnya kesadaran dan kebangkitan nasional Indonesia berasal dari situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sendiri sebagai dampak dari penjajahan.² Faktor-faktor dari luar negeri, seperti paham liberalisme, pendidikan Barat, Pan Islamisme lebih bersifat mempercepat pergerakan tersebut.

1 Sesuai konteks kalimat maka yang dimaksud Kalimantan Selatan di sini bisa berarti *Borneo Zuid-Oostkust, Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo, atau Residentie Zuider Afdeling van Borneo*. Untuk selanjutnya ditulis dengan nama Kalimantan Selatan.

2 Lihat Departemen Sosial, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex Digul*, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Jakarta, 1977, hlm. 22.

Di antara faktor-faktor dalam negeri dan bersifat nasional itu adalah adanya tekanan dan penderitaan terus menerus, sehingga menjadikan bangsa Indonesia bangkit untuk bebas dari penderitaan tersebut. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang menimbulkan semangat bersatu antar suku bangsa, serta adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri berupa kehendak memiliki tanah air dan menentukan nasib sendiri.³ Persoalannya adalah bagaimana gambaran pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan?

Pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh kebangkitan Islam dalam segala manifestasinya. Dapat dikatakan, Islam dan nasionalisme di Kalimantan Selatan merupakan satu kesatuan erat yang saling mengisi. Islam sebagai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan sangat berperan sebagai pendorong tumbuhnya pergerakan nasional di daerah ini, sehingga berbagai organisasi yang bernafaskan Islam dapat dengan mudah tumbuh dan berkembang karena banyaknya pengikut atau anggotanya.

Besarnya pengaruh agama Islam pada awal pergerakan diperlihatkan oleh kontribusi elite agama sebagai elite tandingan yang berpikiran progresif. Elite agama ini lahir dari lembaga pendidikan keagamaan yang disebut pengajian, pesantren, sekolah Islam atau madrasah. Pada masa Hindia Belanda, madrasah lahir sebagai bentuk reformasi yang dilakukan masyarakat muslim. Keberadaannya mengubah pendidikan dari yang semula bersifat tradisional seperti pengajian atau pesantren menjadi lembaga formal berbentuk madrasah.

Selain itu, diskriminasi dan pembatasan memasuki sekolah pemerintah turut mendorong perkembangan sekolah partikelir (swasta) termasuk sekolah Islam. Meski pemerintah menyelenggarakan pendidikan dari sekolah tingkat rendah sampai yang tinggi, kesempatan bagi rakyat

3 Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2002), hlm. 14.

biasa untuk memasuki sekolah itu sangat dibatasi. Hanya anak pegawai negeri, orang kaya, keluarga bangsawan, dan orang golongan timur asing utamanya Cina yang diberi kesempatan menuntut pelajaran secara luas di sekolah-sekolah pemerintah, sedangkan rakyat biasa hanya diizinkan setelah melalui *School Commissie* yang keanggotaannya terdiri dari Kontrolir, Kiai, dan *School-Opziener*. Memang, terdapat orang bumiputera (Indonesia) yang karena status orang tuanya diberi kesempatan untuk memasuki sekolah yang khusus diperuntukkan bagi orang kulit putih seperti ELS (*Europese Lagere School*), akan tetapi mereka masih dibedakan dengan orang-orang peranakan (Indo) dan Eropa. Tidak mudah bagi anak bumiputera untuk memasuki sekolah orang kulit putih, karena harus dinilai oleh *Bestuur Commissie* yakni sebuah komisi yang bertugas menilai seorang anak bumiputera yang akan masuk sekolah, apakah diterima atau tidak. Hasil penilaiannya sangat ditentukan pada martabat orang tuanya.

Menurut Abd. Hamid Wahid⁴ faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah adalah karena adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional (pengajian dan pesantren) dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat, dan adanya kekuatiran atas kecepatan perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Para reformis kemudian menyeimbangkan pendidikan Islam dan umum dalam sekolah Islam yang disebut madrasah.

Akumulasi peran elite agama, sekolah Islam, dan organisasi pergerakan yang bernafaskan Islam menjadikan pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan pada dekade pertama abad ke-20 dimulai dengan nasionalisme Islam.

4 Abd. Hamid Wahid. 2007. "*Pengelolaan Madrasah Era Sentralistik: Masalah atau Solusi*". Jurnal Edukasi Volume 5, Nomor 3, Jakarta Juli-September 2007, hlm. 7.

Pada mulanya terlihat pada kegiatan sinoman-sinoman⁵ yang bernafaskan Islam, namun pada perkembangan selanjutnya tercermin dari keberadaan organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratutthalibin.

Pendidikan Islam seperti pengajian, pesantren, atau madrasah berperan dalam pembentukan dan pengembangan nasionalisme. Secara umum sebagaimana dipahami banyak kalangan, nasionalisme Indonesia lahir sebagai sebuah antitesa dari kolonialisme atau imperialisme. Sebagai sebuah antitesa, nasionalisme Indonesia merupakan sebuah ekspresi kebangkitan bangsa Indonesia untuk bebas dari penderitaan. Penderitaan yang sama karena dijajah oleh bangsa yang sama telah memunculkan perasaan senasib dan sepenanggungan yang menimbulkan semangat bersatu antar suku bangsa, serta adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri berupa kehendak bersama memiliki tanah air dan menentukan nasib sendiri.⁶

Akan tetapi, nasionalisme terkadang tidak selalu harus disandingkan dengan kolonialisme. Menurut Bambang Purwanto, nasionalisme seharusnya dipahami sebagai sebuah bagian dari takdir atau keniscayaan dalam proses sejarah Indonesia. Nasionalisme juga tidak selalu identik dengan perlawanan terhadap penjajah, namun ia sebuah kerja keras untuk bisa bangkit dari segala keterbelakangan. Adanya gerakan lokal dengan penegasan identitas yang bersifat primordial tentu tidak selalu sejalan dengan konsep nasionalisme. Akan tetapi, sebagai sebuah proses, gerakan-gerakan itu pada akhirnya mengerucut menuju kesadaran identitas nasional.⁷

5 Organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional dan lokal.

6 Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2002), hlm. 14.

7 Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*, (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 153-155. Lihat juga Syaharuddin,

Sejalan dengan Purwanto, menurut Benedict Anderson nasionalisme Indonesia beriringan dengan berkembangnya *print kapitalisme*, kapitalisme cetak yang dirangsang oleh industri cetak seperti surat kabar. Bahasa-bahasa cetak itu membentangkan landasan kesadaran bagi kesadaran nasional.⁸ Cepat atau lambat kesadaran wilayah, kesadaran identitas, dan perjuangan akan hak-hak individual maupun kolektif muncul, karena adanya peran para nasionalis menuangkan spirit wacana kesadaran identitas melalui berbagai bahasa lisan dan tulisan yang berakhir pada membayangkan komunitas bernama Indonesia.⁹ Oleh karena itu, hemat Anderson, nasionalisme pada dasarnya adalah upaya pencarian jati diri atau identitas suatu bangsa dan integrasi nasional. Anthony Reid mengatakan bahwa persoalan identitas nasional pada dasarnya telah diatasi, yaitu sebagai identitas yang muncul dari pengalaman bersama dalam penindasan Belanda.¹⁰

Pencarian identitas dan integrasi nasional yang dilakukan para elite nasional tidak terlepas dari peran elite agama berpikiran progresif yang berjuang melalui jalur organisasi pergerakan, pendidikan, dan juga media massa. Keberadaan mereka dapat dilihat dari semua lapangan seperti menjadi pengurus organisasi keagamaan, pelopor, aktivis pergerakan kebangsaan, partai politik, atau menjadi guru-guru sekolah Islam.

Orang Banjar Menjadi Indonesia, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2009), hlm. 3 dan 15.

8 Benedict Anderson, *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*, (Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xxi, 66-67, 175-178.

9 Lihat Syaharuddin, *Orang Banjar Menjadi Indonesia: Dinamika Organisasi Islam di Borneo Selatan, 1912-1942*, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2009), hlm. hlm. 6.

10 Lihat Anthony Reid, "Jejak Nasionalis Indonesia Mencari Masa Lampainya", dalam Anthony Reid dan David Marr (Editor), *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*, (Jakarta: Grafitipers, 1983), hlm. 53-74.

Melalui pengajian, dan proses pendidikan di pesantren dan madrasah para elite agama menyisipkan pengajaran mencintai tanah air dan mempertahankannya. Pengajian, pesantren, atau madrasah disamping men-transfer dan menanamkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada para santri juga mampu menggugah masyarakat untuk meraih cita-cita kebangsaan.

Paparan di atas hanyalah gambaran selintas tentang peranan pendidikan Islam dalam pergerakan kebangsaan Indonesia di Kalimantan Selatan. Untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang hal dimaksud, maka buku ini bermaksud memaparkan gambaran lebih jauh mengenai peranan¹¹ Islam dalam pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

Lingkup analisis studi yang terdapat dalam buku ini adalah peranan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sini meliputi pengajian, pesantren, sekolah Islam atau madrasah. Bentuk-bentuk pendidikan Islam itu tidak terlepas dari keberadaan elite agama dan organisasi pergerakan Islam. Dalam arti lain, pendidikan Islam melibatkan kiprah elite agama yang mengelola dan dihasilkan oleh pendidikan Islam, serta organisasi pergerakan Islam yang memiliki sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah.

Atas dasar pemikiran di atas, maka buku ini memfokuskan pada. *Pertama*, organisasi pergerakan Islam yang memiliki sekolah-sekolah Islam atau madrasah. *Kedua*,

11 Peranan berasal dari kata peran. Peran adalah perangkat tingkah laku yang dimainkan seseorang yang berkedudukan. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa, lihat Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 854. Dalam pandangan ilmu sosiologi, peranan (*role*) sebagai aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, lihat Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 210-211.

elite agama seperti tuan guru dan guru-guru agama Islam yang mengelola dan menghasilkan elite agama yang kemudian menjadi tokoh pergerakan; *Ketiga*, pendidikan Islam yakni pengajian, pesantren, dan sekolah-sekolah Islam atau madrasah; *Keempat*, menganalisis peranan elite agama, organisasi pergerakan Islam, pengajian, pesantren, sekolah Islam atau madrasah dalam pergerakan kebangsaan; *Kelima*, rentang waktu yang dipilih adalah 1901-1942 yang mencerminkan periode pergerakan kebangsaan Indonesia di Kalimantan Selatan.

Penetapan tahun 1901 sebagai awal periode pergerakan diambil, karena pada tahun itulah berdiri organisasi pergerakan di Banjarmasin, yaitu Seri Budiman atas inisiatif Amir Hassan Bondan seorang pemuda Banjar pertama lulusan *Europese Lagere School* (ELS) tahun 1893 dan kemudian melanjutkan ke STOVIA namun tidak tamat. Seri Budiman merupakan organisasi lokal beranggotakan para pangreh praja dan pedagang yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi sesama anggotanya, mempropagandakan pentingnya pengajaran dari Barat, persatuan kaum pedagang dan pertanian.¹²

Perkumpulan Seri Budiman-lah yang mula-mula sebagai pelopor mempergunakan podium sebagai sarana para pembicara di sidang-sidang rapat, sehingga kebebasan berbicara di atas mimbar menjadi suatu kebiasaan baru dalam dunia perhimpunan di Kalimantan Selatan yang berbeda dengan perhimpunan sebelumnya yang bersifat sinoman.¹³

Meski pada mulanya bersifat lokal dan menonjolkan watak sosial, para anggota Seri Budiman yang mendapat pengaruh dari kebudayaan atau pendidikan secara Barat telah memelopori tumbuhnya organisasi dan kebiasaan

12 Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, (Banjarmasin: Fadjar, 1953), hlm. 83.

13 Organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional dan lokal, misalnya sinoman kematian, sinoman perkawinan, sinoman kesenian, sinoman kesusastraan, dan sinoman perayaan.

yang bersifat modern yang diikuti oleh organisasi-organisasi yang berkembang di kemudian hari.

Pada proses perkembangannya, organisasi pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga tumbuh organisasi yang berlingkup regional maupun nasional yang bergerak di bidang politik untuk mencapai kemerdekaan. Perkembangan organisasi pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan dapat dikatakan berakhir dengan masuknya tentara pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan pada tahun 1942.

Berkuasanya tentara pendudukan Jepang bukan saja menjadi akhir dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan, tetapi juga dimaknai sebagai “awan gelap” bagi pergerakan kebangsaan. Pada masa itu tidak ada satu pun organisasi pergerakan yang beraktivitas secara terang-terangan, karena adanya larangan dan kekhawatiran akan mendapat siksaan tentara Jepang yang terkenal kejam jika ketahuan melanggar larangan itu.

Lingkup spasial kajian ini dibatasi hanya pada daerah yang sekarang disebut Provinsi Kalimantan Selatan, yang wilayahnya dahulu pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah bagian wilayah *Borneo Zuid-Oostkust*¹⁴ atau *Residentie Zuider en Ooster Afdeling van Borneo*¹⁵ yang di kemudian hari menurut Staatsblad 1945 Nomor 64 dikenal sebagai Keresidenan Borneo Selatan (*Residentie Zuider Afdeling van Borneo*) dengan ibukotanya Banjarmasin yang wilayahnya waktu itu meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang.¹⁶ Pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda wilayah pemerintahan ini dinamakan Keresidenan Borneo Selatan dalam sebuah provinsi yang dinamakan Gewest Borneo (Provinsi Borneo)

14 Borneo Pesisir Tenggara/Borneo Tenggara.

15 Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo

16 Pemda Tk. I Kalsel, *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*, (Banjarmasin, 1990), hlm. 4.

beribukota di Banjarmasin.¹⁷ Wilayah Gewest Borneo mempunyai dua keresidenan yakni *Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo* ibukotanya Banjarmasin, dan *Residentie Westerafdeling van Borneo* ibukotanya Pontianak, sebelumnya kedua keresidenan ini bernama *Borneo Westkust dan Borneo Zuid-Oostkust*.¹⁸

Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo (*Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo*) luas wilayahnya meliputi gabungan tiga wilayah provinsi di pulau Kalimantan sekarang, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dengan demikian, luas geografi Kalimantan Selatan yang sekarang tidak sama atau lebih kecil dibanding dengan luas wilayah Kalimantan Selatan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Untuk memudahkan pembahasan, maka buku ini hanya membatasi pada wilayah sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Konseptual

Kajian tentang peranan pendidikan Islam dalam pergerakan kebangsaan Indonesia di Kalimantan Selatan periode tahun 1901-1942 cukup menarik untuk diketengahkan. Agar pembahasan tidak keluar dari sasaran, maka perlu dijelaskan beberapa konsep dari pergerakan kebangsaan, konsep nasionalisme, konsep pendidikan Islam, dan konsep elite agama. Konsep pergerakan kebangsaan dan nasionalisme perlu dijelaskan terlebih dahulu.

Sejarah perjuangan¹⁹ untuk meraih kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia memiliki dua bentuk, yak-

17 Sejenis dengan provinsi yang dibentuk berdasar Besluit Gubernur Jenderal (Staatsblad 1938 Nomor 352).

18 Lihat Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip Borneo*, (Jakarta, 1986), hlm. iv.

19 Dalam bentuk kata benda, KBBI mengartikan perjuangan: (1) perkelahian (merebut sesuatu); peperangan; (2) usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya.¹⁹ Dalam konteks kemerdekaan, maka perjuangan kemerdekaan adalah usaha yang penuh dengan

ni pergerakan nasional dan revolusi fisik. Pergerakan nasional merupakan ciri khas perjuangan periode pergerakan kebangsaan yang bercirikan berjuang melalui organisasi pergerakan politik kebangsaan. Pada periode ini nasionalisme tumbuh dan berkembang, khususnya di kalangan elite baru yang nasionalis.

Konsep nasionalisme yang terasimilasi dalam bahasa Indonesia dengan kata kebangsaan (dari asal kata: *bangsa*), tumbuh dan berkembang di Indonesia pada pertengahan pertama abad ke-20 merupakan sebuah proses perlawanan (*antitesa*) dari kolonialisme²⁰ dan imperialisme²¹ di Indonesia dengan tujuan untuk meraih kemerdekaan nasional.²² Pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara kolonialisme dengan imperialisme. Imperialisme dapat bermula dari usaha pemerintah kolonial yang mempunyai koloni-koloni di lain-lain daerah dan berusaha menyatukan koloninya menjadi satu sistem penguasaan.²³

Pergerakan nasional adalah arti harfiah dari bahasa Belanda: *Nationalistische Beweging* atau dalam bahasa Inggris disebut *National Movement*. Belanda juga menyebut gerakan itu dengan istilah *Inlandsche Beweging*. Secara etimologis, istilah nasionalisme yang diterjemahkan sebagai

kesukaran dan bahaya untuk memerdekakan bangsa atau negara dari penjajahan atau penindasan bangsa lain. Lihat Depdiknas., *Op.cit.*, hlm.478.

20 Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas negara atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.

21 Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar.

22 Lihat Depdiknas, *Op.cit.*, hlm. 582 dan hlm. 427.

23 Lihat C.S.T Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), hlm. 7.

aliran/ajaran paham kebangsaan²⁴ berasal dari kata: “natie” yang berarti dilahirkan/keturunan, “nation” yang berarti bangsa, “national” yang berarti ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, dan “nasionalitas” yang berarti kebangsaan, atau “nationalist” yang berarti orang yang cinta persatuan/bangsa.²⁵

Banyak definisi nasionalisme, misalnya Hans Kohn mengartikan nasionalisme sebagai paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (*nation state*).²⁶ Definisi oleh Hans Kon ini menekankan “kemauan bersama” untuk membentuk sebuah identitas berbangsa dan memelihara bangsa itu sebagai hal yang utama dalam nasionalisme.²⁷ Sedangkan Manai Sophian mengartikan nasionalisme sebagai suatu *state of mind*, suatu prinsip rohani ketika kesetiaan dari individu diabdikan kepada negara; lahirilah cinta tanah air. Oleh sebab itulah, maka suatu bangsa itu adalah suatu solidaritas yang besar; diciptakan oleh pengorbanan-pengorbanan yang telah diberikan dan yang akan diberikan karena cinta tanah air itu.²⁸ Dalam sudut pandang negara-negara yang pernah mengalami penjajahan nasionalisme (modern) adalah paham kebangsaan yang menolak pen-

24 Rukmana Amanwinata *et al.*, *Kamus Istilah Tata Negara*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1985), hlm. 35.

25 Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 43.

26 Hans Kohn dalam Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 15.

27 Syaharuddin, “Transformasi Nilai-nilai Kejuangan Masyarakat Banjar Pada Periode Revolusi Fisik (1945-1950) di Kalimantan Selatan (Studi Etnopedagogi Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPS)”, (Bandung: Disertasi Jurusan Pendidikan IPS UPI Bandung, tidak diterbitkan), hlm. 27.

28 Manai Sophian, “Nasionalisme dan Sumpah Pemuda”, dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1974), hlm. 266.

jajahan untuk membentuk negara yang bersatu, berdaulat, dan demokrasi.²⁹

Dalam konteks Indonesia, Denys Lombard mengartikan nasionalisme sebagai suatu neologisme yang ternyata diterapkan pada kenyataan Indonesia yang sangat khas: sekumpulan aspirasi dan tuntutan yang jelas, yang berupaya untuk membebaskan Indonesia dari kekuasaan negeri Belanda.³⁰

Benedict Anderson mengartikan bangsa atau nasion:

Bangsa adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun toh di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.³¹

Hemat Anderson nasionalisme pada dasarnya adalah upaya pencarian jati diri suatu bangsa. Ketika, Belanda berhasil melakukan politik pembulatan wilayah (*afrondings-politiek*) yang memunculkan “komunitas politik yang dibayangkan” (*an imagined political community*) maka yang terjadi selanjutnya adalah proses pencarian identitas dan integrasi nasional.

Dalam perspektif politik, Indonesia bisa bersatu sebagai suatu bangsa dan negara karena memiliki kehendak

29 Budi Juliardi, *Loc.cit.*

30 Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 168-169.

31 Benedict Anderson, *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*, (Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

atau keinginan untuk bersatu yang didorong oleh kesamaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama dijajah dan menderita oleh penjajah yang sama, terutama oleh penjajahan Belanda. Negara dan bangsa Indonesia lahir karena adanya faktor sejarah. Integrasi bangsa adalah suatu konsep yang dapat ditemukan dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, sejarah mempunyai peran dalam pembentukan solidaritas ke-Indonesia-an.

Wadah persatuan, wilayah tempat bangsa Indonesia kini berada, dahulunya adalah wilayah Hindia Belanda sebagai hasil politik kolonial yang dipaksakan kepada daerah/pulau-pulau yang dikuasainya. Pemaksaan itu, di satu sisi telah menimbulkan penderitaan, tetapi akibat dari itu telah menimbulkan kesadaran senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah bangsa.

Terkait dengan istilah “pergerakan”, maknanya berlainan dengan pengertian “perjuangan”. Yang dimaksud pergerakan di sini adalah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang teratur,³² walaupun yang bergerak itu sebagian saja, asal menentukan nasib bangsa itu sebagai keseluruhan menuju kemerdekaan.³³

Kaitannya dengan istilah “kebangsaan” maka yang dimaksud dengan pergerakan kebangsaan adalah pergerakan-pergerakan yang bercita-cita untuk mencapai kemerdekaan bangsa yakni bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto Tirtoprodjo³⁴ bahwa perjuangan yang bersifat “pergerakan” mengandung arti perjuangan yang berbentuk ‘organisasi’ yang teratur. Begitupula dengan L.M. Sitorus, bahwa yang dimaksud dengan Pergerakan Kebangsaan Indonesia adalah perjuangan bangsa untuk

32 C.S.T. Kansil dan Julianto, *Op.cit.*, hlm. 15.

33 I. Nyoman Dekker, *Sejarah Indonesia Baru 1900-1945 (Pergerakan Nasional)*, (Malang: Lembaga Penerbit IKIP Malang, 1971), hlm. 1.

34 Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1961), hlm. 5

mencapai kemerdekaan, terutama perjuangan bangsa Indonesia yang mempergunakan organisasi modern yang berupa gerakan-gerakan dan partai-partai politik sejak akhir abad kesembilan belas.³⁵

Besarnya pengaruh agama Islam pada awal pergerakan diperlihatkan oleh kontribusi pendidikan Islam dan elite agama yang berpikiran maju. Elite agama ini lahir dari lembaga pendidikan keagamaan yang disebut pengajian, pesantren, dan terutama dihasilkan oleh madrasah. Pada masa Hindia Belanda, madrasah lahir sebagai bentuk reformasi yang dilakukan masyarakat muslim. Keberadaannya mengubah pendidikan dari yang semula bersifat tradisional seperti pengajian atau pesantren menjadi lembaga formal berbentuk madrasah. Tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi berasaskan Islam pada awal pergerakan kebangsaan merupakan salah bentuk kontribusi Islam dalam kebangkitan nasionalisme. Para elite agama dalam organisasi Islam mendirikan madrasah sebagai bentuk resistensi terhadap diskriminasi sekolah pemerintah dan sekaligus sebagai adaptasi terhadap sistem persekolahan pemerintah yang sekuler. Meski diakui, bahwa sistem pendidikan tradisional yang bernafaskan keagamaan seperti pengajian dan pesantren sudah lama hadir di tengah masyarakat, jauh sebelum kehadiran sekolah yang dikelola pemerintah. Melalui pengajian, sekolah agama, atau madrasah, para alim ulama yakni *tuan guru* sangat berperan dalam mengembangkan anak didiknya, bukan hanya dalam bentuk pendidikan agama namun juga dalam bentuk penanaman kesadaran berbangsa kepada anak didiknya, dan terbukti penyelenggara dan alumni pendidikan ini banyak yang menjadi elite agama berpikiran maju, menjadi pelopor, motor atau aktivis pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Beberapa penulis, seperti Sjam-

35 L.M. Sitorus, *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakjat N.V, 1951), hlm.5.

suddin,³⁶ Sjarifuddin,³⁷ M. Idwar Saleh,³⁸ Alex A. Koroh,³⁹ Wajidi,⁴⁰ dan Syaharuddin⁴¹ menyatakan bahwa pendidikan Islam berperan penting dalam kebangkitan nasional di Kalimantan Selatan, dan sesungguhnya nasionalisme yang berkembang di Kalimantan Selatan sebelum tahun 1930 adalah nasionalisme Islam, dan setelah itu baru berkembang menjadi nasionalisme Indonesia.

1.3 Tinjauan Bibliografi

Di antara para penulis yang mengulas persoalan peranan pendidikan Islam dalam pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan, baik berupa artikel, buku, atau pun hasil kajian seperti skripsi, tesis, dan disertasi dapat disebutkan nama M. Idwar Saleh dkk, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*.⁴² Menurut M. Idwar Saleh, agama Islam sebagai

36 Sjamsuddin, "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1970).

37 Sjarifuddin, "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1974).

38 M. Idwar Saleh, dkk., *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, 1978/1979).

39 Alex A. Koroh, dkk., "Menenal Pertumbuhan dan Perkembangan Nasionalisme di Kalimantan Selatan Selama Tiga Dasawarsa 1912–1942", (Banjarmasin: Laporan Penelitian FKIP Unlam, 1994).

40 Wajidi, *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007).

41 Syaharuddin, *Orang Banjar Menjadi Indonesia: Dinamika Organisasi Islam di Borneo Selatan, 1912-1942*, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2009).

42 M. Idwar Saleh et al, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, 1978/1979).

agama mayoritas yang dianut masyarakat Kalimantan Selatan sangatlah mewarnai pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, M. Idwar Saleh menempatkan Islam sebagai pranasionalisme, terutama sebelum tahun 1930. Sesudah tahun 1930-an, muncullah nasionalisme Indonesia dimana PNI Pendidikan dan Taman Siswa banyak memengaruhinya.

Buku tersebut dapat dikatakan sebagai yang pertama yang secara khusus memuat tentang sejarah pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan, dan secara umum banyak memuat tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan kebangsaan di daerah ini periode 1900-1942. Meski demikian, bahasan tentang peranan pendidikan Islam hanya dibahas selintas atau dalam konteks pergerakan secara umum.

Sjarifuddin dalam skripsinya, “Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 Sampai Dengan 17 Agustus 1950” menyimpulkan bahwa berdasarkan pertumbuhan, perkembangan dan perjuangan pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan, sejak mulai pertumbuhannya sampai tahun 1942 dapat dibuat beberapa periodisasi, yakni: (1) Sejak runtuhnya Kerajaan Banjar 1860 sampai dengan 1901 adalah Periode Pra Pergerakan Rakyat; (2) Dari tahun 1901 sampai 1912 dinamakan Periode Proto Pergerakan Rakyat; (3) Tahun 1912 sampai dengan 1927 Periode Pertumbuhan Pergerakan Rakyat Lokal dan Regional; (4) Tahun 1927 sampai dengan 1942 Periode Perpaduan antara Pergerakan Rakyat Lokal, Regional, dan Nasional.

Menurut Sjarifuddin, pergerakan rakyat sampai dengan 1942 di Kalimantan Selatan didukung oleh kaum terpelajar, pedagang, petani, pegawai negeri, ulama dan guru agama, dimana kaum terpelajarlah yang memegang peranan aktif dalam pergerakan tersebut dan Islam-lah yang menjadi motor penggerakannya. Islam dan Nasionalisme di

Kalimantan Selatan merupakan kesatuan yang erat sekali dan sukar dipisahkan, karena satu sama lain saling mengisi.

Tulisan lainnya berasal dari Alex A. Koroh dengan judul “Mengetahui Pertumbuhan dan Perkembangan Nasionalisme di Kalimantan Selatan Selama Tiga Dasawarsa 1912– 1942”. Tulisan itu merupakan laporan penelitian dari FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 1994, dan belum diterbitkan.

Seperti halnya M. Idwar Saleh dan Sjarifuddin, dalam laporan tersebut Alex A. Koroh juga berpendapat bahwa Islam berperanan penting dalam kebangkitan nasional di Kalimantan Selatan, dan dapat dikatakan bahwa sesungguhnya nasionalisme yang berkembang di Kalimantan Selatan sebelum tahun 1930 adalah nasionalisme Islam, dan setelah itu baru berkembang menjadi nasionalisme Indonesia.

Salah satu sumber rujukan terpenting berkaitan dengan pendidikan adalah buku *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan yang dieditori oleh Ramli Nawawi*.⁴³ Buku ini memuat sejarah perkembangan pendidikan dari sejak masa pergerakan kebangsaan, masa pendudukan Jepang, sampai dengan revolusi kemerdekaan. Buku ini akan menjadi salah satu sumber rujukan untuk melihat peranan pendidikan Islam dalam pergerakan kebangsaan.

Dalam buku berjudul *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942* yang disusun oleh Wajidi termuat paparan tentang beberapa organisasi pergerakan Islam seperti Sekolah Sarekat Islam, Sekolah Persatuan Perguruan Islam, Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Musyawatatthalibin. Senada dengan penulis lainnya, Wajidi mengatakan besarnya peran Islam dalam perkembangan nasionalisme di Kalimantan Selatan karena melalui organisasi Islam dan sekolah atau madrasah yang dikelolanya

43 Ramli Nawawi, ed. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan, 1992).

lahir para elite religius yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan.

Bahasan tentang pergerakan kebangsaan juga terdapat dalam buku yang dieditori M. Suriansyah Ideham dkk., dengan judul *Sejarah Banjar*.⁴⁴ Tulisan lainnya terdapat di beberapa laporan penelitian Puslit IAIN Antasari, Universitas Lambung Mangkurat, dan skripsi Jurusan Sejarah FKG Unlam yang dalam perkembangannya menjadi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam. Laporan penelitian dan skripsi itu pada umumnya bertema salah satu organisasi pergerakan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itulah, penulis beranggapan bahwa penting untuk menjadikan berbagai tulisan tersebut di atas sebagai bahan rujukan atau pembanding bagi sumber-sumber sekunder atau primer lainnya.

1.4 Sumber Data

Buku ini didasarkan atas hasil penelitian sejarah. Oleh karena itu, persoalan yang menyangkut pencarian dan penggunaan sumber perlu dikemukakan. Secara teoritis, peranan pendidikan Islam sebagai subjek bahasan dapat dilihat dalam berbagai bentuk fungsi pendidikan Islam pada masa itu seperti memberantas kebodohan dan mencerdaskan umat, menjadikan muslim yang beriman dan bertakwa, menanamkan kesadaran kebangsaan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Elite agama yang berpikiran maju yang dihasilkan pendidikan Islamlah yang di kemudian hari menjadi pelopor, motor atau aktivis pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dalam konteks penulisan ini, peran didefinisikan sebagai perangkat tingkah laku yang dalam hal ini adalah “fungsi” pendidikan Islam. Sedangkan peranan adalah fungsi yang dijalankan pendi-

44 M. Suriansyah Ideham, *et al* (editor), *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2007).

dikan Islam (pengajian, pesantren, sekolah Islam atau madrasah) dengan elite agama dan organisasi Islam.

Mengikut pendapat Soerjono Soekanto tentang peranan (*role*)⁴⁵ maka pendidikan Islam pada masa pergerakan kebangsaan yang melaksanakan fungsinya sesuai kedudukannya sebagai lembaga bertujuan untuk mencerdaskan, menanamkan iman dan takwa, serta kesadaran berbangsa maka berarti pendidikan Islam itu menjalankan suatu peranan.

Melalui pendidikan Islam dapat dilihat hubungannya dengan kebangkitan nasionalisme karena melalui pengajian, pesantren, sekolah atau madrasah, para tuan guru atau guru-guru agama dapat menumbuhkan kesadaran, menggerakkan, menginformasikan tentang pergerakan kebangsaan, meyakinkan (persuasi), menyadarkan, mengukuhkan dan mengubah pemikiran, dan mempropagandakan semangat kebangsaan kepada santri atau peserta didik.

Kajian ini menggabungkan pendekatan sejarah politik dengan pendekatan sejarah sosial. Menurut Kuntowijoyo, sejarah sosial menjadikan masyarakat sebagai bahan kajian.⁴⁶ Tema-tema garapan sejarah sosial seringkali adalah: (1) masyarakat secara keseluruhan; (2) peristiwa-peristiwa sejarah; (3) institusi sosial; (4) fakta sosial. Tema-tema itu, akan dikaitkan dengan pendidikan Islam dan pergerakan kebangsaan.

Mengacu kepada teori nasionalisme bahwa rasa kebangsaan tumbuh dari berbagai faktor, diantaranya adalah kondisi masyarakat itu sendiri yang mengalami penindasan, pemerjaan, diskriminasi, penderitaan, kemiskinan, dan kekejaman sebagai dampak dari penjajahan. Penjajahan di satu sisi telah menimbulkan penderitaan,

45 Lihat Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Op.cit.*, hlm. 210-211.

46 Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi Kedua, PT. Tiara Wacana Yogya bekerjasama dengan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 42.

tetapi akibat dari itu telah menimbulkan kesadaran senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah bangsa.

Sehubungan dengan hal itu, penulis berasumsi bahwa pengalaman bersama seperti penindasan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kekejaman yang dialami masyarakat Banjar pada masa penjajahan, merupakan bagian dari faktor yang berakumulasi dengan faktor lainnya terhadap munculnya nasionalisme dan patriotisme di Kalimantan Selatan.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa selain peran pendidikan, pergerakan kebangsaan berkaitan dengan akumulasi proses dari berbagai faktor pendorong dan peran pelopor pergerakan. Sehubungan dengan itu, dan selaras dengan pendekatan sejarah sosial sebagaimana yang dianjurkan oleh Sartono Kartodirjo,⁴⁷ maka pembahasan mengenai pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan akan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya, serta berbagai jalinan kondisi dan fenomena yang berkembang yang saling mengkait antar berbagai faktor baik di tingkat lokal maupun nasional, pusat dan daerah, antara Kalimantan Selatan dan Jawa, dan jalinan kondisi lainnya.

Buku ini lebih banyak menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang akan digunakan adalah berupa arsip atau manuskrip surat kabar sezaman, memoar, catatan atau surat-surat pribadi para anggota perintis kemerdekaan, veteran pejuang kemerdekaan, dan wartawan. Sumber lainnya berupa buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, dan sejenisnya. Sumber benda adalah informasi yang berkaitan dengan bangunan *langgar* (musala), bangunan tempat pengajian, pesantren, sekolah atau madrasah.

Pengumpulan data dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan luar Kalimantan Selatan. Pengumpulan data di Kalimantan Selatan dilaksanakan di Perpustakaan/Badan

47 Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Ombak, Yogyakarta, 2016.

Arsip Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Museum Negeri Lambung Mangkurat dan Museum Waja Sampai Kaputing, di lokasi pesantren atau sekolah Islam, dan perpustakaan lainnya yang memiliki data-data yang diperlukan. Di Jakarta, penulis telah mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jalan Ampera Raya dan Perpustakaan Nasional.

Sumber lisan tidak banyak diperoleh, karena hampir semua pelaku sejarah pada masa pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan telah meninggal dunia. Meski demikian, wawancara dengan pelaku atau informan sezaman pernah penulis lakukan tahun 1997 silam, diantaranya dengan Mawardi (aktivis Persatuan Pemuda Marabahan dan Sarekat Kalimantan), Imansyah (alumni Perguruan Taman Siswa) di Marabahan, Artum Artha (aktivis Parindra dan Partai Ekonomi Kalimantan), M. Suriansyah Ideham (alumni sekolah MULO di Banjarmasin), K.H. Birhasani (Pemuda Ansor, tokoh Nahdlatul Ulama), dan H. Anang Ahmad Nawier (aktivis Muhammadiyah/Pandu Hizbul Wathon) di Kalimantan Selatan.

Sumber penting lainnya adalah berupa foto-foto para aktivis pergerakan, berupa foto asli dan sebagian fotokopi tanpa diketahui dimana foto aslinya berada. Dokumen itu antara lain surat yang berkaitan dengan Sarekat Islam, sebagaimana terdapat dalam skripsi Sjamsuddin (1970), diantaranya salinan surat menyurat HOS Cokroaminoto selaku Voorzitter C.S.I dan PSI di Surabaya dengan Mohammad Horman Presiden Perhimpunan Sarekat Islam di Banjarmasin, Motie Congres Sarekat Islam, Harian Indonesia Merdeka, Motie Congres Moesjawaratoetthalibin IV, Ma'loemat National Borneo Conferentie dan beberapa memoar para pelaku pergerakan kebangsaan lainnya.

BAB II

LATAR BELAKANG PERGERAKAN KEBANGSAAN

Benih nasionalisme tumbuh dalam bingkai modernisasi dan eksploitasi kolonial. Nasionalisme tumbuh dan berkembang ketika modernisasi berupa penetrasi kebudayaan Eropa dan eksploitasi di berbagai bidang menimbulkan perubahan, kegoncangan, kesengsaraan, dan kesadaran di kalangan rakyat pribumi. Pada periode ini perjuangan merintis kemerdekaan dilakukan melalui organisasi pergerakan, pendidikan, dan media massa. Para nasionalis berjuang meraih kemajuan, menuntut keadilan, perbaikan dan kesejahteraan bangsanya.

2.1 Dampak Modernisasi dan Eksploitasi

Seperti halnya pergerakan kebangsaan yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia, maka tumbuhnya pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan pada awal abad ke-20 merupakan suatu fenomena historis yang lahir dari akumulasi proses berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bahkan agama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebab utama tumbuhnya kesadaran dan kebangkitan nasional Indonesia berasal dari situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sendiri sebagai dampak dari penjajahan.¹ Faktor-faktor dari luar negeri, seperti paham liberalisme, pendidikan Barat, Pan Islamisme lebih bersifat mempercepat pergerakan tersebut.

1 Lihat Departemen Sosial, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex Digul*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, 1977), hlm. 22.

Di antara faktor-faktor dalam negeri dan bersifat nasional itu adalah adanya tekanan dan penderitaan terus menerus, sehingga menjadikan bangsa Indonesia bangkit untuk bebas dari penderitaan tersebut. Kemudian adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang menimbulkan semangat bersatu antar suku bangsa, serta adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri berupa kehendak memiliki tanah air dan menentukan nasib sendiri.²

Seiring dengan semakin dikuasainya Kalimantan Selatan bekas wilayah Kesultanan Banjar, maka dengan leluasa Belanda menerapkan semua kebijakan kolonialnya baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada bekas wilayah kesultanan Banjar, Belanda membentuk Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo (*Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo*) beribukota di Banjarmasin. Luas wilayah keresidenan ini meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara sekarang.

Di wilayah keresidenan inilah Belanda menjalankan pemerintahan, dan dengan leluasa menerapkan semua kebijakan kolonialnya baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada bidang politik, perubahan sistem pemerintahan dari tradisional ke sistem modern turut memunculkan perubahan yang signifikan berupa penetrasi kebudayaan Barat dalam berbagai bentuk. Contohnya, masuknya sistem pemerintahan modern menggantikan sistem feodal, sistem perkotaan dan teknik bangunan modern, infrastruktur jalan,³ jembatan dan listrik, kemudian latinisasi tulisan menggantikan huruf Jawi (Arab-Melayu) yang

2 Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2002), hlm. 14.

3 Misalnya di awal abad ke-20 Belanda membangun jalan pos yang menghubungkan Banjarmasin dengan Hulu Sungai. Jalan ini dibangun untuk kepentingan pos dan militer. Penduduk diminta pindah menempati jalanan baru ini untuk mempermudah pengawasan.

mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai medium komunikasi lisan maupun tulisan, pemakaian undang-undang yang dibuat pemerintah kolonial, masuknya pendakwah kristen (*misionaris-zending*)⁴ ke daerah ini khususnya di daerah Dayak Ngaju seperti desa Barimba, Kapuas dan Mandomai. Berikutnya, masuknya ekonomi kapitalis menggunakan mata uang menggantikan sistem ekonomi tradisional, meningkatnya modernisasi alat angkutan darat dan laut.

Perubahan juga terjadi pada gaya hidup yang disebut perubahan dari “tradisi” ke “kemoderenan” seperti berkembangnya mode pakaian Barat, tingkah laku seperti adat jabat tangan, cara duduk dan cara makan, penggunaan sendok dan garpu, upacara jamuan makan. Selanjutnya penggunaan kursi meja di ruang tamu dan ruang makan, penggunaan podium untuk berpidato di rapat-rapat umum—bahkan dalam khotib salat Jumat menggantikan mimbar bagi organisasi pembaharu seperti Muhammadiyah. Kemudian meningkatnya sikap mental dan cara berpikir yang bersifat ilmiah-rasional atau logis, praktis dan pragmatis yang kesemuanya berlawanan dan bahkan semakin melunturkan kebiasaan yang bersifat tradisional seperti sikap mistis-animistik yang sebelumnya berlaku di masyarakat.

Meski terjadi perubahan ke arah modernisasi, tidak serta merta perubahan itu berdampak positif kepada kehidupan masyarakat. Alasannya hak otonomi yang diberikan penguasa kolonial melalui lembaga itu hanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat kulit putih sebagai golongan penguasa di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

4 Menurut Denys Lombard Gereja Kristen merupakan perantara pembaratan, meski perannya tidak sendiri bahkan tidak esensial, lihat Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 102-103.

Politik garis warna (*color line*) yang lahir setelah terbitnya *Nederlands Indische Onderdanschap* tahun 1911 yang membedakan masyarakat Hindia Belanda kepada tiga golongan yakni: Orang Eropa, Timur Asing dan Bumiputera. Hal ini mengakibatkan munculnya perlakuan diskriminasi terhadap golongan pribumi. Peningkatan peluang ekonomi lebih terbuka lebar bagi pengusaha orang timur asing dan Eropa dibanding pribumi.

Perlakuan diskriminasi tidak hanya berlaku pada golongan pribumi dengan orang Eropa atau Timur Asing. Pemberlakuan juga dilakukan pada golongan pribumi muslim dengan pribumi penganut agama Kristen. Pada tahun 1920-an, guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal dan kaum masjid dikenakan kewajiban oleh pemerintah kolonial untuk menjalankan *Ordonnantie Heeren Dienst*. Aturan ini menyangkut *erakan* atau kerja *rodi*, sedangkan guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending utusan RMG (*Rheinische Missions Gesellschaft*)⁵ justru dibebaskan dari kewajiban itu.⁶

Perlakuan diskriminasi atau pengkotakan status sosial yang terjadi di dalam masyarakat mengundang pertentangan sosial dan ini menyebabkan seringnya terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah. Penindasan itu pada

5 Sebuah misi zending dari Jerman yang menyebarkan agama Kristen di daerah Kapuas dan Barito sejak tahun 1835 sampai dengan 1921 saat tugasnya diserahkan kepada *Bazelsche Zending* atau *Basler Mission Gesellschaft*.

6 Oleh karena itu, organisasi Sarekat Islam pernah mengeluarkan mosi kepada pemerintah Hindia Belanda agar menghilangkan diskriminasi terhadap masyarakat pribumi, lihat Sjamsuddin "*Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942*", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah Fkg Unlam, 1970), hlm. 67.

akhirnya menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa di kalangan orang-orang pribumi.⁷

Selain politik garis warna dalam bentuk diskriminasi golongan pribumi, Pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan sistem ekonomi uang. Dalam sistem ekonomi uang ini, di satu sisi rakyat mengenal mata uang sebagai alat pembayaran, akan tetapi di sisi lain beban rakyat menjadi bertambah berat. Karena melalui sistem itulah justru memudahkan bagi pengurusan ekonomi.

Pengurusan ekonomi itu dilakukan antara lain berupa pengenaan pajak pencaharian (*Inkomsten Belasting*), pajak tanah (*Landrente*), pajak kepala, pajak erakan, bea masuk (*Bea Invoerrecht*), pajak penyembelihan (*Slachbelasting*) dan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi yang memberatkan rakyat yang dipungut berlapis-lapis yang semuanya untuk kepentingan pemerintah kolonial.⁸

Berbagai tindakan diskriminasi dan eksploitasi yang dikenakan pemerintah Hindia Belanda itu setidaknya telah memunculkan benih-benih kesadaran untuk terbebas dari penjajahan. Bahkan menjadi perhatian utama organisasi-organisasi pergerakan di daerah ini, seperti yang diperjuangkan oleh Sarekat Islam melalui sejumlah Mosi Kongres

7 Aban Duraup, "*Riwayat Singkat Perjuangan Aban Duraup Dalam Rangka Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan*", (Ulin-Banjarbaru: naskah ketikan, 1983).

8 Selain pajak di atas terdapat pula pajak tanah, uang kepala, pajak rumah tangga, pajak kekayaan, pajak sepeda, pajak jalan (*wegenbelasting*). Uang kepala, pajak rumah tangga dan kekayaan masuk kas negeri. Sedangkan pajak sepeda dan jalan adalah untuk keperluan perbaikan jalan dan juga untuk menggaji polisi. Untuk pembakal selain uang collecte ada juga uang tiga tali. Ketika Jepang menguasai Kalimantan Selatan, pajak dipungut separo dan disebut "Oeroenan Oemoem", lihat "Konferensi di Kandangan, Pajak diganti Oeroean Oemoem", dalam Kalimantan Raya No. 13 Djoem'at 20 Maart 1942 Tahoen Pertama, hlm. 2.

sebagai hasil dari Kongres Sarekat Islam di Banjarmasin pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 1923.⁹

Beban pajak, pungutan, rodi atau *erakan* ditambah keadaan depresi ekonomi saat itu, merupakan salah satu pemicu keresahan yang bermuara kepada munculnya pemberontakan. Seperti yang dilakukan oleh Guru Nanang Sanusi 1914-1918 dan pemberontakan Gusti Darmawi tahun 1927.¹⁰

Sebagaimana dikatakan Malcom Caldwell dan Ernst Utrecht, peningkatan peluang ekonomis bagi orang Timur Asing dan Eropa telah meradikalkan suatu kelas kecil pengusaha atau calon pengusaha Indonesia. Mereka bersatu dengan Islam reformis yang telah mendapat pengaruh Pan Islamisme di Asia Barat (Timur Tengah) bersatu dalam hasrat mengakhiri pemerintahan kafir di Indonesia.¹¹

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di tahun 1920-an yang berkaitan dengan pajak, rodi, *erakan*, dan pungutan ditambah dengan pendidikan yang kurang maju mengakibatkan penduduk khususnya dari Hulu Sungai yang melakukan migrasi baik berupa *madam*¹² atau pun *tajun*¹³ ke

9 Lebih jauh tentang Mosi Kongres Sarekat Islam, lihat Wajidi, *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007), hlm. 125-128.

10 M. Idwar Saleh *et al.*, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, 1978/1979), hlm. 48-49..

11 Malcom Caldwell dan Erns Utrecht, *Sejarah Alternatif Indonesia*, (Jakarta: Djaman Baroe, 2011), hlm. 91.

12 *Madam* artinya pergi jauh meninggalkan banua (kampung halaman) dan tidak berpikir untuk kembali ke kampung halaman tempat asalnya. Tanah rantau tempat tujuan mereka *madam* disebut “*pamadaman*” yang artinya sama dengan “*perantauan*”. Pengertian *madam* dapat pula dikonotasikan sebagai pergi merantau yang dilakukan secara sadar, misalnya untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. *Madam* di sini diumpamakan keluar rumah melalui pintu depan, dilepas oleh sanak keluarga, kerabat dan jiran.

pesisir Timur Sumatera seperti Kuala Tungkal, Sapat, Tembilahan. Dari daerah pesisir timur Sumatera inilah mereka melakukan migrasi lompatan katak (*leaping frog*) ke Semenanjung Malaya untuk mencari penghidupan yang lebih baik.¹⁴

Migrasi orang Banjar merupakan satu diantara bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial. Menurut Sartono Kartodirdjo, fenomena migrasi bukanlah semata-mata faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan mereka, namun juga disebabkan faktor lain seperti faktor politik yang kadang-kadang membuat orang menentukan harus pindah ke daerah lain.¹⁵ Purwanto mengemukakan bahwa ketika tekanan politik Belanda terhadap Banjarmasin dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan semakin intensif, orang

13 Tajun adalah pergi merantau yang dilakukan dengan keterpaksaan karena berbagai alasan misalnya karena adanya perkelahian di kampung sehingga harus melarikan diri, malu karena bercerai dengan isteri atau suami, atau pada kasus masa perang Banjar dahulu adalah para pejuang yang melarikan diri agar tidak ditangkap oleh militer Belanda. Orang yang tajun meninggalkan kampung halaman dianalogikan sebagai keluar diam-diam melewati pintu belakang rumah, jika pun ada orang lain yang mengetahui hanya keluarga terdekatnya saja.

14 Lihat pula Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 9 yang menyebutkan awal abad ke-20 puluhan ribu penduduk Hulu Sungai pergi untuk menetap di Melaka. Sebenarnya keberadaan komunitas orang Banjar di Melaka tidak sebanyak di Negara Bagian Perak, Selangor, maupun Johor. Oleh karena itu, yang dimaksud Melaka dalam laporan Sjamsuddin adalah Semenanjung Tanah Melayu. Lihat juga Mohamed Salleh Lamry, 1997. "Migrasi Pekerja Indonesia ke Malaysia: Sebuah Pengantar", dalam M. Arif Nasution (Penyunting), *Mereka yang ke Seberang, Proses Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia*, (Medan: USU Press, 1997, hlm.1.

15 Sartono Kartodirdjo *et al.*, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm. 116-118.

Bugis dan Banjar semakin banyak yang membuka daerah rawa-rawa di sepanjang pantai timur Sumatera.¹⁶

2.2 Pengaruh Pendidikan dan Media Massa

Penetrasi kebudayaan Barat yang sangat kuat pengaruhnya terhadap tumbuhnya pergerakan kebangsaan di daerah ini adalah di bidang pendidikan. Dalam hal ini melalui sistem persekolahannya, baik melalui sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah *misionaris-zending* di pedalaman. Bedjo Riyanto mengatakan penerapan sistem pendidikan Barat semakin mempercepat laju proses modernisasi.¹⁷ Pemberian pendidikan kepada kalangan pribumi berkaitan erat dengan Politik Balas Budi (*Politik Etis*) dengan slogan, “*Irigasi, Edukasi dan Emigrasi*” yang dimaksudkan untuk memajukan pribumi¹⁸

Malcom Caldwell dan Erns Utrecht berpendapat pendidikan Barat menghasilkan orang didikan Barat, berorientasi-kota, dan fasih berbicara. Mereka siap mengubah perlakuan tidak adil dan diskriminatif Belanda menjadi nasionalisme militan terutama yang bersifat retorik.¹⁹ Pendidikan secara Barat yang menghasilkan elite baru berdampak kepada perubahan struktur lapisan sosial. Lebih luas lagi, proses industrialisasi, komersialisasi pertanian, perubahan sistem birokrasi, urbanisasi, maupun mobilitas sosial memunculkan pola hubungan sosial dan jaringan baru. Ikatan komunal masyarakat agraris yang feodal bergeser

16 A. Muthalib, *Tuan Guru Sapat, Kiprah dan Perannya Dalam Pendidikan Islam di Indragiri Hilir Riau pada Abad XX*. (Yogyakarta: Eja Publisher, 2008), hlm. 24.

17 Bedjo Riyanto, *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915)*, (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm. 44.

18 Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, (Jakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 21. Taufik Abdullah, (ed.), *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), hlm. 33

19 Malcom Caldwell dan Erns Utrecht, *Sejarah Alternatif Indonesia*, (Jakarta: Djaman Baroe, 2011), hlm. 91.

ke ikatan asosiasional melalui berbagai organisasi kemasyarakatan.

Perkembangan sekolah dan surat kabar termasuk pemakaian huruf latin telah mendorong dinamika kebudayaan selanjutnya. Sekitar 25 persen surat kabar di Indonesia periode 1900-1925 memuat kata-kata seperti: matahari, surya, bintang, nyala, suluh, pelita, sinar, cahaya, api, fajar, muda, baru, dan gagah yang menyiratkan kebangkitan pribumi.²⁰ Sebagaimana dikatakan Togi Simanjuntak, terdapat korelasi antara keterbukaan informasi yang datang dari surat kabar dan majalah dengan lahirnya organisasi kebangsaan.²¹ Media turut mempersubur pergerakan kebangsaan, dan di situlah masyarakat mendapatkan ide-ide tentang kemerdekaan, *liberalisme*, *parlementarisme*, mendapatkan informasi perkembangan pergerakan di Pulau Jawa, dan sebagainya.

20 Lihat Benedict O’Gorman Anderson, 1983. “Masa Kegelapan dan Masa Terang Benderang, Perubahan Pemikiran Kaum Nasionalis Indonesia di Masa Awal”, dalam Anthony Reid dan David Marr (editor). *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*. (Jakarta: Grafitipers, 1983), hlm. 4. Catatan kaki (footnote) nomor 6.

21 Togi Simanjuntak, editor, *Wartawan Terpasung*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998), hlm. 229-230.



Gambar 1 Leesgezelschap (Taman Bacaan) Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) berdiri 1 Maret 1929. (Sumber: dok. Mawardi)

Meski mendapat pengawasan ketat dari pemerintah kolonial, para pemuda dapat memperoleh informasi tentang politik melalui Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) seperti yang dimiliki oleh organisasi Srie di Banjarmasin, maupun organisasi Persatuan Pemuda Marabahan (PPM). Diadakannya taman bacaan berkaitan erat dengan keinginan tokoh masyarakat setempat agar kegiatan dapat mengurangi jumlah penduduk yang buta huruf. Sebagai bahan bacaan mereka berlangganan surat kabar dan majalah yang terbit atau beredar di Kalimantan Selatan harian Oemoem, Tempo, PNI Soeloeh Indonesia, Bintang Timoer, Soera Persatoean Goeroe Indonesia, Hindia Baroe, Bintang Baroe, Bintang Islam, Kemadjoean Hindia, Terang Boelan, Soera Parindra, majalah bulanan Taman Siswa, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan organisasi pergerakan kebangsaan, maka tokoh pers maupun tokoh pergerakan di Kalimantan Selatan menerbitkan pula surat kabar, harian, mingguan, bulanan baik yang berhaluan nasional, Islam, nasional sekaligus Islam, ataupun netral. Diantaranya ada

yang berdiri sendiri, organ dari partai politik, atau berdiri sendiri namun redaksinya diisi oleh anggota organisasi pergerakan, seperti Majalah Malam Djoema'at, Surat Kabar Soeara Rakyat Kalimantan (SORAK), Soeara Kalimantan, Tjanang, Oetoesan Kalimantan, Pembangoenan Semangat, Berita N.Oe, Soeara Pakat Dajak, Soeara M.Th, Soeara B.I.C, Bingkisan, Kesadaran Kalimantan, Pelita Masjarakat, dan Panggilan Waktoe, dan lain-lain.²²

Dengan demikian, pers kebangsaan yang beredar adalah surat kabar dan majalah dari Jawa dan Sumatera, dan terbitan lokal. Pada umumnya isi surat kabar dan majalah yang terbit di Kalimantan Selatan tidak berbeda jauh dengan pemberitaan yang terdapat dalam surat kabar atau majalah di Jawa. Dalam hal ini menginformasikan perkembangan politik kebangsaan, menyuarakan pentingnya persatuan, memberitakan dan mengkritik ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda, dan sebagainya yang merupakan bagian dari pergerakan nasional di daerah ini.

Amir Hasan Bondan dalam tulisannya di surat kabar Indonesia Merdeka, berjudul "Pers di Kalimantan" menceitakan sekilas perkembangan pergerakan tahun 1920-an. Beliau mengangkat kembali tulisannya yang pernah terbit dalam majalah Malam Djoema'at terbitan tanggal 24 November 1927 dengan judul "Perasaan Bandjar Totok". Amir Hasan Bondan membandingkan pemberitaan Malam Djoema'at dengan koran yang ia baca di Jawa. Ternyata menurutnya terdapat persamaan antara isi surat kabar di Jawa dengan Borneo. Menurut koran-koran di Borneo tidak kalah dengan koran-koran di Jawa karena sama-sama hangat bunyi beritanya.

Saja ini seringkali berlajar pulang balik ke tanah
Djawa berdagang barang makanan dan dan barang

22 Lihat Artum Artha, "Cita-Cita Mencapai Indonesia Mulia Merdeka dan Berdaulat", (Banjarmasin: naskah ketikan, 1984).

palen. Di segenap pasar dan desa banyak kenalan orang2 Djawa dan Madura dan saja kerap kali nonton orang gaderingan, politik buat kemadjuan bangsa. Di Djawa petjah kabar, tuan besar Djenderal sudah mengeluarkan perintah sama amtenar2 supaya djangan membesarkan diri. Pendeknja supaya orang2 Kantoran mau berbitjara pandjang sama orang Kampung, suka mengenal rakjat.....

Tempo saja pulang di Bandjarmasin, kenapa saja kebetulan ada membatja Koran Malam Djum'at.²³ Di dlm koran saja ada batja matjam2 karangan buah pikiran anak Bandjar. Di antara karangan2 jg sudah saja batja, jang menarik hati benar2 jaitu: I. Tuan besar Djenderal bermaksud supaya orang2 jg makan gadjih sama Kompeni dan bangsa Belanda supaya suka mengenal rakjat dan suka berbitjara sama tetuha2 kampung.....

(Tjotjok sadsja kabar Djawa sama Borneo. Lamun begitu koran2 di Borneo tidak kalah lawan koran2 di Djawa. Sama2 hangat bunji kabarannja)²⁴

Lebih lanjut, Amir Hasan Bondan juga menggelorakan semangat untuk maju seperti di Jawa dengan menganjurkan perlunya anak-anak Banjar bersekolah dan bergotong royong merintis sekolah bagi kaum perempuan sebagai berikut:

Di Djawa di kampung banjak sekolah matjam2, laki2 perempuan kerotjosan bisa basa Belanda-Inggeris. Di rumah kuting-kutingan koran di tangan. Djadi dalam hati saja, kalu sama bersekolah, tida ada lainnja Djawa sama Bandjar.

23 Majalah "Malam Djoema'at" ketika dimuat kembali ke dalam surat kabar Indonesia Merdeka ditulis "Malam Djum'at".

24 Amir Hasan Bondan, "Perasaan Bandjar Totok", dalam majalah Malam Djoema'at, 24 November 1927, dimuat kembali dalam surat kabar Indonesia Merdeka, Nomor 99 Tahun ke VII, Sabtu 28 April 1951, dengan judul "Pers Kalimantan". Lihat pula Wajidi, *Nasionalisme.....Op.cit.*, hlm. 83-84. Disalin sesuai ejaan aslinya.

Sekarang Borneo mau madju, tapi bagaimana kalau sekolah sedikit. Tiap tahun banjak anak Bandjar tidak bisa dapat tempat di sekolah². Pasal ini, anak Bandjar jang nekat² dan sekolah tinggi djangan berdiam diri sadja, sunji burinik. Saja liat di Djawa jg djadi pengurus, semua orang Djawa jang pintar²; rakjat berdiri di belakang si pintar. Mustahil di Bandjar tida ada org pintar jg suka beraksi buat memadjukan negeri.

Lamun anak Bandjar jang berdiploma kagum, siap lagi jg diharap² buat ke muka. Orang kampung kebanyakan ada sadja hati mau turut madju, tetapi kepala kawan tida bergerak.

Adapun pasal meadakan sekolah perempuan, lamun orang besar tida lekas memulainja, kita kerdjakan sendiri. Orang kampung harus rami² membantu uang derma dan jg pintar djadi pengurusnja. Dan lagi kalau les derma sudah didjalankan, diharap djuga saudagar² Bandjar buka tangan, djangan engken mengeluarkan uang derma, sebab itu amal memadjukan bangsa sendiri kaum perempuan....²⁵

Dari tulisannya yang termuat dalam Majalah Malam Djoema'at, terlihat dengan jelas bahwa pers berperan menginformasikan perkembangan politik. Terutama perkembangan pergerakan kebangsaan di Jawa dan Sumatera. Pers juga berperan penting menyuarakan ketimpangan antara kehidupan masyarakat di Jawa dengan Kalimantan, dan menggelorakan semangat untuk maju bergerak menuju kemajuan.

Pergerakan nasional itu tidak terlepas dari peranan elite baru atau elite modern. Para elite inilah yang memiliki kesadaran dan merasakan ketidakadilan terhadap pribumi. Melalui pendidikan, organisasi pergerakan, dan media massa, mereka berjuang meraih kemajuan, menuntut keadilan, perbaikan dan kesejahteraan bangsanya.

25 Amir Hasan Bondan, *Loc.cit.* Lihat pula Wajidi, *Loc.cit.* Disalin sesuai ejaan aslinya.

Robert Van Niel²⁶ mengemukakan bahwa bangkitnya kesadaran kebangsaan itu dipelopori para elite atau cendekiawan. Mereka itu dapat dikatakan sebagai elite baru atau elite modern yang lahir melalui jalur pendidikan formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (partikelir). Kondisi di Jawa, yang menjadi fokus perhatian Van Niel adalah elite cendekiawan. Elite ini terutama diwakili para priyayi baru. Kelompok priyayi ini oleh Van Niel dikelompokkan menjadi dua, yakni priyayi Jawa yang berkiprah sebagai aparat birokrasi, dan kelompok kedua adalah pengusaha pribumi yang kebanyakan bergabung ke dalam Sarekat Islam.



Gambar 2 Barisan Indonesia (Bindo) dengan Bendera Merah Putih yang dikibarkan, 30 April 1934. (Sumber: dok. Surya Alamsyah).

Robert van Niel²⁷ juga memaparkan bahwa para kaum pelajar ini bertemu dengan banyak perbedaan, terutama perbedaan sikap yaitu sikap ilmiah rasional dan sikap mistis

26 Lihat Robert Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), khususnya pada bab II Akselerasi Perubahan, 1900-1914.

27 Van Niel, *Ibid.* hlm.89.

animistis sehingga mengalami kegagapan kultural. Dalam pengembaraan intelektual mereka memamah ide-ide universal yang berhembus dari Barat yaitu nasionalisme dan komunisme, sedangkan dari luar Barat adalah Islam. Nasionalisme dalam konteks ini diartikan sebagai bangsa yang dibangun dari kemajemukan dan secara diikat politis.

Bagaimana perkembangan elite baru di Kalimantan Selatan? Sejalan dengan Van Niel, Sjarifuddin berpendapat pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan umumnya berasal dari golongan menengah masyarakat pribumi, seperti elite agama, cendekiawan, dan pedagang.²⁸ Cendekiawan dan elite agama dapat dikatakan sebagai elite baru.

Para elite baru memandang Tanah Jawa sebagai kiblat pergerakan kebangsaan Indonesia. Kondisi di Jawa berdiri partai-partai politik dan bawahannya (*onderbouw*), sebagai pandu perjuangannya, menyebar ke berbagai daerah atau menjadi inspirasi pergerakan serupa di pulau-pulau lainnya di Hindia Belanda.

2.3 Organisasi Pergerakan

Masuknya pengaruh pergerakan rakyat yang tumbuh di Jawa ke Kalimantan Selatan tidak hanya bersifat fisik. Dalam hal ini berupa masuk dan tumbuhnya cabang organisasi pergerakan yang ada di Jawa ke daerah ini, melainkan juga dalam bentuk gagasan atau keinginan yang timbul untuk memajukan daerah karena terinspirasi kemajuan-kemajuan di Tanah Jawa.

Masuknya organisasi pergerakan rakyat yang tumbuh di Jawa ke Kalimantan Selatan melalui dua macam cara. Cara tersebut adalah diterima langsung oleh pelopor pergerakan rakyat atau pergerakan kebangsaan di Kali-

28 Sjarifuddin, "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1974), hlm. 33.

mantan Selatan dari tempat asal organisasi tersebut di Jawa, yang selanjutnya dibawa dan dikembangkan di daerah ini. Hal ini antara lain dapat dihubungkan dengan masuknya Sarekat Islam dibawa oleh H.M. Arip, seorang pedagang yang sering pulang pergi Banjarmasin-Surabaya. Demikian juga masuknya PBI/Parindra yang dibawa Merah Johansyah, seorang pegawai pamongpraja Hindia Belanda, yang menjadi tokoh pergerakan rakyat di daerah ini.

Adapula yang diterima melalui tokoh-tokoh pergerakan dari Jawa dan Sumatera ke daerah ini. Arus kaum pergerakan yang datang dari Jawa berlangsung sejak tumbuh dan berkembangnya SI di daerah ini pada tahun 1912. Organisasi pergerakan yang masuk dari Jawa, sebagian besar adalah pergerakan yang bersifat sekuler seperti PNI, PBI/Parindra, PNI Pendidikan dan Perguruan Taman Siswa yang bergerak di bidang pendidikan kebangsaan.

Kaum pergerakan dari Jawa dan Sumatera, umumnya bekerja sebagai guru yang mengajar ilmu pengetahuan umum di sekolah-sekolah dan kemudian bergabung dengan para pelopor pergerakan rakyat. Diantaranya, M. Yusak, Sundoro, dan Yusyadi yang dikirim Ki Hajar Dewantara sebagai guru perguruan Taman Siswa di Marabahan. Dari Parindra, antara lain Raden Imam Subekti dan Johannes Baker, kelahiran Pulau Flores, berasal Parindra Surabaya.

Ketika berada di Jawa, mereka juga sebagai pengurus inti dari organisasi pergerakan, seperti Maraja Sayuthi Lubis dari Centraal Sarekat Islam di Jawa yang datang ke Kalimantan Selatan untuk memperkuat Sarekat Islam di Kalimantan Selatan. Mereka bersama-sama berjuang dalam wadah pergerakan rakyat yang mereka bina bersama, baik berupa partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan.

Seperti halnya di Jawa dengan Budi Utomo²⁹ yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh mahasiswa STOVIA, di

29 Meski ada anggapan bahwa tujuan Budi Utomo hanya untuk mengangkat tarap hidup orang Jawa dan Madura daripada

Banjarmasin sebelumnya juga telah tumbuh cikal-bakal organisasi yang bersifat modern, namun masih bersifat lokal. Organisasi tersebut adalah organisasi Seri Budiman yang didirikan pada tahun 1901 atas inisiatif Amir Hasan Kiai Bondan. Organisasi ini beranggotakan para pangreh praja dan pedagang yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi sesama anggotanya, mempropagandakan pentingnya pengajaran dari Barat, persatuan kaum pedagang dan pertanian.



Gambar 3 Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) cabang Kandangan.
(Sumber: dok. Yurliani Johansyah)

menjadikan kesatuan Indonesia. Akan tetapi berdasarkan kajian Akira Nagazumi, kebangkitan Budi Utomo bukan sekedar “bangunnya si molek Insulinde dari tidur yang lelap”, melainkan juga berhubungan dengan nilai-nilai tetap pergerakan politik di Indonesia berikutnya, lihat Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. v-xi. Kajian Akira selaras dengan Robert van Niel dalam bukunya, *Munculnya Elit Modern Indonesia* yang melihat Budi Utomo sebagai organisasi yang wataknya berbeda dengan sebelumnya karena didirikan oleh pemuda Jawa terpelajar.

Meski pada mulanya bersifat lokal dan menonjolkan watak sosial, para anggota Seri Budiman yang mendapat pengaruh dari kebudayaan atau pendidikan secara Barat telah memelopori tumbuhnya organisasi dan kebiasaan yang bersifat modern yang diikuti organisasi-organisasi di kemudian hari. Misalnya, perkumpulan Seri Budiman yang mula-mula sebagai pelopor mempergunakan podium sebagai sarana para pembicara di sidang-sidang rapat, sehingga kebebasan berbicara di atas mimbar menjadi suatu kebiasaan baru dalam dunia perhimpunan di Kalimantan Selatan.

Meminjam istilah Benedict O’Gorman Anderson tentang Budi Utomo bahwa “kebaharuan strukturalnya agaknya menandai suatu perbedaan yang jelas dengan masa lampau”.³⁰ Istilah itu tepat juga dikenakan kepada Seri Budiman karena organisasi ini memiliki kebaharuan struktural seperti memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tujuan tertentu yang hendak dicapai serta kelengkapan organisasi seperti kesekretariatan dan taman bacaan yang berbeda dengan organisasi sebelumnya yang bersifat *sinoman*.³¹ Inisiator Seri Budiman yakni Amir Hassan Bondan sebagai pemuda Banjar pertama lulusan *Europese Lagere School* (ELS) tahun 1893 dan kemudian melanjutkan ke STOVIA namun tidak tamat, dapat memperjelas bahwa organisasi Seri Budiman didirikan oleh kalangan terpelajar. Kenyataan ini merupakan suatu fakta sejarah bahwa embrio organisasi pergerakan di Kalimantan Selatan pernah ada sebelum kelahiran Budi Utomo.

Elite agama (elite religius) adalah elite yang dihasilkan oleh pendidikan yang berbasis keagamaan seperti

30 Benedict O’Gorman Anderson, 1983. “Masa Kegelapan dan Masa Terang Benderang, Perubahan Pemikiran Kaum Nasionalis Indonesia di Masa Awal”, dalam Anthony Reid dan David Marr (editor). *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*. (Jakarta: Grafitipers, 1983), hlm. 5.

31 Organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional dan lokal, misalnya *sinoman* kematian, *sinoman* perkawinan, *sinoman* kesenian, *sinoman* kesusastraan, dan *sinoman* perayaan.

Madrasah Persatuan Perguruan Islam, Madrasah Sarekat Islam, Sekolah Muhammadiyah, dan Madrasah Musyawaratutthalibin.³² Sementara elite cendekiawan (elite sekuler) merupakan hasil pendidikan sekolah partikelir yang diasuh kaum pergerakan rakyat seperti Parindra (Perguruan Rakyat Parindra/Sekolah Medan Antara Parindra) dan Taman Siswa (Perguruan Taman Siswa), ditambah hasil pendidikan di sekolah pemerintah yang turut serta dalam pergerakan kebangsaan, atau pegawai negeri yang dipecat karena melibatkan diri dalam pergerakan kebangsaan.

Pada dekade pertama abad ke-20 segelintir pemuda pribumi Kalimantan Selatan telah mengecap pendidikan tinggi di Jawa dan Sulawesi, maupun sekolah pemerintah di Kalimantan Selatan. Sekolah tinggi ataupun sekolah menengah itu dipersiapkan untuk mencetak pegawai rendahan yang nantinya dapat menjalankan pemerintahannya di segala bidang sesuai keperluan Pemerintah Hindia Belanda. Sekolah pemerintah atau sekolah negeri ketika itu yang kemudian menghasilkan sumber daya manusia terdidik sebagai elite baru yang berpikiran modern.



Gambar 4 “Bond Indonesische Chaoppeur
(*Chauffeur*, pen.) Tjabang Barabai 1934”
(Sumber: dok. H. Abdul Muis).

32 Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 293-296.

Beberapa di antara lulusan HIS dan MULO ditambah lulusan OSVIA Makassar, ada yang menjadi pamongpraja atau pegawai perkantoran pemerintah. Diantaranya adalah Merah Johansyah, putera Kiai Besar Merah Nadalsyah (Kiai Besar Hulu Sungai), yang menamatkan pelajaran di OSVIA di Makassar. Selama belajar di OSVIA Makassar, Merah Johansyah bersama dengan M. Yusran dan M. Jahri mendirikan organisasi “Pemuda OSVIA Kalimantan” pada tahun 1925-1926.³³ Lulusan OSVIA Makassar lainnya diantaranya adalah Syarkawi bin Achmad Dahlan lahir di Amuntai 15 Desember 1907, Basuni bin H. Mohammad Arsyad lahir di Barabai 31 Agustus 1904, Achmad Ruslan lahir di Banjarmasin 31 Januari 1902. Ketiganya pernah menjabat sebagai Kiai Kepala.³⁴

Tokoh lainnya adalah Amir Hasan Kiai Bondan. Beliau mengikutsertakan nama ayahnya, Kiai Bondan. Memasuki sekolah *Europese Lagere School* (ELS)³⁵ tahun 1893, dan kemudian melanjutkan ke STOVIA meski tidak tamat. Amir Hasan Bondan adalah seorang diantara tokoh pendiri organisasi Seri Budiman (1901), Budi Sempurna, dan Srie, serta pengasuh Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) dan majalah mingguan *Malam Djoema’at*.³⁶

Elite modern inilah yang karena mempunyai kesadaran literasi yang baik dibanding masyarakat kebanyakan. Mereka mempunyai pengetahuan yang luas yang diperoleh melalui pendidikan maupun bahan bacaan seperti buku, media cetak termasuk surat kabar dan majalah. Ketika kembali ke kampung halaman para elite modern itu turut menjadi pelopor, penggerak organisasi pergerakan, dan

33 Anggraini Antemas, *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan*, (Amuntai: Mega Sapura, 1988), hlm. 26.

34 *Harian Indonesia Merdeka*, Senin 30 April 1951.

35 Sekolah dasar 6 tahun berbahasa pengantar Belanda untuk orang Belanda, orang peranakan atau pribumi yang haknya dipersamakan (*gelijkgestelden*).

36 Lihat Wajidi, *Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950*, (Yogyakarta: Debut Press, 2011).

guru-guru sekolah kebangsaan di Kalimantan Selatan. Mereka pula yang menjadi pendiri atau redaksi surat kabar dan majalah, atau dengan tulisan-tulisannya di media massa menyuarakan ketidakadilan dan menentang penguasa kolonial.

Adakalanya pula mereka membawa paham pergerakan rakyat yang tumbuh di Jawa untuk didirikan sebagai cabang di Kalimantan Selatan. Diantaranya Partai Nasional Indonesia (PNI), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru/PNI Pendidikan), Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Perguruan Taman Siswa. Mereka yang berjuang melalui organisasi itu berpendapat bahwa kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap kalangan pribumi harus dilawan melalui organisasi pergerakan. Mereka itu dapat dikatakan sebagai elite baru atau elite modern yang lahir melalui jalur pendidikan formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (partikelir) dan sekolah agama dalam berbagai bentuk. Sekolah-sekolah itu umumnya dikelola oleh kaum pergerakan baik yang bercorak sekuler maupun keagamaan yang berorientasi kebangsaan.

Melalui pendidikan dan perpustakaan mereka mengenal huruf latin, memiliki kebiasaan membaca buku, koran atau majalah, dan mengenal dunia lain di luar tanah Hindia. Mereka juga mengenal paham-paham kebebasan (*liberti*), kesetaraan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*) sebagaimana terdapat dalam *kredo* Revolusi Perancis. Pendidikan itulah yang menyebabkan mereka mempunyai wawasan dan pola pikir yang lebih maju dibanding dengan kebanyakan masyarakat awam, sehingga lebih memiliki kesadaran akan rasa kebangsaan yang mereka tuangkan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, baik melalui tulisan, mengajar, maupun sebagai pengurus organisasi pergerakan.

Perjuangan kedua elite itu disokong pedagang (pedagang ekspor impor, antar pulau dan antar kota di Kalimantan Selatan) sebagai pelopor pergerakan. Karena peker-

jaannya memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan dan hubungan dengan dunia luar dan melihat kemajuan pergerakan di daerah lain, sehingga ketika kembali ke kampung halaman turut menjadi pelopor atau penggerak organisasi pergerakan. Diantara pedagang yang menjadi pelopor pergerakan dapat disebut nama oleh H.M. Arip (H. Matarip atau H. Muhammad Arip Bakumpai)³⁷ seorang pedagang asal Marabahan yang berdagang antar pulau antara Jawa dengan Kalimantan. Ia adalah pembawa organisasi Sarekat Islam ke Kalimantan Selatan. Sewaktu di Surabaya, H.M. Arip turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya. Atas saran *Vorzitter Central Sarekat Islam*, OS Cokroaminoto agar mendirikan cabang SI di Kalimantan, maka H.M. Arip bersama rekan-rekannya seperti Sosrokardono, mereka mendirikan SI di Banjarmasin dan beberapa kota di Kalimantan Selatan.

Berdirinya organisasi Muhammadiyah di Alabio juga dipelopori pedagang bernama H. Usman Amin. Beliau ketika berada di Surabaya dan Yogyakarta sangat terkesan dengan perkembangan Muhammadiyah. H. Usman Amin kemudian yang mengusulkan kepada tokoh ulama H. Japeri di Alabio untuk mendirikan Muhammadiyah di Alabio.

Para pedagang sangat berperan dalam menyebarluaskan kegiatan tokoh-tokoh organisasi pergerakan. Mereka adalah pedagang yang karena tuntutan profesinya, sudah tentu acapkali milir mudik Banjar-Hulu Sungai. Sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam sebulan. Karena itulah organisasi yang sebelumnya hanya ada di Banjarmasin, berkembang dengan cepat ke daerah lainnya, karena adanya peran para pedagang yang juga aktivis pergerakan.

Peran ketiga pelopor ini diperkuat pula dengan kedatangan kaum terpelajar dari luar daerah. Utamanya Jawa

37 Pada keterangan foto koleksi Kamaludin (anak H.M. Arip) bertanggal 20 November 1939 di Marabahan dan salinan Ma'loemat National Borneo Conferentie tertulis H.M. Arip, bukan H.M. Arif.

dan Sumatera yang membawa unsur pergerakan kebangsaan ke daerah ini, seperti Maraja Sayuthi Lubis, Maisyir Thaib, Bey Arifin, dr. Sumarno, dr. Susilo (adik dr. Sutomo), dr. Suranto, dr. Sosodoro Jatikusomo, Mr. Rusbandi, Johannes Baker, Aidan Sinaga, dr. D.S. Diapari, Marjono, Sunaryo, dan sebagainya.

Kembali Sjarifuddin menyatakan bahwa para pelopor pergerakan kebangsaan itu lahir dari tiga bentuk pendidikan yakni: (1) Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda; (2) Sekolah-sekolah Partikelir; (3) Sekolah-sekolah Agama.³⁸ Sekolah Agama di Kalimantan Selatan dapat dikatakan sebagai bagian Sekolah Kaum Pergerakan, karena selain mengajarkan agama Islam, juga menanamkan kesadaran berbangsa kepada anak didiknya, dan terbukti penyelenggara pendidikan ini yakni *tuan guru* maupun alumninya banyak menjadi pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

2.4 Hubungan Antar Elite

Begitulah sejarah mencatat, ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, telah terjadi kontak antar suku bangsa di Kalimantan Selatan. Kontak tersebut melalui diaspora berupa *madam* dan *tajun* dan perdagangan antar pulau. Banyak tokoh-tokoh pergerakan dari daerah lain di Nusantara (Jawa, Sumatera, Maluku, Flores) yang berkunjung untuk melakukan pertemuan dan rapat-rapat umum. Tokoh nasional seperti adalah H.O.S Cokroaminoto (Sarekat Islam), Ki Hajar Dewantara (Perguruan Taman Siswa), Muhammad Husni Thamrin, R. Sukarjo Wiryopranoto, R. Sunyoto (Parindra/anggota Volksraad), dr. A.K. Gani (Gerindo) pernah berkunjung ke Kalimantan Selatan.³⁹

38 Sjarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 280-285.

39 Lihat Hadhariyah M, "Periode-periode Perjuangan di Indonesia yang Saya Alami", (Banjarmasin: naskah ketikan, 1981), hlm. 8; Achmad Darmawie, "Detik-Detik Perjuangan Kemerdekaan di Banjarmasin Kalimantan Selatan", (Banjarmasin: naskah ketikan, 1981), hlm. 6.

Tokoh lainnya seperti A.M. Sangaji,⁴⁰ dr. Sumarno, dr. Suranto, Mr. Rusbandi, Raden Imam Subekti, Johanes Baker, dan Adi Martono, pernah menjadi tokoh pergerakan partai atau menjadi guru-guru sekolah kebangsaan dan perguruan Islam di Kalimantan Selatan. Sebaliknya, banyak orang-orang Banjar asal Kalimantan Selatan yang karena pendidikan dan profesinya sebagai pedagang sering melakukan aktivitas pulang pergi Jawa-Sumatera-Sulawesi sehingga ketika kembali ke Kalimantan Selatan mereka turut menyebarkan benih-benih kebangsaan seperti H. Matarip (H. Muhammad Arip Bakumpai), Babu (Housman Babu), Bondan (Amir Hasan Bondan), Horman (Mohammad Horman alias Ajun Horman), juga Anang



Gambar 5 Kunjungan Mohammad Husni Thamrin dan Sukarjo Wiryopranoto dari Pengurus Besar Parindra ke Kandangan, tahun 1938.

(Sumber: dok. keluarga Achmad Darmawie).

40 Lihat Mohammad Nawawie Arief, "Sepak Terjang Haji Mohammad Nawawie Arief Dalam Perjuangan", (Banjarmasin: naskah ketikan, 1981).

Acil (Jaksa Anang Acil Kusuma Wiranagara), dan Merah Johansyah.⁴¹

Selain itu, ada beberapa tokoh perlawanan yang dibuang atau dipenjarakan di luar Kalimantan Sekatan seperti Pangeran Hidayatullah (tokoh Perang Banjar) beserta pengikutnya yang dibuang ke Cianjur (Jawa Barat). Kemudian tokoh pergerakan seperti H. Ahmad Barmawi Thaib (tokoh Parindra cabang Kandangan), H. Murhan dan Abdul Hamidhan (tokoh Parindra Amuntai) yang menjalani kerja paksa di Penjara Ampah,⁴² H. Amir dan Edwar Sandan (tokoh Parindra cabang Amuntai) yang dikirim ke penjara Sukamiskin, Jawa Barat.⁴³ Selanjutnya tokoh pers A.A. Hamidhan yang dipenjarakan di penjara Cipinang, dan banyak lagi yang lainnya, dengan sendirinya melalui interaksi dengan tokoh dan masyarakat setempat menjadikan ikatan solidaritas dan semangat kebangsaan antar suku bangsa menjadi semakin menguat. Halnya ini yang mendasari munculnya perasaan senasib dan tujuan yang sama untuk meraih kemerdekaan.

Pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan dimulai dengan nasionalisme Islam. Pada mulanya corak keislaman terlihat pada kegiatan *sinoman-sinoman* yang umumnya bernafaskan Islam. Pada perkembangan selanjutnya tercermin pada organisasi yang mengarah kepada kebangsaan. Beberapa diantaranya Sarekat Islam, Barisan Indonesia (Bindo), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Musyawaratutthalibin, dan diikuti Partai Nasional Indonesia (PNI), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru/PNI Pendidikan), Partai Indonesia Raya (Parindra),

41 Wajidi, "Membangun Perekat ke-Indonesia-an Melalui Lawatan Sejarah di Kalimantan Selatan". Jurnal Jnana Budaya BPNB Bali, NTB dan NTT, Vol. 21, No. 2 Agustus 2016, hlm. 179.

42 Lihat Hamidhan, "Riwayat Hidup/Riwayat Perjuangan Hamidhan-Juhri", (Haruai: naskah ketikan., 1981).

43 Lihat Aam Niu, "Kisah-kisah Perjuangan Heroik, Edwar Sandan Meninggal di Penjara Sukamiskin", dalam Dinamika Berita, 24 November 1984.

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Perguruan Taman Siswa yang juga mendapat simpati dari masyarakat Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, umat Islam sebagai mayoritas pemeluk agama di Kalimantan Selatan sangat berperan sebagai pendorong tumbuhnya pergerakan nasional di daerah ini.

Islam dan nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan merupakan kesatuan erat yang saling mengisi. Menurut Purwanto, nasionalisme tidak identik dengan perlawanan terhadap penjajah, namun ia sebuah kerja keras untuk bisa bangkit dari keterbelakangan.⁴⁴ Nasionalisme Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang baik itu politik, sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan dan budaya. Nasionalisme Islam juga memiliki visi memajukan umat agar terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Beberapa penulis seperti Sjamsuddin,⁴⁵ Sjarifuddin,⁴⁶ M. Idwar Saleh,⁴⁷ Alex A. Koroh,⁴⁸ Wajidi,⁴⁹ dan Syaharuddin⁵⁰ mengemukakan bahwa pendidikan Islam berperan penting dalam kebangkitan nasional di Kalimantan Selatan, dan sesungguhnya nasionalisme yang berkembang di Kalimantan Selatan sebelum tahun 1930

44 Lihat kembali Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*, (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 153-155. Lihat juga Syaharuddin, *Orang Banjar Menjadi Indonesia*, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2009), hlm. 15.

45 Sjamsuddin "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah Fkg Unlam, 1970).

46 Sjarifuddin, *Loc.cit*

47 M. Idwar Saleh *et al.*, *Sejarah Daerah Tematis... Loc.cit.*

48 Alex A. Koroh *et al.*, "Mengenal Pertumbuhan dan Perkembangan Nasionalisme di Kalimantan Selatan Selama Tiga Dasawarsa 1912 – 1942", (Banjarmasin: Laporan Penelitian FKIP Unlam, 1994).

49 Wajidi, *Nasionalisme ... Loc.cit.*

50 Syaharuddin, *Loc.cit.*

adalah nasionalisme Islam, dan setelah itu baru berkembang menjadi nasionalisme Indonesia.

Melihat kontribusi Islam yang besar di awal pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan, maka benar dengan apa yang telah dikatakan Dr. Danudirja Setiabudi (Ernest Douwes Dekker 1879-1950) pejuang, pahlawan nasional, dan salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia dalam ceramahnya di Yogyakarta pernah mengatakan: *“Jika tidak karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti yang diperlihatkan oleh sejarah bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.”*⁵¹

Sejalan dengan perkembangan pergerakan kebangsaan setelah berlangsungnya Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maka beberapa organisasi kepemudaan lokal berwatak kedae-
rahan di Kalimantan Selatan mulai mengembangkan diri ke arah kebangsaan. Hanya dalam hitungan dua dekade, semangat kebangsaan Indonesia mencapai kematangannya. Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, tidak hanya dihadiri para pemuda dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku, karena ternyata juga dihadiri pemuda Kalimantan. Sebagaimana ditulis Achmad Darmawie⁵² dan Anggraini Antemas,⁵³ juga turut hadir dalam peristiwa bersejarah itu yakni Masri dan George Obus. Hanya saja tidak diketahui apakah kehadiran mereka selaku pribadi ataukah mewakili organisasi kepemudaan di Kalimantan. Yang jelas pemuda Kalimantan menghadiri peristiwa Sumpah Pemuda itu, dan yang terpenting kemudian

51 Barjie, Ahmad, *Kesultanan Banjar dan Teori Receptio in Complexu*. [Online]. Tersedia: <http://kesultananbanjar.com/id/?p=1370>. [13 November 2017].

52 Achmad Darmawie, “Detik-Detik Perjuangan Kemerdekaan di Banjarmasin Kalimantan Selatan, (Banjarmasin: naskah ketikan, 1981).

53 Anggraini Antemas, *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan*, (Amuntai: Mega Sapura, 1988).

adalah bahwa kabar yang mereka bawa dari Kongres Pemuda memberikan pengaruh terhadap perkembangan pergerakan pemuda di Kalimantan Selatan.



Gambar 6 Parindra Cabang Banjarmasin dan Pemuda Surya Wirawan, 3 April 1938.

(Sumber: dok. Achmad Darmawie/Yurliani Johansyah)

Sejalan dengan perkembangan pergerakan kebangsaan yang terjadi setelah berlangsungnya Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda, maka beberapa organisasi kepemudaan lokal yang berwatak kedaerahan di Kalimantan Selatan mulai mengembangkan diri ke arah kebangsaan. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan hanya dapat diraih melalui persatuan dan kebangsaan. Sumpah Pemuda telah mendorong Sarekat Kalimantan menjadi Barisan Indonesia (Bindo), Persatuan Sopir menjadi *Bond Indonesische Chauffeur* (BIC), Sarekat Islam menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Ada pula terdapat beberapa organisasi lainnya tetap dengan nama yang bercorak kedaerahan dan keagamaan, seperti Partai Ekonomi Kalimantan (PEK), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratutthalibin, dan aktivitasnya tidak dapat dipandang

remeh karena kerap kali berlawanan dengan kebijakan pemerintah kolonial.

3.1 Sarekat Islam

Sarekat Islam disingkat SI,¹ berdiri di Banjarmasin pada tahun 1912 sebagai cabang dari induknya di Pulau Jawa. Dibawa ke Kalimantan Selatan oleh H. M. Arip (H. Matarip atau H. Muhammad Arip Bakumpai) seorang pedagang kelahiran Bakumpai (Marabahan) yang pulang pergi Banjarmasin – Surabaya.² Ketika berada di Surabaya, H.M. Arip turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya. Atas saran ketua SI OS Cokroaminoto aktivitas pergerakannya pindah ke Banjarmasin sebagai Komisaris SI untuk daerah Kalimantan Selatan. Bersama-sama rekan-rekannya seperti Sosrokardono, maka berdirilah SI di Banjarmasin dan beberapa kota di Kalimantan Selatan.

Selain faktor kedekatan dalam aspek geografi dan ekonomi dengan Pulau Jawa, maka aspek agama juga sangat

1 Pada mulanya bernama SDI yang didirikan H. Samanhudi di Solo tahun 1911. Berdasarkan akte notaris tanggal 10 September 1912, SDI berubah menjadi SI. Menurut W. Poespoprodjo, *Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926 Terbentuknya Suatu Pola*, CV. Dewadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 42, perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi ke dalam empat phase yakni periode 1912-1916 sebagai masa pembentukan, periode 1916-1921 masa jaya, 1921-1927 masa konsolidasi, 1927-1942 masa mempertahankan eksistensi. Pada hakikatnya SI lahir guna menghadapi persaingan dagang melawan pedagang-pedagang Cina.

2 Sjamsuddin, "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1970). hlm. 22.

mendukung berkembangnya SI di Kalimantan Selatan. Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan adalah penganut Agama Islam yang sangat tertarik dengan cita-cita dan perjuangan SI. Sebagaimana ditinjau dari anggaran dasarnya yakni mengembangkan jiwa berdagang; memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesukaran. Kemudian memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat derajat bumiputera; menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam. Aktivitas SI benar-benar mampu mengambil hati rakyat banyak yang beragama Islam, mulai dari golongan tani, buruh, pedagang, sampai kepada golongan intelektual dengan berbagai kepentingan.

Meski SI telah didirikan, tidak mudah bagi pegurusnya untuk merealisasikan program kerjanya. Karena pengakuan berbadan hukum (*rechtspersoon*) oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai SI lokal baru diberikan pada tanggal 30 September 1914 melalui Beslit (*Besluit*) Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 33 kepada SI cabang Banjarmasin. Sejak itu, mulailah Sarekat Islam dapat bergerak lebih leluasa dalam mengambil langkah-langkah perjuangan di bidang perekonomian, sosial dan pendidikan dan keagamaan.³

Berbeda dengan perjuangan di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan yang relatif berhasil, maka perjuangan SI di bidang perekonomian di awal-awal pergerakannya kurang menunjukkan hasil yang berarti. Karena pada mulanya SI didirikan dengan tujuan mematahkan perdagangan yang dikuasai Cina, maka tak mengherankan perkembangan SI menguatirkan orang-orang Cina.⁴ Setelah didirikan pada tahun 1912 SI telah mendirikan Sarekat Dagang dan Sarekat Pelayaran sebagai upaya untuk memperlancar transportasi sungai yang merupakan jalur perdagangan penting di Kalimantan Selatan, namun agaknya usaha-usaha itu tidak mampu melawan monopoli per-

3 Sjamsuddin, *Ibid.*, hlm. 25.

4 Arsip Nasional Republik Indonesia, *Sarekat Islam Lokal*, (Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 7, 1975), hlm. IX.

dagangan yang telah lama dikuasai orang-orang Cina yang telah lama mendapat perlakuan istimewa yang diterimanya dari pemerintah, di samping eksploitasi pemerintah kolonial sendiri di bidang ekonomi.

Kegagalan SI di bidang ekonomi membawa pengaruh buruk terhadap organisasi, dimana pengurusnya tidak lagi mempunyai kekompakan kerja dan dengan sendirinya inisiatif organisasi sangat menurun, sehingga tahun 1920 organisasi SI Banjarmasin nyaris beku tanpa kegiatan.

Kedatangan HOS Cokroaminoto ke Banjarmasin tahun 1919 kemungkinan sekali erat hubungannya dengan kemunduran SI di daerah ini. Dimana setelah itu, pengurus Centraal Sarekat Islam (CSI) mengirim seorang propagandis muda yang terpelajar, cakap, berani dan dinamis bernama Maraja Sayuthi Lubis. Dalam melaksanakan tugasnya di daerah ini, Sayuthi Lubis telah memahami bahwa satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkan SI dari kehancuran adalah dengan melakukan reorganisasi diantaranya mengganti pengurus lama dengan pengurus baru. Maka dibantu oleh Mohammad Horman ---kelahiran Marabahan---, Maraja Sayuthi Lubis pada tahun 1922 berhasil menyusun pengurus baru SI Banjarmasin.

Sebagai bagian dari reorganisasi, maka dibentuklah beberapa departemen seperti Departemen Perburuhan, Pertanian, Urusan Nelayan, dan sebagainya. SI juga menerbitkan surat kabar dengan nama "Keadaan Zaman" yang dicetak sendiri di Banjarmasin, maupun "Borneo Bergerak" yang dicetak di Surabaya.

Antara tahun 1922 sampai 1930 usaha SI di bidang ekonomi semakin meningkat dan diperluas bukan hanya untuk kepentingan anggota tetapi juga untuk kepentingan seluruh rakyat yang banyak menanggung beban penjajahan. Ini erat kaitannya dengan cita-cita nasionalisme.



Gambar 7 Bestuur (Pengurus) Sarekat Islam Cabang Banjarmasin, 1920.

Kanan ke kiri, Mohammad Horman (urutan ke-2), Saleh Bal'ala (urutan ke-4), dan Maraja Sayuthi Lubis (di kursi).
(Sumber: dok. H. Anang Ahmad Nawier)

Upaya SI itu terlihat ketika mengeluarkan Mosi Kongres sebagai hasil Kongres SI di Banjarmasin pada tanggal 14 s.d. 16 April 1923 di gedung Cahaya Tatas. Sarekat Islam melalui Maraja Sayuthi Lubis selaku (W.G) Voorzitter Congres SI Banjarmasin, memberi kuasa kepada Housman Baboe, Presiden Perserikatan Dayak atau Pakat Dayak yang turut diundang dalam kongres untuk menyampaikan mosi tersebut kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Majelis *Volksraad* di Buitenzorg, Bogor, untuk menyampaikan segala keberatan-keberatan dan permohonan rakyat Borneo.

Teks lengkap Mosi hasil Kongres Sarekat Islam di Banjarmasin, berbunyi sebagai berikut:

MOTIE CONGRES.

Keberatan² dan permohonan raajat pendoedoek Borneo Selatan dan Timoer, dengan perantaraan Congres S.I. di Bandjermasin tl.14/15 tanggal 15 dan 15/16 April 1923 telah menerima baik dan mengambil kepoetoesan serta memilih Housman Baboe President Perserikatan Dajak, dioetoes mengadap Audentie oentoek menjampaiakan segala keberatan² dan permohonan raajat Borneo seperti berikut :

GEMEENTE RAAD.

1. Moohon Gemeente Raad Bandjermasin ditiadakan, terhadap setoedjoenja fihak gooloongan pendoedoek Kota Bandjermasin dari bangsa Europa, Tionghoa, Arab dan Boemipoetera sendiri.
2. Moohon djika Gemeente Raad ta' dapat ditiadakan, mohon soepaja penghematan ongkost diperhatikan soenggoeh².
3. Moohon soepaja pemoengoetan jang tidak lajak, dihapoeskan dan lain² pemoengoetan disoesoetkan oempamanja: 10% opzenten sedang Gouvernement memoengoet 30% dari padjak inkomsten. Poengoetan diloear pendjoealan diloear orf passer dan lain², jang tidak lajak, poengoetan wang pompa pada kampoeng² jang djaoeh pompa ta' dapat menjampaiakan kewa-djibannja apabila perloe minta dihapoeskan.
4. Poengoetan oeang penning sepeda, permisjie mandiri roemah, gedong, toko, enz. padjak harta benda dalam roemah, wang poengoetan Passer dan ll. Mohon disoesoetkan.
5. Moohon soepaja tidak perbedaan perbaikan djalanan dan djembatan diantara Kampoeng Europa dan anak Boemi, seperti sekarang beberapa djalanan jang roesak di Kampoeng Boemipoetera beloem diperbaiki dan soe-

dah lama ditinggalkan roesak begitoe, berbahaja bagi perdjalananan orang dan anak2 jang pergi kesekolah.

6. Moohon soepaja diadakan Raad Commiesjie. Sementara oentoek menentoekan berapa % ketentoean poengoetan, dan jang dihapoeskan, terdiri dari seorang satoe lid pada fihak golongan bangsa jang berpendoedoek di Bandjermasin dikepalai oleh Voorzitter Gemeente. Lid Raad Commisjie itoe hendaknja dipilih oleh masing2 bangsanja sendiri.
7. Moohon soepaja anak negeri dapat keloewasan memilih sendiri Lid Gemeente Raad jang terdiri dari bangsanja, tertimbang kebanyakan pendoedoek dan bangsa dengan kebanyakan lid Gemeente.
8. Moohon soepaja Voorzitter Gemeente, seberapa boleh terpilih dari fihak Burger, sehingga karena itoe pengawasan ada difihak pemerintah.
9. Moohon Openbaar Vegadering loewar bijasa dari Gemeente, pendoedoek dioendangkan dan dengan tempo jang lampooo, serta Vegadering di oemoemkan memakai bahasa Melajoe.

RAAD DESSA.

Keberatan dari Afdeeling Oeloe Soengai dari Onderafdoeling: Kandangan, Rantau, Tandjoeng, tentang poengoetan Raad Dessa, djika tak dapat dihapoeskan, moohon soepaja dihapoeskan atoeran itoe:

1. Poengoetan f.l,- (satoe roepijah) tiap2 matjam keramajan pesta kawin,karena permisjie pesta kawin soedah dipoengoet djoega f.0,50; dari wang penghoeloe (Nikah) f.2,65 (doea roepijah enam poeloeh cent) djoega dibajar.
2. Poengoetan menembak at. pasang mertjon f.0,25, waktu beranak, karena beranak dibajar djoega f.0,25.
3. Poengoetan membantai hewan f.1.- karena fihak Gouvernemen soedah memoengoet djoega dari f.3,- naik f.6.-

4. Poengoetan membongkar dan memperbaiki roemah karena permisjje sendiri, roemah soedah dibajar djoega terdahoeloe.
5. Poengoetan pekerdjaan kematian karena oeang raport mati soedah dibajar djoega.
6. Poengoetan pekerdjaan Maoeloed Nabi s.a.w. karena menoe Agama Islam.
7. Poengoetan 1% dari djoeal-beli roemah, sawah, atawa kebon.
8. Poengoetan 1% dari djoemlah modal pendirian roemah, tjokoep dengan pembajaran permisjje sendiri dari roemah itoe.⁵

Jika dicermati, maka melalui mosi kongres itu, SI menuntut perlakuan yang sama sebagaimana diberikan Pemerintah Hindia Belanda terhadap golongan Eropa, Timur Asing. Tuntutan terpenting dalam mosi kongres itu antara lain meliputi: (a) Menuntut pemerintah supaya tidak membedakan dalam memperbaiki jalanan maupun jembatan antara kampung orang Eropa dengan kampung Bumi-putera, sebab selama ini yang mendapat perbaikan hanyalah jalanan kampung-kampung orang Eropa saja; (b) Menuntut pemerintah supaya memberikan perlakuan yang sama terhadap macam hukuman atau status terhukum dari penganjur-penganjur pergerakan rakyat, dengan macam hukuman dan status terhukum yang dikenakan kepada kaum bangsawan atau kepada bangsa-bangsa Eropa lainnya; (c) Menuntut pemerintah supaya guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal dan kaum dibebaskan dari

5 Dikutip dari salinan surat Ma'loemat National Borneo Conferentie, tanggal 17 Februari 1924 dalam Sjamsuddin "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1970. Kumpulan surat SI disalin sesuai dengan aslinya oleh Sjamsuddin, dan diketahui dan dibenarkan oleh Mohammad Imansjah, Sekretaris Pribadi Presiden SI Banjarmasin Periode 1922.

kewajiban menjalankan *Ordonnantie Heeren Dienst* yang menyangkut *erakan* atau kerja rodi, seperti kebebasan yang diberikan kepada guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending.⁶

Dengan mosi kongres, SI berusaha memperbaiki ekonomi rakyat dengan melawan adanya “*economische uitbuiting*” (pengurasan ekonomi) antara lain dalam bentuk pungutan pajak yang besarnya tidak sebanding penghasilan rakyat. Taksiran pajak dikenakan berlapis-lapis dan dipungut oleh Gemeenteraad Bandjermasin, oleh *Desaraad* di bagian Afdeling Hulu Sungai serta pajak-pajak yang dipungut Kas Negeri di pasar. Dalam urusan *economische uitbuiting* itu, tuntutan SI berkaitan dengan perubahan sistem pajak, seperti: (a) *Inkomstenbelasting* (pajak penghasilan): dalam hal ini SI meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan atau meringankan pungutan 30% Opcenten yang terasa berat bagi rakyat, juga terhadap 10% Opcenten Gemeenteraad. Selain itu juga memperjuangkannya adanya *Lid Commissie Aanslag* yang dipilih dari orang-orang kampung yang lebih mengetahui peri kehidupan di kampung, sehingga besarnya pajak dapat ditentukan sesuai kemampuan rakyat; (b) *Bea Invoerrecht* (bea impor) dan *Slachtbelasting* (pajak jagal/penyembelihan): SI mengharapkan kepada pemerintah agar *Bea Invoerrecht* 8 % dari tanaman rotan dihapuskan karena tanaman ini sudah dikenakan pajak pendapatan. SI juga menuntut dikembalikannya uang *slachtbelasting* yang telah dipungut pemerintah secara tidak sah. Permohonan ini terutama datang dari Tanah Dayak dan Kuala Kapuas; (c) *Landrente*: untuk hal ini SI memperjuangkan agar ladang-ladang yang memberi hasil saja yang dipungut pajaknya, sedang ladang yang rusak atau tidak memberi hasil tidak usah dipungut pajaknya; (d) Pungutan uang yang dibawa pergi haji. SI menyampaikan aspirasi rakyat Hulu Sungai yang menentang adanya pungutan sebesar 2% dari uang yang dibawa pergi haji.

6 Sjamsuddin, *Ibid.*, hlm 67.

Pungutan itu dianggap tidak sah, sebab tidak jelas digolongkan ke dalam pajak apa.⁷

Selain itu, SI Marabahan melalui kongres mengharap bantuan pemerintah untuk ikut serta memajukan pertanian rakyat. Sementara rakyat Muara Teweh dan Dusun Tengah merasa keberatan dengan dibukanya tambang batu bara di daerah itu oleh perusahaan asing, karena dikuatirkan mematikan usaha pertambangan rakyat, di samping pembukaan tambang tersebut akan merusak tanaman rakyat.

Dalam bidang pendidikan, sikap SI jelas sekali yakni memajukan pengajaran untuk meningkatkan derajat bumi-putera. Selain mendirikan sekolah agama, SI juga mendirikan sekolah swasta yakni *Particuliere Hollands Inlandse School* (PHIS) atau HIS Swasta. Diantaranya di Pasar Lama Banjarmasin dan di Marabahan yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Taman Siswa. SI juga memperjuangkan kepada pemerintah agar mendirikan sekolah-sekolah bagi anak perempuan dan kepada sekolah-sekolah Islam agar diberikan subsidi.

Keberhasilan perjuangan SI di berbagai bidang, menjadikan SI semakin berkembang. Ditambah faktor bahwa SI adalah organisasi berdasarkan agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Kalimantan Selatan, maka organisasi ini dapat dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Melalui peranan ulama dan guru-guru agama yang merupakan pemimpin informal dan memahami suasana kebatinan masyarakat saat itu, tidaklah sulit untuk menarik massa untuk berpartisipasi dalam perjuangan SI.

Penghimpunan potensi SI lokal dan organisasi-organisasi di luar SI lainnya maka pada tanggal 17 Februari 1924 para pimpinan SI dan utusan-utusan lokal-lokal SI di *Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo* memutuskan mendirikan subkomite. Tujuan pembentukan NBC atau National Borneo Conferentie yang mereka artikan

7 Sjamsuddin, *Ibid.*, hlm. 63-64.

sebagai “tempat permusyawaratan persatuan bangsa kita rakyat Borneo” untuk menunjang kemajuan Borneo.

Mereka menetapkan pelaksanaan NBC pada tanggal 30-31 Maret 1924 bertempat di gedung Cahaja Tatas Banjarmasin. Seterusnya dilaksanakan di kota-kota seperti Samarinda, Kandangan, atau lain-lain tempat di pulau Borneo dengan peserta semua wakil-wakil SI lokal di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo serta wakil-wakil Perserikatan Dayak, karena saat itu hanya ada dua golongan pergerakan yang dianggap mewakili rakyat Borneo. Berikut isi Maklumat Konferensi Nasional Borneo.

NATIONAL BORNEO CONFERENCE MA'LOEMAT.

Salam dan bahagia!

Apabila memperhatikan dengan soenggoeh2 segala kedjadian pada beberapa tahoen jang acher2 ini, terkenanglah kita dengan pergerakan ra'jat di tanah Hindia Nederland sangat lemah dan tambah hari tambah poela alam pergerakan ra'jat djadjahan ber-petjah2an, hingga ter-bajang2 seakan2 berkobar di antara petjahan partij kita sama masing2 partij dalam pimpinan pergerakan ra'jat kita. Karena itoe pasti seseorang jani kita jang berprasaan manoesia, tjinta bangsa dan tjinta tanah ajer senantiasa tergoda dalam diri masing2 kita soeatoe pertanjaan:”

“Apakah djadinja kita ra'jat djika hal terseboet berlakoe teroes-meneroes? Djawapan tdak lain, hanja, roesak kita, roeboeh kita, lenjap kita dari peta Doenia kemanoesiaan”.

Meskipun pergerakan kita ra'jat Borneo dewasa ini tidak kejadian sematjam terseboet tetapi pada masa jang achir ini terbajang2 djoega alamat jang boleh menggoendjangkan pikiran kita, sehingga inilah terbit daja oepaja fihak kita S.I. Bandjarmasin dan Perserakatan Dajak, bermoesjawarat memboeat pendjagaan sekiranya tidak ketoe-laran bahaja jang amat sangat diatas diri masing2 partij kita

Borneo. Daja oepaja terseboet dapatlah dengan langsoeng pada hari minggu tt. 17 Februari 1924, Combinatie vergadering kepala2groep dan S.I. Bandjarmasin serta oetoesan local2 S.I. di Res.z.o. Afdoeling van Borneo. Soedah memoeskan pendirian Sub Comite oentoek pendirian National Borneo Conferentie (tempat permusjawaratan persatoean perasaan bangsa kita ra'jat Borneo).

Dipoatoeskan mendjadi Voorloopig Bestuur Comite Toean2 Housman Baboe Voorzitter.

Hadji Mohamad Arip Vico Voorzitter.

Mohamad Horman lc. Secretaris.

Dardjad 2c. Secretaris.

M. Abdoelkarim Peningmoester.

Loei Kanis Adviseur.

H.M. Jasin Adviseur.

Hasjim Commisaris Plverv. Voorzitter.

M. Amin Commisaris President S.I Koeala Kapoeas.

H.M. Hamid “ “ “ Marabahan.

M. Terang “ “ “ Moeara Teweï.

Oesoep “ “ “ Margasari.

H.M. Seman “ “ “ Kandangan.

H.M. Noor “ “ “ Kaloea.

H.M. Sabrie “ “ “ Samarinda.

Demang Sawaal Oetoesan S.I. Boentoek (Doesoen Barat).

P. Goentoeng Oetoesan S.I. Doesoen Timur.

H. Hassan President S.I. Kota Baroe.

Comite N.B.S. telah menetapkan pendirian N.B.C. berlakoe dan bermusjawarat terboek a oemoem memakai tempo doea malam lamanja ja'ni :

a. malam Minggoe tanggal 29 -30 Maart 1924 dari djam 8 hingga djam 12 Combinatie Vergadring Bestuur dan segala partij perserekatan Boemi poetra bertempat di Club Tjahaja Tatas.

b. Hari Minggoe tanggal 30 Mart 1924 dari djam 9 hingga djam 1 siang Openbaar-Vergadering menetapkan

Bestuur dan pemboekaan N.B.C. dan lain2 jang dirasa perloe bertempat di gedoeng Tjahaja Tatas.

c. Malam Senin tanggal 30/31 Maart 1924 djam 6 hingga 11 Openbaar Vergadering: menerima dan membitjarakan sekalian voorstel2 jang diperserahn dan diboeka oemoem oleh masing2 partij perhimpoean dan dari siapa djoeapoen bertempat di gedung Tjahaja Tatas.

Hari Senin tt. 31 Maart 1924 dari djam 9 hingga djam 1 siang Openbaar Vergering berhoehoengan dngan pembitjaraan voorstel2 serta bermusjawarat menetapkan kepoeatoesan2 dan do boeka oemoem.

Selain isi program dan Organisatie N.B.C. ini boleh dioebah dan ditambah apa jang dirasa perloe oleh permusjawaratan bersama.

MAKSOED.

N.B.C. bermaksoed mendjadi tempat permoesjawaratan dari sekalian ra'jat Borneo berdoedoek di kota bandjarmasin dalam karesidenan sebelah Selatan dan timoer poelau Borneo. Jang akan mengadakan permoesjawaratan besar (Conferentie) saban tahoen, dimana akan berhadir sekalian ra'jat dan pemimpin perkoempoelan ra'jat djadjahan dalam kepoelauan Borneo. Begitoe djoega akan di-terima pembitjara dalam Conferentie sekalian mereka jang memenjetoejoei dan hendak menoenjang kemajoean Borneo dan ra'jat dengan djalan jang patoet.

PROGRAM.

Jang akan dibitjarakan dan diichtiarkan:

1. Soepaja tiap orang ra'jat Borneo terbangoen nafsoenja akan mentjintai bangsa dan tanah airnja, tjita2 mana membawa bagi kita ra'jat mentjapai kemerdekaan Hindia bersama2 dengan djalan jang patoet.
2. Soepaja tiap2 orang ra'jat Borneo insjaf dan mengetahoei apa-apa jang berlakoe atas bangsa dan tanah airnja dan apa2 jang soedah dan jang akan terjadi oleh peredaran zaman.

3. Soepaja tiap ra'jat Borneo mengetahoei dan memoe-liakan kepada sekalian bangsa sendiri, jang telah banjak berboeat djasa dan kebadjikan kepada tanah airnja di zaman dahoeloe dan dimasa ini (diperingati).
4. Soepaja tiap2 orang ra'jat Borneo memoeliakan kepada sekalian perboeatan2, baik beroepa benda, baik beroepa atoeran dari bangsa sendiri dizaman dahoeloe dan seka-rang dengan menetjoealikan Igama.
5. Soepaja tiap2 ra'jat Borneo berichtiar dan bekerdja oentoek mentjapai kemajoean dan ketinggian seemarak bangsa dan tanah air kita Borneo dalam hal Onderwijs, penghidoepan, politiek, kesopanan, dan kemakmoeran bangsa Borneo.
6. Berichtiar bersama2 dengan djalan persatoean menoen-jang atas National Indische Congres jang akan diadakan kelak di Soerabaja.

ORGANITATIE

- a. Sebagaimana terseboet diatas maka Conferentie itoe akan dilakoekan saban tahoen, pertama kali didjadikan dalam kota Bandjarmain pada tanggal2 tsb, dan lain kali djikalau perloe akan diadakan dilain tempat dalam poelau Borneo ini oempamanja di Samarinda, Kan-dangan atawa lain2 tempat.
Sekoerang2nja ampat poeloeh hari, sebeloem Conferen-tie hendaklah anggowoeta N.B.C. mengibarkan circuliur dan program kepada sekalian Bestuur perkoempoelan ra'jat di Borneo, dan mengirimkan soerat oendangan kepada sekalian jang menjetoejoei kemadjuan ra'jat Borneo, soepaja mereka dapat bersedia2 dan bermufakat lebih dahoeloe dengan anggowoeta perkoempoelannja dan ra'jat dinegerinja apa2 jang akan dimajoekan dalam Conferentie tadi.
- b. Dengan djalan jang patoet dan tida meroesak ketertiban oemoem, Conferentie akan mempertahankan segala apa jang dikira meroesak, membahajai keamanan hidoep

ra'jat Borneo. Biaja Conferentie itoe hanja terdapat dari derma gooloongan perhimpoean di Borneo serta saudara2 dan teman2 jang soedi menjetoejoei maksoed kami ini. Oleh sebab jang terseboet diatas ini kami berharap soepaja sekalian Bestuur dari perkoempoelan ra'jat di Zuider on Oesterafdoeling van Borneo dan sekalian mereka jang menjetoejoei kemajoean ra'jat Borneo soedi poela mengambil tahoe dan soedilah kiranja datang menghadiri Conferentie.

“NATIONAL BORNEO CONFERENTIE”, pada tanggal 30t/m31 Maart 1924 dikota Bandjarmain, jang terseboeat diatas

.

Bandjarmasin, 17 Pebruari 1924.
Wassalam dan bahagia,
Vooloepig Sub Comite
National Borneo Conferentie
Voozitter Housman Baboe
Vice Voorzitter H.M. Arip
Secretaris M. Horman⁸.

Aktivitas SI yang sangat menonjol mengakibatkan SI memiliki cabang-cabang hampir di seluruh kota di Kalimantan Selatan, antara lain Martapura, Pleihari, Kotabaru, Kandangan, Rantau, Margasari, Negara, Amuntai, Marabahan, dan Barabai.

Cabang SI di Barabai berdiri pada tahun 1921 dengan ketuanya yang pertama Gusti Muhammad Arif dan Sekretarisnya Habib Alwy. Pada waktu peresmianya di Barabai langsung dihadiri pendiri Centraal Sarekat Islam (CSI) HOS Cokroaminoto dan Abi Kusno Cokrosoyoso, bertempat di gedung SI di jalan H. Hassan Basry sekarang.⁹ Pada

8 Dikutip dari salinan surat Ma'loemat National Borneo Conferentie, tanggal 17 Februari 1924 dalam skripsi Sjamsuddin, *Ibid*, lampiran.

9 Muderis Zaini dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Hulu Sungai*

beberapa kota yang memiliki cabang SI terdapat gedung yang biasanya juga digunakan untuk sekolah atau madrasah yang diorganisir oleh Sarekat Islam. Masyarakat menyebutnya “kalap” (*club*)¹⁰ yang menunjukkan besarnya dukungan rakyat pada masa itu.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya SI memobilisasi potensi kaum perempuan dengan jalan membentuk persekrikan Dunia Isteri pada tahun 1923 di Banjarmasin, diketuai Masiah. Pembentukan SI Dunia Isteri ini mendapat sokongan dari CSI di Jawa yang sebelumnya juga membentuk Sarekat Islam Wanodya Utomo, diketuai oleh R. Ayu Cokroaminoto, beralamat di Kedungjati, Surabaya. SI Dunia Isteri dapat dipandang sebagai organisasi kewanitaan yang tertua di Kalimantan Selatan. Meski bukan sebagai sebuah organisasi yang berdiri sendiri. SI Dunia Isteri turut menyokong pergerakan kaum perempuan, khususnya bagi para isteri yang suaminya menjadi tokoh dan anggota organisasi SI.

Sebagai organisasi massa yang berinduk di Jawa, berbagai perubahan yang terjadi pada SI Pusat seperti Pemogokan kaum buruh dan kereta api di Surabaya yang melibatkan anggota-anggota SI. Hal ini sedikit banyak turut memengaruhi perkembangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan.¹¹ Namun ketika terjadi pergulatan antara pendukung paham Islam dan pendukung paham Marxis sebagai alternatif dalam perjuangan. Ternyata golongan kiri yang dipengaruhi sosialis/marxisme (SI Merah) yang dimotori

Tengah, (Barabai: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 DHC Angkatan 45 Tingkat II HST, 1988), hlm. 98.

10 Gedung (*club*) SI di Sungai Mesa pernah dipakai sebagai Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah. Sebelumnya sebagai sekolah Madrasatul Islamiyah Al Wathaniyah.

11 Dikutip dari salinan Surat OS Cokroaminoto, Vorzitter Central Sarekat Islam kepada Mohammad Horman, Presiden Perhimpunan Sarekat Islam di Banjarmasin bertanggal Kedungjati 18 Mei 1923, dalam skripsi Sjamsuddin, *Op.cit.*, , lampiran.

Sarekat Rakyat tidak memperoleh pendukung di Kalimantan Selatan.

Meskipun dari anggaran dasarnya SI tidak berisikan politik, tetapi dari seluruh aksi perkumpulan itu dapat dilihat bahwa SI selalu dengan gigih berjuang menegakkan kebenaran, keadilan melawan penindasan dan segala macam diskriminasi dari *ambtenar-ambtenar* bumiputera dan Eropa. Apalagi dasar, tujuan dan ide-ide yang dibawa SI Islam sesuai keyakinan dan hati nurani rakyat yang dijajah. Semboyan mereka “berani karena benar, takut karena salah” selalu didengung-dengungkan anggotanya.¹²

Melihat kegiatan-kegiatan dan besarnya pengaruh SI di kalangan masyarakat menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda menaruh kecurigaan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan SI. Selain melarang kehadiran OS Cokroaminoto dan H. Agus Salim dalam *National Borneo Conferentie* juga melakukan penangkapan terhadap H. Hasan Basuni seorang eksponen penting dari SI cabang Amuntai karena didakwa melakukan aksi-aksi politik, sehingga terpaksa meringkuk delapan setengah bulan dalam penjara Amuntai. Kejadian semacam ini yang juga dialami oleh SI cabang lainnya di Kalimantan Selatan, menyebabkan kegiatan SI mengalami kemunduran.

Selain itu, kemunduran SI di bidang politik lebih disebabkan oleh ketidakmampuannya bersaing dengan organisasi-organisasi yang baru muncul yang secara progresif dan tegas memperjuangkan cita-cita politiknya. Diantaranya sebagai akibat dari pengaruh masuk dan berkembangnya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan yang turut berkiprah dalam bidang politik. Di samping banyaknya anggota-anggota SI yang merangkap jabatan dengan organisasi lain bahkan keluar dari

12 Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, (Fadjar, Banjarmasin, 1953), hlm. 83.

keanggotaan SI dan menjadi pendukung organisasi-organisasi muda yang lebih maju.¹³

3.2 Muhammadiyah

Muhammadiyah pertamakali didirikan di Jogjakarta pada 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923). Kapan dan dimana pertama kali Muhammadiyah muncul di Kalimantan Selatan belum dapat diketahui dengan jelas. Bila bertolak dari masuknya faham pembaharuan, maka proses ini telah berkembang sejak 1914 di Banjarmasin dengan didirikannya sekolah bernama *Arabische School* (kemudian menjadi *Islamsche School*) sebagai tempat penanaman faham pembaharuan oleh perkumpulan orang-orang keturunan Arab.

Sesudah *Islamsche School*, pada tahun 1916 didirikan lagi *Al Madrasatul Arabiah al Walaniah* di Seberang Masjid, dan *Diniyah School* di Sungai Kindaung pada tahun 1921. Sekolah-sekolah ini merupakan tempat persemaian pembaharuan Islam dan kebanyakan lulusannya menjadi simpatisan atau langsung menjadi anggota organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1921 tiba di Banjarmasin Syekh Ahmad Surkati bersama-sama dengan utusan Kerajaan Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Al Aticy. Mereka menjadi pendorong pengikut pembaharuan di Banjarmasin seperti Muhammad bin Thalib, H. Ahmad Amin (Alumni Al Irsyad), H. Masykur, dan Yasin Amin. Bahkan H. Ahmad Amin dan H. Masykur akhirnya mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah ke Pusat Pimpinan di Jogjakarta.

Pendorong pembaharuan di Banjarmasin bertambah ketika Maraja Sayuthi Lubis, utusan Centraal Sarekat Islam (CSI) datang ke Banjarmasin pada tahun 1921. Dengan

13 M. Idwar Saleh dkk., *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, Banjarmasin, 1978/1979), hlm. 42.

semangat dan keberaniannya terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pengikut faham Abduh. Akibatnya jumlah tokoh pembaharuan semakin besar diantaranya H. Abdul Karim Corong, bahkan Mohammad Horman, Presiden SI cenderung kepada faham pembaharuan ini.

Meskipun faham Muhammadiyah telah masuk ke Banjarmasin sekitar tahun 1920, namun akibat kondisi masyarakatnya dan kurangnya kemampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ditetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jogjakarta, maka Muhammadiyah lebih dahulu berdiri Alabio dan Kuala Kapuas daripada Banjarmasin.

Untuk daerah Martapura ajaran pembaharuan ini disampaikan oleh H. Muhammad Yusuf (Ustadz Haji Yusuf Jabal). Fatwa-fatwanya seirama dengan dengan faham-faham pembaharuan yang kemudian selaras dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah kemudian dapat berdiri pada tahun 1932 di Martapura berkat peranan H.M. Hasan Corong, seorang *Ajunct Jaksa* bersama dengan dua orang tokoh Arab, Abdullah bin Shif dan Ali Mubarak.

Cabang Muhammadiyah di Alabio berdiri tahun 1925 diketuai Haji Jaferi. Pendiriannya dipelopori seorang pedagang bernama H. Usman Amin yang ketika berada di Surabaya dan Yogyakarta sangat terkesan dengan perkembangan Muhammadiyah. Ketika pulang ke Alabio, H. Usman Amin mengusulkan kepada H. Japeri, seorang tokoh ulama yang berpandangan maju dan berpengaruh di Alabio untuk mendirikan Muhammadiyah. Beberapa waktu kemudian Muhammadiyah berdiri di Alabio yang kemudian disusul oleh daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan.¹⁴

14 Sejarah awal masuknya Muhammadiyah di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari peran , dkk, Sejarah Mdua orang tokohnya yakni H.M. Jaferi dan H. Usman Amin, lihat Sahriansyah, dkk., Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (1925-2007), (Banjarmasin: Antasari Pers, 2012), hlm. 9.

Tahun 1929 Muhammadiyah Alabio mengadakan Konperensi I yang dihadiri Pimpinan Pusat Muhammadiyah: A.R. Sutan Mansyur. Selesai konperensi beliau juga mengunjungi Muhammadiyah Kuala Kapuas dan Banjarmasin. Berdasarkan surat ketetapan, Muhammadiyah cabang Alabio mendapat pengakuan dari pengurus besar berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 253 tanggal 5 Maret 1930.

Sementara Muhammadiyah cabang Kuala Kapuas meski berdiri setelah Alabio, ternyata mendapat surat penetapan lebih dahulu yakni Surat Ketetapan No.128 bertanggal 1 Juli 1928, sedangkan Surat Ketetapan Muhammadiyah Banjarmasin Nomor 254 tertanggal 5 Maret 1930. Bermula dari Alabio inilah kemudian Muhammadiyah menyebar ke daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, seperti Sungai Tabukan, Jarang Kuantan, Hambuku Hulu, Kelua, Haruyan, Kandangan, Rantau dan Barabai.

Tujuan penting dari Muhammadiyah ialah memurnikan faham-faham agama Islam yang dianggapnya telah banyak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW dengan semboyan yang terkenal “kembali kepada Quran dan Hadits”. Karena tujuan memurnikan itulah yang menyebabkan Muhammadiyah pada mulanya mendapat tantangan hebat di kalangan penduduk. Meski kemudian akhirnya mendapatkan posisi penting di daerah ini karena kesungguhan para penganjurnya terutama berkat peranan eksponen intelektual muda Muhammadiyah yang dengan metode-metode dakwah tertentu telah berhasil menarik masyarakat Islam di kampung-kampung untuk menjadi pengikutnya.



Gambar 8 Tokoh-tokoh organisasi Muhammadiyah.
(Sumber: dok. H. Anang Ahmad Nawier)

Berkat prestasi yang dicapai Muhammadiyah di daerah ini, maka dilaksanakanlah Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin yang berlangsung dari tanggal 15 s.d. 22 Juli 1935 dihadiri oleh sekitar 400 orang peserta, dari

15 Ketua Muhammadiyah Cabang Alabio

16 Consul *Hoofd Bestuur* (Ketua M.P.M.) Daerah Kalimantan (1932-1936), wafat 8 Muhar-ram 1359/17 Februari 1940 di Malang

17 Consul *Hoofd Bestuur* (1936-1940) wafat 9 Rabiul Awwal 1359 (17 April 1940)

18 Consul *Hoofd Bestuur* Daerah Kalselteng dan Tim (1940-1957). Wafat 12 Ramadhan 1376/12 April 1957 di Martapura

19 Ketua Cabang Aisyiah Muhammadiyah di Banjarmasin

seluruh perwakilan Muhammadiyah dan Aisiyyah di Hindia Belanda.

Kehadiran organisasi Muhammadiyah memberikan pengaruh dalam lapangan pendidikan, keagamaan, maupun sosial. Selain dalam lapangan pendidikan, maka dalam lapangan keagamaan, sumbangan yang positif yang diberikan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan adalah gerakan pemurnian ajaran Islam dari TBC (Tahyul, Bid'ah dan Churafat) dalam segala bentuk baik menyangkut aqidah maupun syariah.

Muhammadiyah melakukan penelitian terhadap soal-soal ibadah. Segala amal perbuatan yang dipandang ibadah oleh masyarakat diteliti dan dicari sumber hukum dan dasarnya, mengingat pada saat itu dalam masyarakat Islam di daerah ini terdapat beberapa perbuatan yang dianggap ibadah, seperti pembacaan syair maulid, manakib Syekh Abdul Kadir Jailani dan sebagainya.

Muhammadiyah juga memelopori khotbah Jumat berbahasa Melayu, menterjemahkan Alqur'an, menyalin ayat Alqur'an dan Hadits dalam ejaan latin, serta menerbitkan buku-buku pelajaran agama beraksara latin. Selain itu, dilaksanakan pula sembahyang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang dan menganjurkan kaum wanitanya untuk ikut ke tanah lapang, dan melaksanakan takbiran sebagai upaya peningkatan syiar Islam.

Dalam lapangan sosial Muhammadiyah sangat menekankan amal-amal saleh, tidak hanya menyangkut kewajiban seperti sholat, puasa dan haji, tetapi juga ibadah sosial seperti mengintensifkan fungsi zakat, pendirian Panti Asuhan Anak Yatim seperti yang didirikan di Alabio pada tanggal 1 Mei 1938 yang diketuai oleh H. Usman Amin.

Lahirnya gerakan Muhammadiyah di bidang sosial, di sisi lain juga didorong oleh kegiatan misi dan zending Kristen yang mendirikan rumah sakit dan poliklinik Kristen di tengah orang-orang Islam. Oleh karena itu, pada tahun 1933 bertepatan pada hari Jumat oleh PKU Muhammadiyah

didirikanlah sebuah poliklinik di Banjarmasin dengan pelopornya Saleh Bal'ala, Ali Jagau, dan Bakri dengan dr. Sosodoro Jatikusomo sebagai dokternya²⁰ Poliklinik menempati sebuah bangunan rumah milik seorang Cina di jalan Emma Straat²¹ yang disewa Muhammadiyah.²²

3.3 Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama yang secara harfiah berarti “kebangunan para ulama” didirikan di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 dengan tujuan memajukan faham aliran tradisional, memelihara hubungan dengan para ulama dan pengikut keempat mazhab, memajukan pendidikan, masjid, dan kegiatan Lailatul Ijtima serta Tahlilan.

Lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama²³ tidak terlepas dari adanya perselisihan antara kaum tua dan kaum muda. Kaum yang disebut terakhir merupakan kaum pembaharuan pemurnian ajaran Islam yang berhimpun dalam organisasi Muhammadiyah. Perselisihan antara kaum muda dengan kaum tua diantaranya adalah menyangkut soal tahyul, khurafat dan beberapa praktik peribadatan yang dianggap Muhammadiyah sebagai bid'ah yaitu sesuatu yang menurut hukum Islam tidak sesuai dengan Alqur'an dan Hadits atau merupakan embel-embel tak berdasar.

20 Syarkawi Ruslan, “Perkembangan Reformisme Islam di Kalimantan Selatan serta Pengaruhnya Dalam Lapangan Agama, Sosial, dan Pendidikan dari Tahun 1914-1942”, (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1975), hlm.16.

21 Sekarang jalan Pangeran Samudera, tepatnya di sebuah bangunan dengan tanah yang sekarang ditempati bangunan Modern Optical sebagai halamannya.

22 Hasil wawancara dengan H. Anang Ahmad Nawier yang ketika itu sempat memanfaatkan jasa poliklinik tersebut sebagai tempat berkhitan dan ditangani langsung oleh dr. Sosodoro Djatikusomo

23 Yang dimaksud Nahdlatul Ulama di sini adalah Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah (Perhimpunan/Perkumpulan) yang keberadaannya sampai 1951. Setelah Muktamar Nahdlatul Ulama XIX di Palembang tahun 1952 status Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah berubah menjadi Partai Politik.

Perbedaan pemahaman atau masalah khilafiyah terutama menyangkut *furu* antar umat Islam semakin meluas karena masing-masing didukung dakwah-dakwah kaum muda yang dijawab dengan dakwah pula oleh kaum tua. Situasi ini tidak mendukung ke arah pertumbuhan dan persatuan umat muslim yang kuat, bahkan dimanfaatkan penjajah Belanda untuk menggoyahkan kedudukan organisasi-organisasi Islam dan mengokohkan penjajahan. Oleh karena itulah, disamping sebagai reaksi terhadap Muhammadiyah, maka kelahiran Nahdlatul Ulama juga dapat dipandang sebagai reaksi terhadap kemerosotan di dunia Islam akibat penjajahan. Dalam perkembangannya, Nahdlatul Ulama diidentikkan dengan organisasi kaum tua, karena melalui organisasi ini, selain bergerak memajukan pendidikan dan memakmurkan masjid, mereka juga tetap mempertahankan kegiatan *Lailatul Ijtima*²⁴ dan *Tahlilan*.

Nahdlatul Ulama berdiri di Martapura pada tahun 1927 diprakarsai oleh Haji Abdul Kadir yang kemudian dikenal dengan panggilan Tuan Guru Tuha. Ketika Nahdlatul Ulama berdiri di tahun 1926 di Surabaya, beliau masih belajar pada pesantren di Jombang dan sangat terpengaruh oleh kegiatan *Lailatul Ijtima* dan *Tahlilan*.

Nahdlatul Ulama di Martapura mendapat dukungan dari pimpinan Madrasah Darussalam, H. Kasyful Anwar. Selain dipinjami tempat sementara untuk berkantor, murid madrasah tersebut juga menjadi basis pendukung utama massa Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Madrasah yang semula dibangun oleh Sarekat Islam pada tahun 1914 dengan nama "*Madrasatul 'Imad Fie Ta'lilil Aulad "Darussalam"*" yang kemudian terkenal hanya dengan sebutan "*Darussalam*", berubah menjadi pondok pesantren binaan Nahdlatul

24 *Lailatul Ijtima* adalah malam berkumpul dan beramal. Dahulu sering dilaksanakan pada malam tanggal 13, 14, 15 dengan cara membaca amalan tertentu, berdoa bersama, dan menghadihkan pahalanya, khususnya kepada arwah keluarga yang baru meninggal dunia atau arwah kaum muslimin pada umumnya.

Ulama. Selain itu, masyarakat Martapura yang fanatik agama dan menjunjung kedudukan ulama tradisional segera mengikutinya, dan dari sinilah Nahdlatul Ulama berkembang dengan basis utama di daerah-daerah pedesaan. Pada masa berikutnya, Nahdlatul Ulama Martapura berkembang cukup pesat berkat dukungan tokoh-tokoh ulama yang mengajar di pesantren Darussalam Martapura khususnya alumni pesantren-pesantren di Jawa Timur.

Beberapa faktor pendukung mengapa kehadiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Martapura mendapat sambutan yang cukup hangat pada waktu itu. Pertama, paham *Ahlu Al Sunnah Wa Al-Jamaah* sudah berurat berkar dalam kehidupan masyarakat Banjar. Kedua, pendirinya adalah tokoh agama/ulama setempat yang cukup dikenal khususnya di Martapura. Ketiga, adanya dukungan dari para ulama. Karena ketiga faktor inilah, Nahdlatul Ulama bisa diterima oleh masyarakat dan berkembang dengan cepat di Martapura.²⁵ Pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Martapura kemudian disusul dengan berdirinya konsul²⁶ dan beberapa cabang Nahdlatul Ulama wilayah Kalimantan.

Jam'iyah Nahdlatul Ulama semakin berkembang pesat di Kalimantan Selatan, setelah terselenggaranya Mukhtar Nahdlatul Ulama XI di Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 1936. Mukhtar yang mengambil tempat di sebuah rumah bertingkat dua, persis di samping Langgar Al

25 Lihat Ahdi Makmur dkk., *Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2006), hlm. 16.

26 Konsul adalah nama perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat yang ada di daerah yang strukturnya terdiri dari ketua/pimpinan dengan beberapa orang staf. Setelah Mukhtar Nahdlatul Ulama XIX di Palembang pada bulan April 1952, Konsul berubah menjadi Majelis Konsul yang dalam susunan pengurusnya terdapat bagian-bagian. Perubahan Konsul menjadi Majelis Konsul berkaitan dengan perubahan status organisasi yang semula perserikatan keagamaan (Jam'iyah Nahdlatul Ulama) menjadi partai politik Nahdlatul Ulama

Hinduwan di tepian sungai Martapura, selain dibuka langsung pimpinan *Hoofd Bestuur* Nahdlatul Ulama (K.H. Wahab Hasbullah) juga dihadiri utusan-utusan Nahdlatul Ulama dari luar Kalimantan.

Muktamar itu menghasilkan beberapa keputusan diantaranya yang terpenting adalah penyampaian Mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda yang berisi penolakan dan permintaan pembatalan peraturan Kawin Bercatat (*Houwelijke Ordonnantie*). Pada tahun 1937, Nahdlatul Ulama, bersama Muhammadiyah, Musyawaratutthalibin, dan organisasi lainnya Musyawaratutthalibin bersama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya kembali mengeluarkan mosi menentang diberlakukannya peraturan Kawin Bercatat itu.

Pesatnya perkembangan Nahdlatul Ulama juga ditandai dengan semakin bertambahnya para anggota. Dalam kurun waktu sekitar 14 tahun atau sampai awal kedatangan tentara pendudukan Jepang di Indonesia (1942), jumlah anggotanya mencapai 2.000 orang. Hal ini diketahui berdasarkan laporan utusan Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan di Banjarmasin (1953). Akan tetapi, selama pendudukan Jepang, Jam'iyah Nahdlatul Ulama Cabang Martapura mengalami kemunduran, karena larangan dan sikap represifnya terhadap tokoh pergerakan kebangsaan.

Setelah Nahdlatul Ulama berdiri, maka perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan umat Islam bukan hanya antara kaum tua dengan kaum muda, tetapi juga antara organisasi ikutannya yakni Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Pada beberapa kasus, perbedaan pendapat itu telah menimbulkan perselisihan dalam keluarga, tidak bertegur sapa, perceraian, dan bahkan pertumpahan darah.

Hubungan Nahdlatul Ulama dengan organisasi lainnya bervariasi di beberapa cabang. Hubungan dengan Musyawaratutthalibin umumnya lebih baik dibanding dengan Muhammadiyah, karena faktor tujuan Musyawaratutthalibin yang menghendaki persatuan umat, disamping boleh-

nya keanggotaan rangkap yang membolehkan pengurus atau anggota Musyarawatutthalibin menjadi anggota Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Parindra, dan organisasi lainnya.

Pada umumnya pertentangan fisik antara anggota Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah pada persoalan khilafiyah banyak terjadi pada anggota yang dikategorikan buta huruf, awam, atau dangkal pemahamannya tentang ilmu agama Islam. Berbeda halnya dengan para ulama kedua organisasi, yang meski berbeda paham atau berdebat, mereka mampu menahan diri dan bahkan berusaha merajut kembali semangat persaudaraan umat yang terpecah belah. Sebagai contoh, H. Muhammad Yasin Amin, seorang ulama Muhammadiyah di Banjarmasin sering menghadiri pertemuan atau menyampaikan tablig yang diikuti warga Nahdlatul Ulama. Ketika diminta memimpin doa bersama, ia dengan senang hati memenuhinya.²⁷

Sesuai dengan cita-cita yang diembannya maka Nahdlatul Ulama bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Walaupun bukan suatu organisasi yang berdasarkan politik, namun Nahdlatul Ulama menjalankan sikap *non-cooperatif* terhadap setiap bantuan maupun ajakan Pemerintah Hindia Belanda untuk membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah maupun untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Bahkan melalui melalui sekolah atau madrasah yang diasuh ulama Nahdlatul Ulama ditanamkan rasa cinta tanah air dan kebencian terhadap penjajah Belanda.

Terhadap Pemerintah Hindia Belanda, Nahdlatul Ulama mengeluarkan mosi yang isinya agar bea pemotongan hewan buat aqiqah dan qurban dibebaskan. Selain itu, melalui Konferensi Umat Islam I wilayah Selatan dan Timur Kalimantan tanggal 24 s.d. 27 Juni 1938 di Kandangan, Nahdlatul Ulama bersama dengan Musyawaratutthalibin, Muhammadiyah, Assiratal Mustaqim, dan lain-lainnya mengeluarkan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar isi buku, gambar, majalah, dan pidato yang berisi

27 Hasil wawancara dengan K.H. Birhasani, Banjarmasin.

penghinaan terhadap Islam dilarang penyebarannya dan pengarangnya diadili atau dihukum.²⁸

Penentangan terhadap Pemerintah Hindia Belanda juga terjadi manakala Pemerintah melakukan kebijakan memobilisasi pemuda untuk memenuhi tambahan tenaga militer, dan melatih milisi-milisi²⁹ dalam menghadapi tentara Jepang (sekutu Jerman di Asia) menyusul diumumkankannya negara dalam keadaan bahaya dan perang setelah jatuhnya Kerajaan Belanda ke tangan Jerman tanggal 10 Mei 1940. Penentangan itu dilakukan pengurus Konsul Nahdlatul Ulama dengan cara menyurati pengurus cabang dan ranting untuk bersama-sama menolak mobilisasi pemuda untuk dijadikan anggota milisi itu.³⁰

3.4 Musyawaratutthalibin

Musyawaratutthalibin merupakan organisasi Islam lokal yang pertama kalinya dibentuk di Banjarmasin oleh putera daerah di Kalimantan Selatan dan berkembang ke luar daerah terutama di daerah komunitas etnis Banjar seperti di Samarinda, Samuda, dan di daerah pesisir timur Sumatera, seperti Sapat, Kuala Tungkal, dan Tembilahan.³¹

28 Lihat isi Motie Conferentie Oemat Islam ke I dari Selatan dan Timoer poelaoe Kalimantan 24/25-26-27 Juni 1938 di Kandangan, dalam skripsi Sjamsuddin, *Op.cit*, lampiran.

29 Milisi dimaksud antara lain *Landswacht*, *Stadswacht*, *Jeugd Oefen Corps* (JOC), *Algemene Vernielings Corps* (AVC), *Lucht Beschermings Dienst* (LBD), dan *Vrijwillingers Oefen Corps*. (VOC).

30 Hasil wawancara dengan K.H. Birhasani, Banjarmasin.

31 M. Nur Maksum, "Gerakan Islam Modern di Kalimantan Selatan (1900-1942)", Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 1998, hlm. 8 menyebut Musyawaratutthalibin sebagai organisasi Islam lokal terbesar pada masa kebangkitan nasional di Kalimantan Selatan. Dikatakan lokal karena pertama kali didirikan oleh putera daerah di Kalimantan Selatan, dan dikatakan terbesar karena mempunyai anggota dan cabang yang sangat banyak sampai ke daerah lainnya terutama di daerah komunitas Banjar berada seperti Kaltim, Kalteng, Riau, Jambi, dan Bangka-Belitung.

Musyawaratutthalibin berdiri di Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 1931. Tokoh-tokoh pendirinya adalah Haji Ridwan Syahrani, Haji Majedi Effendi, Haji Amin dan mendapat dukungan dari para alim ulama, guru-guru agama, penuntut-penuntut ilmu di Banjarmasin. Kedudukan *Hoofd Bestuur* (Pengurus Besar) Musyawaratutthalibin berada di jalan Ulin/Pasar Lama Banjarmasin³² dan pada tahun 1936 dipindahkan ke kota Kandangan sebagai salah satu hasil keputusan Kongres ke-2 di Kandangan, 31 Mei s.d. 3 Juni 1936.³³



Gambar 9 Pengurus organisasi Musyawaratutthalibin di Banjarmasin, Mei 1932.

(Sumber: dok. keluarga Muhammad Zein)

Terbentuknya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan, berkaitan erat dengan perkembangan organisasi Islam yang mendahuluinya, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Secara harfiah, “Musyawaratutthalibin” diartikan sebagai organisasi para pelajar atau kaum terpelajar yang menginginkan adanya permusya-

32 Sekarang dinamakan jalan Perintis Kemerdekaan, di bekas lokasi kini berdiri Masjid Al Musyarrafah.

33 M. Nur Maksum dkk., *Op.cit.*, hlm. 32.

waratan. Keinginan itu lahir karena meluasnya percekcoakan dalam masyarakat, terutama menyangkut soal-soal agama.

34

Organisasi ini berfaham keagamaan yang berdasarkan Islam, dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam statuten-nya pasal dua antara lain bekerja untuk kesempurnaan ummat Islam dengan jalan membangunkan persatuan Islam terutama guru-guru, ulama-ulama, penuntut-penuntut ilmu khususnya dan kaum muslimin umumnya, dan memajukan dan menggembirakan cara hidup dengan mengamalkan segala perintah Islam. Seperti dikatakan Haji Ridwan Syahrani pada saat pembentukan organisasi ini bahwa dibentuknya Musyawaratutthalibin ini adalah untuk membentengi faham ahlussunnah wal jamaah dengan mewujudkan dan menggembirakan cara hidup dan kehidupan dengan mengamalkan segala perintah Allah yang sudah umum dikerjakan ummat Islam di Indonesia dengan mazhab Imam Syafii berdasar Quran, Hadis, Idjma dan Qiasy.³⁵

Karena organisasi ini bermaksud membangun persatuan Islam jelaslah adanya keinginan akan kerukunan dalam beragama masyarakat, maka mulai dari golongan pemuda dan pelajar beramai-ramai memasuki Musyawaratutthalibin. Terhadap Pemerintah Hindia Belanda, Musyawaratutthalibin juga mengeluarkan mosi tahun 1938 yang isinya agar bea pemotongan hewan buat aqiqah dan qurban dibebaskan. Mosi itu disampaikan kepada pemerintah, kantor *voor Mohammadaan-zaken*, *Volksraad* dan pers Indonesia.

Dalam perkembangannya organisasi mempunyai cabang yang sangat banyak di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke pesisir Sumatera seperti Tembilahan, Enok dan

34 Mohammad Yusran, "Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1972).

35 Moh. Yusran, *Op.cit.*, hlm. 18-19.

Kuala Tungkal, di tempat mana terdapat permukiman orang-orang Banjar perantauan. Adapun cabang-cabang yang sudah berdiri sampai tahun 1936 adalah cabang-cabang Banjarmasin, Kuin, Kandangan, Barabai, Amuntai, Kalua, Samarinda, Balikpapan, Sanga-Sanga Dalam, Kota-baru, Samuda, Senakin, Alabio dan cabang Tembilahan.



Gambar 10 Cabang organisasi Musyawaratutthalibin di Kuin, Banjarmasin
Rabiul Awwal 1351 Hijriyah

Sampai tahun 1942 organisasi Musyawaratutthalibin melaksanakan beberapakali kongres yakni Kongres I tahun 1934 di Banjarmasin, Kongres II tahun 1936 di Kandangan, Kongres III tahun 1937 di Amuntai dan Kongres IV tahun 1938 di Balikpapan. Hasil Kongres ke empat di Balikpapan, selain memperbaharui pengurus baru juga berhasil memantapkan struktur organisasi yang terdiri dari: Pengurus Besar yang membawahi Pengurus Harian dan Pengurus Bagian (Departemen) yang terdiri dari badan-badan yakni Badan Majelis Syar'iy, Badan Majelis Pengajaran dan Pendidikan, Badan Propaganda, Badan Komisi Mengumpul Rancangan-Rancangan Aturan Nasrul Umum, Badan Pengurus *Stapeldrukkerij*, Badan Pendirian Drukkerij M.Th

(Musyawaratutthalibin), Badan Pers Commisie dan Badan Perpustakaan.³⁶

Melalui badan-badan itu, selain bergerak dalam bidang keagamaan juga bergerak di bidang sosial antara lain dengan mengadakan kursus-kursus kerajinan, pemberantasan buta huruf. Bagian terkenal dari organisasi ini adalah Badan Majelis Pengajaran dan Pendidikan yang program kerjanya menggiatkan berdirinya sekolah-sekolah.

Sekolah-sekolah yang dibina Musyawaratutthalibin seperti sekolah-sekolah Safiyah, Kepanduan Nasrul Umum untuk bidang kepemudaan dan Dawatutthalibin untuk kelompok laki-laki serta Jami'yyatunnisa untuk kelompok wanitanya yang bergerak di bidang propaganda agama melakukan melalui Badan Majelis Proganda yang dipimpin Haji Abdullah Sidiq, melakukan propaganda-propaganda agama dalam rangka menjunjung tinggi Al Quran, Hadist, Idjma dan Qiasy serta menolak keras serangan ahlul bid'ah waddhalalah baik di tempat terbuka, di masjid maupun langgar. Usahanya di bidang agama ditemui pula pada pembentukan kader-kadernya di setiap sekolah "musyawarah" yang terdapat pada setiap cabang-cabangnya di daerah.

Di bidang sosial kegiatan Musyawaratthalibin selain dilaksanakan melalui badan-badan juga melalui organisasi seperti Kepanduan Nasrul Umum, Dawatutthalibin, dan Jami'yyatunnisa. Mereka melaksanakan kursus-kursus buta huruf, kerajinan tangan, dan mengumpulkan biaya pendidikan bagi anak yang cerdas yang kesulitan biaya, bahkan mengadakan percetakan dan menerbitkan surat kabar yakni "Suara MTh atau Suara Musyawarah" meski tidak lama umurnya. Di bidang pendidikan, perjuangan Musyawaratutthalibin terlihat dari adanya "Sekolah Musyawarah" yang didirikan di hampir semua cabang organisasi ini. Disamping itu, organisasi ini juga mendirikan sekolah agama yang lain seperti "*Qismul-Mudarisien*" di Kandangan dan "Normal

36 Moh. Yusran, *Op.cit.*, hlm. 38-40.

Islam” di Rantau. Selain itu, Musyawaratutthalibin berhasil menyatukan dua perguruan yakni “Persatuan Perguruan Islam di Birayang” dengan “Sekolah Musyawarah”, sehingga kerjasama itu dapat meningkatkan mutu kerja guru-guru dan murid di samping hubungan organisasi ini dengan perhimpunan lainnya menjadi lebih erat.

BAB IV

KIPRAH ELITE AGAMA DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN

Sebagaimana dipaparkan dimuka, para pelopor pergerakan kebangsaan itu lahir dari tiga bentuk pendidikan yakni: (1) Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda; (2) Sekolah-sekolah Partikelir; (3) Sekolah-sekolah Agama.¹ Jika diperinci, Sekolah Partikelir maupun Sekolah Agama yang alumninya menjadi pelopor dan aktivis pergerakan kebangsaan dapat digolongkan sebagai Sekolah Kaum Pergerakan.²

Terhadap sekolah Islam, Belanda sangat mengkuatirkan perkembangannya yang cepat. Sekolah pemerintah dimunculkan selain untuk kepentingan mencetak pegawai-pegawai rendahan yang berpendidikan Barat dalam konteks politik etis (politik balas budi) dengan slogan “*irigasi, edukasi dan emigrasi*”, juga merupakan strategi untuk menghadapi ancaman yang mereka sebut “volcano Islam”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dikategorikan elite baru di Kalimantan Selatan bukan hanya cendekiawan melainkan juga elite agama yang berpikiran maju, hal ini sesuai karakteristik Islam sebagai agama ma-

1 Sjarifuddin, “Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950”, (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1974), hlm. 280-285.

2 Wajidi, *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007) hlm. 35.

yoritas dan besarnya peran elite agama di awal pergerakan kebangsaan.

Elite baru di Kalimantan Selatan meliputi juga para *tuan guru*, guru-guru agama, para haji, dan pemuda dari kalangan elite agama berpikiran progresif yang dihasilkan pengajian, pesantren atau madrasah. Hal ini sesuai dengan kenyataan besarnya peran elite agama di awal pergerakan kebangsaan.

4.1 Elite Agama dan Pendidikan Islam

Dalam pengertian umum, kata elite agama yang sering diterjemahkan ke dalam kata “ulama”, mempunyai arti sebagai orang-orang pintar, terkemuka, atau orang-orang terpandang dari kalangan agama khususnya dikaitkan dengan agama Islam. Kata ulama berasal dari bahasa Arab yang sering diidentikkan sebagai dengan Islam. Meski pada kenyataannya kata ulama juga dipakai untuk menyebut para elite agama non Islam, namun seringkali istilah untuk menyebut elite agama non Islam adalah tokoh agama bukan ulama. Ulama dalam komunitas Islam merupakan sebutan kepada seseorang atau kelompok yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan agama yang mumpuni yang melebihi guru-guru agama Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan seorang ulama disebut sebagai *tuan guru* atau guru agama.

Karena kealiman, ketinggian ilmu, kiprah dan perilaku sepanjang hidupnya, maka sebagai pengakuan dan penghormatan kepadanya seorang *tuan guru* terkadang dipanggil syekh, mu'allim wahid, atau datu. Penyebutan “syekh” merupakan sebutan masyarakat akademik untuk orang yang berilmu tinggi yang pernah mengkaji ilmu di Timur Tengah (Mekkah, Madinah, dan Mesir) sehingga dianggap sebagai guru besar yang dalam bahasa Arab disebut “syekh”.³ Mu'allim Wahid yang artinya Guru Utama

3 Lihat Mulkan, “Sistem Pendidikan Surau: Karakteristik, Isi, dan Literatur Keagamaan”, dalam Samsul Nizar, et al., *Sejarah Sosial dan*

merupakan panggilan kehormatan bagi seorang ulama berilmu tinggi yang di dalam pengajaran Islam biasanya mengajar pada kelas tertinggi atau pada saat-saat tertentu saja memberikan pelajaran kepada seluruh santri.⁴ Sedangkan sebutan masyarakat lokal untuk orang berilmu tinggi adalah “datu”. Menurut Humaidy, selain pernah menuntut ilmu dalam masa yang cukup lama di Mekkah dan Madinah. Gelar syekh juga mengimplisitkan bahwa orang tersebut mempunyai posisi sangat penting dalam dunia tasawuf dan tarekat, mungkin sebagai *khalifah*, *mursyid*, *murabbi* atau *badal*.⁵

Terkadang seorang *tuan guru* diminta oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk membantu di dalam pemerintahan yang berkaitan dengan urusan keagamaan yakni Mufti⁶. Sedangkan sebutan “kiai atau kyai” yang di daerah lain sebagai ulama, maka di daerah ini pada masa Hindia Belanda bukanlah ulama agama Islam, melainkan gelar pangkat di masa Kerajaan Banjar yang dipakai Belanda sebagai gelar jabatan dalam struktur pemerintahannya.

Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 59-60.

- 4 Misalnya Mua'allim Wahid sebagai panggilan kehormatan kepada Tuan Guru Haji Abdurasyid (1922-1931) pendiri Arabische School, Amuntai, lihat Abdulmuthalib Mohyidin, red., 50 Tahun Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai Kalimantan Selatan 1922-1972, (Amuntai: Yayasan Pemeliharaan Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan, 1973), hlm. 27.
- 5 Humaidy, “Tragedi Datu Abulung: Manipulasi Kuasa atas Agama”. *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 2, LK3 Banjarmasin, Tahun I September 2003, hlm. 49.
- 6 Mufti adalah ketua hakim tertinggi yang terdapat dalam lembaga Mahkamah Syariah pada masa Kesultanan Banjar. Mufti didampingi oleh Qadhi sebagai pelaksana hukum Islam dan mengatur jalannya pengadilan yang terkait dengan masalah perdata, pernikahan, dan warisan. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, jabatan mufti dan qadhi masih dipakai namun mempunyai fungsi yang berbeda dengan sebelumnya.

Sebagaimana dikatakan Syaharuddin bahwa dukungan masyarakat Banjar terhadap kehadiran organisasi Islam sangat berkaitan dengan kondisi sosiokultural masyarakat yang sangat kental dengan tradisi Islam. Islam telah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kemudian dikodifikasi dalam Undang-Undang Sultan Adam (1835).⁷ Undang-undang ini menjadikan Islam sebagai agama resmi kesultanan, dan memuat banyak pasal yang mengatur penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Dengan demikian, misi-misi keislaman melalui pendidikan, aktivitas elite agama, dan organisasi pergerakan Islam direspon positif oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.⁸

Pada umumnya elite agama dari kalangan para *tuan guru* di Kalimantan Selatan mempunyai lembaga pendidikan tradisional yang dikenal sebagai “pengajian” yakni sistem pengajaran untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, pada mulanya dilangsungkan di tempat tinggal *tuan guru*, tetapi kemudian banyak yang berlangsung di langgar-langgar atau masjid. Lembaga pengajian dan pesantren, banyak menghasilkan elite agama berjiwa santri yang di kemudian hari banyak berkecimpung dalam organisasi pergerakan.

Para elite agama mulai mendirikan sekolah-sekolah Islam, antara lain Sekolah Islam Darussalam Martapura tahun 1914, *Arabische School* yang kemudian menjadi Ma’ahad Rasyidiyah Amuntai tahun 1930, dan Diniyah Islamiyah di Barabai tahun 1932.⁹ Begitupula dengan sekolah-sekolah kaum pergerakan seperti Madrasah Persatuan

7 Syaharuddin, *Orang Banjar Menjadi Indonesia: Dinamika Organisasi Islam di Borneo Selatan, 1912-1942*, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2009), hlm. 181.

8 Akan tetapi bukan berarti umat Islam di Kalimantan Selatan semuanya umat yang taat, dalam arti tidak semua ritus-ritus keagamaan mereka dapat dicari referensinya dalam ajaran Islam.

9 Ramli Nawawi (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan, 1992), hlm. 25.

Perguruan Islam, Madrasah Sarekat Islam, Madrasah Musyawatutthalibin, dan Sekolah Muhammadiyah, umumnya disokong oleh para tuan guru, minimal oleh para guru agama Islam.

Kelahiran sekolah-sekolah Islam tidak terlepas dari pengaruh pendidikan Barat yang telah melahirkan elite baru yang semakin memudahkan peranan elite tradisional. Tetapi elite baru yang sekuler ini tidak semuanya diterima oleh masyarakat. Demikian pula dengan masuknya agama Kristen yang penyebarannya mendapat dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda, telah menimbulkan reaksi para ulama tentang adanya bahaya kristenisasi sehingga mereka berupaya menyempurnakan metode syiar agama dan pendidikan Islam di masyarakat melalui resistensi, adaptasi, dan identifikasi terhadap sekolah pemerintah dan missi-zending. Akan tetapi, bagi menurut Arief Subhan, pendidikan Islam modern adalah juga autokritik terhadap praktik pendidikan Islam tradisional, khususnya yang berlangsung di pesantren.¹⁰

Kristenisasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk melawan gerakan-gerakan Islam, dan gerakan Islam sendiri sangat mudah memicu perasaan anti Belanda.¹¹ Ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah umum, para ulama menilainya sebagai suatu usaha untuk mengasingkan anak-anak mereka dari agama Islam dan kemudian menasranikannya. Akibat dari itu, di beberapa daerah timbul gagasan mendirikan sekolah agama bukan sekadar untuk menyaingi sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga untuk melawan Belanda melalui jalur pendidikan.

10 Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad ke-20 Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105.

11 J. Thomas Linblad, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*, (Leiden: Foris Publications-KITLV, 1998), hlm. 133.



Gambar. 11 Peserta “Pentjerahan V.V.S – J.V.S 17-7-
‘41” di halaman depan
“Openbare Vervolgschool Banoea Koepang 1923”, Barabai.
(Sumber: dok. H. Abdul Muis).

Para elite agama mulai mendirikan sekolah-sekolah Islam, antara lain Sekolah Islam Darussalam Martapura tahun 1914, *Arabische School* yang kemudian menjadi Ma’ahad Rasyidiyah Amuntai tahun 1930, dan Diniyah Islamiyah di Barabai tahun 1932.¹² Begitupula dengan sekolah-sekolah kaum pergerakan seperti Madrasah Persatuan Perguruan Islam, Madrasah Sarekat Islam, Madrasah Musyawatatthalibin, dan Sekolah Muhammadiyah, umumnya disokong oleh para tuan guru, minimal oleh para guru agama Islam. Sekolah-sekolah itu telah diatur sesuai metode pengajaran modern dengan menggunakan sistem klasikal. Pada mulanya sekolah yang diselenggarakan dengan sistem klasikal merupakan peningkatan dari sistem pengajian yang telah berkembang sebelumnya. Sekolah-sekolah yang berkembang tersebut tidak memiliki hubungan

12 Ramli Nawawi (ed.), *Op.cit.*, hlm. 25.

antar yang satu dengan lainnya, baik dari seri administratif maupun pengelolaannya. Tidak hanya itu, meski sama-sama sekolah agama, sekolah tersebut tidak memiliki keseragaman bentuk dan isi kurikulum. Alumni sekolah-sekolah dengan sistem klasikal inilah yang paling banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin muda Islam, baik yang bergiat dalam pergerakan di bidang politik, sosial maupun keagamaan.

Dilihat dari jiwa perjuangannya, para pemimpin muda Islam yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Islam dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu: (1) Elite agama berjiwa santri yang dihasilkan pendidikan klasik Islam yang kemudian banyak menjadi pelopor dan penggerak organisasi pergerakan rakyat seperti Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratutthalibin. Kelompok inilah yang dahulu disebut sebagai kaum tua (*kaum tuha*) dan umumnya berhimpun dalam wadah organisasi Nahdlatul Ulama; (2) Elite agama yang berjiwa agresif dan dinamis yang kemudian berjuang dalam wadah organisasi Muhammadiyah. Kelompok ini yang menurut istilah di daerah ini pada saat itu disebut sebagai kaum muda. Istilah “kaum muda” dan “kaum tua” di Kalimantan Selatan, pertamakali muncul di Alabio pada saat terjadi perdebatan antara ulama pembaharu dengan ulama berpaham lama di *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* Amuntai tahun 1926.¹³

Baik elite agama berjiwa santri maupun yang berjiwa agresif dan dinamis, sama-sama berperan sebagai aktor dalam pertumbuhan kesadaran kebangsaan. Syaharuddin menyatakan bahwa kesadaran orang Banjar akan semangat kebangsaan dibangun oleh tiga kelompok pembaharu, yakni: (1) elite Islam dari Timur Tengah yang datang langsung dari Timur Tengah khususnya Mesir dan dan Mekkah; (2) elite Islam lokal hasil pendidikan modern pada periode awal seperti Saleh Bal’ala (alumni *Islamsche School*) dan

13 Achmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Paham dalam Agama Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 51.

Abdurrahman Siddik (Musyawaratutthalibin); (3) elite Islam Banjar pada periode akhir (1940-an) yang menempuh pendidikan Islam di Jawa.¹⁴

Diantara ketiga kelompok di atas, elite Islam lokal lahir dari berbagai sekolah seperti Sekolah Islam Darussalam Martapura, Ma'ahad Rasyidiyah Amuntai, Madrasah Persatuan Perguruan Islam, Madrasah Sarekat Islam, Madrasah Musyawaratutthalibin, Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Nahdlatul Ulama, Sekolah Musyawaratutthalibin, dan sejenisnya. Hasil didikan menjadikan mereka cerdas dan rasional. Melalui pengalaman, pengetahuan, dan hubungan dengan dunia luar, menjadikan mereka mempunyai kemampuan untuk “menangkap” adanya kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap kalangan pribumi dan memformulasikan cara menghadapinya melalui organisasi pergerakan, atau melalui berbagai mosi, maklumat, tulisan dan menyampaikan segala keberatan-keberatan dan permohonan rakyat kepada pemerintah Hindia Belanda.

Selain *tuan guru*, para pemuda terdidik yang menurut Savitri Prastiti Scherer disebut dengan istilah cendekiawan juga tumbuh dari sekolah keagamaan. Para pemuda yang berpikiran progresif memegang peranan penting di awal-awal pergerakan, karena perkembangan pergerakan di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh agama Islam.

Banyak diantara mereka yang menjadi motor dan aktivis pergerakan atau menjadi guru sekolah Islam seraya menanamkan kesadaran kebangsaan. Boleh jadi, keterlibatan mereka dalam pergerakan didorong oleh adanya kesadaran tentang beratnya kehidupan rakyat yang terjajah, adanya diskriminasi, dan rendahnya emansipasi masyarakat pribumi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hukum.

Mereka lah yang karena memiliki pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan hubungan dengan dunia luar, menjadikan mereka mempunyai kemampuan untuk mera-

14 Syaharuddin, *Op.cit.*, hlm. 182.

sakan dan melihat adanya kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap kalangan pribumi dan memformulasikan cara menghadapinya melalui organisasi pergerakan atau bahkan dengan bersenjatakan pena menuangkan gagasan dan kritikan di media massa kala itu.

4.2 Elite Agama Dalam Perjuangan Kemerdekaan

Di dalam buku yang ditulis Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin didapat keterangan, bahwa diantara elite agama yang mendapat pengaruh ketika berhubungan dengan dunia luar adalah ketika Tuan Guru H. Muhammad asal Gadung bertemu dengan Tuan Guru H. Abdullah Siddiq bin H. Asnawi dari Pematang Karangan (Tambaruntung) keduanya asal Rantau yang sama-sama mengaji di Mekkah.¹⁵

Ketika mengaji di Mekkah ada salah satu guru beliau yang berasal dari Jawa Barat bernama Tuan Guru Mukhtar Lutfi. Tuan Guru Mukhtar Lutfi merupakan ulama besar di Mekkah yang membuka pengajian yang murid dari berbagai daerah di Indonesia dan beliau juga sebagai imam shalat di Masjidil Haram. Selain mendapat bimbingan dalam ilmu pengetahuan agama, Tuan Guru Mukhtar Lutfi juga memberikan cara-cara perlawanan menghadapi penjajah Belanda.

Tuan Guru Mukhtar Lutfi berpesan kepada murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia:

Kalau saudara-saudara setelah datang ke tanah air segera bentuk kepanduan dengan maksud untuk menolong sesama manusia yang menderita/sengsara karena sakit, ditindas oleh bangsa lain, kebanjiran, kecelakaan dan lain sebagainya dengan tanda palang merah didada agar pernerintah Belanda tidak curiga dengan kegiatan yang dilakukan. Latihan baris

15 Lihat Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin, *Tapin Bertabur Ulama*, (Rantau: Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2007).

berbaris, memberikan aba-aba dan lain sebagainya seperti latihan militer.¹⁶

Tuan Guru Mukhtar Luthfi juga memberikan bimbingan mengenai cara perjuangan secara gerilya dan kepanduan kepada Tuan Guru H. Muhammad dan Tuan Guru H. Abdullah Siddiq bersama dengan ulama lainnya yang berasal dari Indonesia. Dibentuknya kepanduan sebagai agar pihak Belanda tidak curiga dengan pergerakan yang dilakukan. Jadi selama mengaji di Mekkah tidak hanya ilmu pengetahuan agama yang didapat, melainkan juga mendapat ilmu cara-cara perjuangan melawan penjajah dengan cara gerilya dan ilmu kepanduan.

Sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Tuan Guru Mukhtar Luthfi maka Tuan Guru H. Abdullah Siddiq dan Tuan Guru H. Muhammad membentuk kepanduan. Dalam kepanduan diajarkan cara-cara baris-berbaris dengan menggunakan pakaian seragam kepanduan serta cara-cara menolong orang yang terkena musibah.

Setelah berlatih kepanduan sekitar 6 bulan, Tuan Guru H. Abdullah Siddiq dipanggil untuk menghadap *controleur* Belanda di markasnya di Rantau. *Controleur* Belanda menanyakan maksud dan tujuan latihan kepanduan. Dijawab oleh Tuan Guru H. Abdullah Siddiq latihan kepanduan bertujuan untuk menolong orang yang sakit di jalanan, terbakar, bencana alam, sedangkan latihan baris berbaris agar mereka terampil dan cekatan dalam menolong orang. Setelah kejadian itu, latihan kepanduan yang dipimpin oleh Tuan Guru H. Abdullah Siddiq dan Tuan Guru H. Muhammad selalu mendapat pengawasan dari militer Belanda. Akibat semakin ketatnya pengawasan maka beliau membubarkan kepanduan yang telah dirintis sebagai taktik dalam melakukan perang gerilya.

Karena kegiatan mereka di kepanduan diawasi Belanda, maka mereka berdua hijrah keluar Tapin menuju

16 Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin, *Ibid.*, hlm. 115.

Sungai Bali di Kotabaru. Sungai Bali dipilih karena jauh dari pengawasan dari pihak Belanda dan sulit untuk di jangkau. Di Sungai Bali Kotabaru Tuan Guru H. Muhammad dan Tuan Guru H Abdullah Siddiq mendirikan Sekolah Islam dan beliau berdua sebagai pengajarnya. Selain mengajar, beliau juga berkebun menanam sahang (merica) yang hasilnya untuk dijual sebagai biaya hidup.

Sekolah Islam tersebut berjalan dengan baik dan banyak murid-murid yang bersekolah di sekolah tersebut serta didukung oleh masyarakat setempat. Setelah berjalan lebih kurang tiga tahun di Sungai Bali Kotabaru sebagai pengajar Sekolah Islam, beliau berdua kemudian kembali ke Rantau untuk melanjutkan cita-cita perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Tuan Guru H. Muhammad kembali ke Gadung dan Tuan Guru H. Abdullah Siddiq ke Tambaruntung. Pada saat bersamaan, perjuangan gerilya meningkat. Tuan Guru H. Muhammad dan Tuan Guru H. Abdullah Siddiq terjun dalam perjuangan sebagai pengatur strategi perjuangan secara gerilya melawan penjajah di daerah Tambaruntung dan Gadung.

Tidak berapa lama di Tambaruntung Tuan Guru H. Abdullah Siddiq bersama adiknya yakni Tuan Guru H. Hidayatullah mendirikan sekolah yang diberi nama dengan Madrasah Kuliyyatul Mu'allimin tahun 1946. Pendirian Madrasah Kuliyyatul Mu'allimin pada tahun 1946 yang merupakan masa-masa sangat genting karena baru saja merdeka dan Belanda belum rela untuk melepas Indonesia yang menurut mereka masih jajahan Belanda. Oleh sebab itu dimana-mana kegiatan masyarakat selalu diawasi dan dicurigai oleh Belanda beserta kaki tangan Belanda. Madrasah Kuliyyatul Mu'allimin pernah dikelilingi oleh polisi Belanda untuk memata-matai suasana madrasah serta menakut-nakuti para santri agar berhenti sekolah. Namun Tuan Guru H. Hidayatullah sebagai pimpinan madrasah tidak merasa takut sedikitpun walaupun pihak kaki tangan

Belanda melakukan intimidasi kepada beliau maupun para santri.

Di dalam buku yang ditulis Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin juga didapat keterangan bahwa salah seorang ulama lainnya adalah Tuan Guru H. Gazali Kadhi adalah tokoh bukan saja dalam bidang agama melainkan juga sebagai tokoh pergerakan khususnya di daerah Tapin sekarang. Dalam menegakkan kemerdekaan di Indonesia, beliau ikut berperan aktif memikirkan nasib bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan ketika beliau masih menuntut ilmu pengetahuan agama di Mekkah, beliau membentuk Perpindom (Persatuan Indonesia Malaya). Wadah ini sebagai tempat untuk mendiskusikan berbagai hal mengenai nasib bangsa Indonesia dan Malaya (Malaysia) menghadapi penjajah asing.

Demikian juga setelah pulang ke tanah air, beliau terus aktif dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan yang merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Di Rantau Tuan Guru H. Gazali Kadhi menjadi anggota dan sekaligus sebagai penasehat agama pada Gerakan Kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Yusi. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, beliau menyetujui atau merestui usaha-usaha sabotase untuk mengacaukan pemerintah Belanda (NICA) yang berada di Rantau.

Bukan saja di pulau Jawa ada peristiwa heroik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, di Rantau pun terjadi peristiwa heroik yang terjadi pada tanggal 9 November 1945. Peristiwa itu adalah pengrusakan motor-motor Belanda di Kampung Banua Padang dan Tuan Guru H. Gazali Kadhi ikut dalam peristiwa tersebut. Dalam penyerangan dan pengrusakan motor Belanda itulah gugur pejuang Tapin yaitu Tasan dan Ahmad Panyi dalam peristiwa itu. Dengan gugurnya pejuang Tasan dan Ahmad Panyi, tuan guru H. Gazali Kadhi menyatakan dengan tegas dan tanpa ragu-ragu beliau mengatakan:

....yang gugur itu adalah mati syahid dan menyatakan sebagai Pahlawan Tanah Air dan Agama. Selanjutnya beliau mengatakan orang yang mati syahid dalam membela tanah air dan agama disembahyangkan tanpa dimandikan dengan berkafankan pakaian yang berlumuran darah sebagai saksi nanti di khadirat Tuhan dan sebagai Pahlawan Syahid.¹⁷

Demikian ucapan dan fatwa beliau terhadap pejuang yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ucapan dari Tuan Guru H Gazali Kadhi ini dapat memicu semangat para pejuang dan masyarakat Tapin untuk berjuang mengusir bangsa Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia serta meningkatkan rasa patriotisme kebangsaan.

Demikianlah, melalui sekolah-sekolah agama, para tuan guru sangat berperan mengembangkan anak didik atau santrinya. Tuan guru, atau kyai umumnya di Indonesia oleh penduduk dianggap orang suci, karomah, dan kekuatan gaib. Karena tingginya kehormatan para tuan guru, maka dengan mudahnya mereka membangkitkan gerakan pemberontakan. Apalagi jika tuan guru bekerjasama dengan pemimpin pemberontakan maka akan sangat membahayakan pemerintah Hindia Belanda.

Mereka juga mempunyai massa yang fanatik di pedesaan. Berbagai pemikiran, fatwa, konsep, atau doktrin yang berkaitan dengan nasionalisme (agama) seperti jihad, perang fii sabilillah, amar makruf nahi munkar, serta cinta tanah air sebagian dari iman (*hubbul wathon minal iman*) yang disampaikan *tuan guru* sangat berpengaruh di masyarakat. Seringkali para *tuan guru* tidak sekadar mengajar, melainkan juga “membakar” santrinya agar lebih mencintai tanah airnya.

Sekiranya pemerintah Belanda menyadari betul tentang hal ini. Sebagaimana dikatakan Raffles bahwa para

17 Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin, *Ibid.*, hlm. 134.

kiai ternyata selalu aktif dalam berbagai pemberontakan, sebagaimana ia lihat di Jawa dan Minangkabau.¹⁸ Sebagaimana dikatakan oleh Adhyaksa Dault bahwa resistensi melalui ideologi jihad merupakan salah satu ciri khas gerakan sosial akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan basis keagamaan, yakni perang jihad. Basis nilai itu mampu menyihir masyarakat tradisional untuk melakukan gerakan massa, karena misi ideologis jihad adalah perang melawan ketidakadilan dan kekafiran yang dijamin masuk sorga bagi bersedia berkorban untuk perang suci itu.¹⁹

Sebagaimana dikatakan oleh H. Kraemer meski Belanda melakukan pembatasan-pembatasan, kenyataannya Islam justru menjadi daya tarik utama sebagai wadah perjuangan melawan penjajah Belanda selama tiga setengah abad.²⁰ Gambaran itu setidaknya pernah terjadi pada Perang Banjar yakni ketika Penghulu Rasyid sebagai seorang pimpinan agama mengorbankan semangat juang, sebagai gerakan *Baratib Baamal*²¹ yang berpusat di masjid dan langgar untuk membela Kerajaan Banjar yang dijajah Belanda. Perjuangan Penghulu Rasyid hanyalah satu dari contoh dari banyaknya perlawanan dan pemberontakan

18 Nur Huda, *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 99.

19 Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme, Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka Al –Kautsar, 2005), hlm. 31.

20 Lihat Zamakhsyary Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hlm. 21.

21 Secara etimologis *Baratib Baamal* terdiri dari dua kata, yaitu *baratib* yang berarti *berdzikir* dan *Baamal* yaitu melakukan perbuatan atau *berdoa* untuk memohon *kebaikan*. Berdasarkan kenyataan aksi Baratib Baamal lebih cenderung dianggap sebagai khalwat dalam usaha memohon keselamatan untuk memerangi orang kafir, lihat P.J. Veth dan A. Gazali Usman di dalam M. Suriansyah Ideham, *et al* (ed.), *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003), hlm. 204-205.

serupa yang terjadi di Nusantara yang melibatkan pimpinan agama, pengajian atau pesantren.

Pada masa revolusi fisik banyak tokoh perjuangan lulusan pesantren yang terjun langsung di dalam kancah perjuangan bersenjata. Gambaran itu terungkap di dalam tulisan M. Suriansyah Ideham, dkk.

Para ulama sebagian ada yang terjun langsung dalam perjuangan, sebagian lagi membantu dari garis belakang. Mufakat para ulama Banjar, bahwa berjuang melawan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) sifatnya jihad fi sabilillah, dan gugur di medan pertempuran hukumnya syahid. Spirit religiusitas yang memang didominasi spirit Islam menyebabkan seluruh komponen masyarakat tergerak untuk berjuang dalam segala kapasitasnya. Di sinilah, peran masyarakat desa atau kampung menjadi dominan. Kampung-kampung menjadi markas-markas dan pangkalan-pangkalan. Menyediakan keamanan, dan logistik bagi para pejuang. *Kindai-kindai banih* (lumbung padi) dikuras dan diserahkan bagi keperluan perjuangan yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Nuansa kerjasama “*gawi sabumi*” telah terjalin karena kondisi dan keadaan. Inilah salah satu fenomena revolusi yang sangat anti kolonialisme yang telah lama dirasakan rakyat Kalimantan Selatan.

Dalam mewujudkan “*power mentality*” rakyat Kalimantan Selatan juga menggunakan berbagai aspek keyakinan, antara lain; mandi taguh, baju barajah, wasi bawafak, rantai babi, untalan dan lain-lain. Keadaan ini sangat wajar, karena situasi saat itu mengharuskan adanya keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk menghadang musuh, maupun menyerang pos-pos militer musuh yang memiliki persenjataan yang lebih modern. Faktor keyakinan dan kepercayaan muncul sebagai alternatif jalan tengah, guna mengatasi kebuntuan

keadaan, sebagai akibat tirani kolonialisme yang menghancurkan harkat martabat kemanusiaan. Di sinilah kearifan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, menunjukkan ciri dari karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi keberanian demi tegaknya rasa keadilan dan kemanusiaan. Ketika rasionalitas tidak bisa lagi diandalkan, maka manusia tentunya akan kembali kepada irrasionalitas yang justru memberikan ide-ide spirit yang tidak bisa dilawan dengan persenjataan otomatis.²²

Banyak alim ulama dan/atau lulusan pesantren yang menjadi tokoh pejuang. Diantara mereka dapat disebut nama Idham Chalid, H.M. Hanafie Gobet²³, Zafry Zamzam,²⁴ dan Letnan Kolonel Hassan Basry. Hassan Basry dikenal sebagai Komandan dan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan adalah lulusan Pesantren Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, satu almamater dengan gurunya Idham Chalid yang menjadi anggota PRI di Banjarmasin, memimpin Sermi, anggota SOPIK, ALRI Divisi IV, dan anggota Dewan Banjar.²⁵

22 M. Suriansyah Ideham, *et al.*, (ed.). *Sejarah Banjar*. (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007), hlm. 501-502.

23 Dikenal sebagai Qadhi Besar Banjarmasin, mantan anggota Musyawaratutthalibin, pengurus SERMI, dan anggota Dewan Banjar.

24 Tokoh wartawan dan politik kelahiran Simpur, Kandangan tahun 1917. Pendidikan terakhir adalah Kweek School Islam di Ponorogo. Dan pernah menjadi guru di Kalsel, Kaltim, dan Kalteng. Kegiatan dalam organisasi dan gerakan politik yang menonjol adalah dalam Musyawaratutthalibin (1931), Partai Islam Indonesia (1936), dan Serikat Kerakyatan Indonesia (1946). Tahun 1948, ia terpilih menjadi anggota Dewan Banjar dan aktif menggerakkan dewan tersebut untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1946 menerbitkan majalah Republik di Kandangan.

25 Sebagian peran Idham Chalid dalam perjuangan kemerdekaan dapat dilihat dalam tulisan Nur Hidayatullah, *Idham Chalid Dimensi Spritual*

Pada saat perguruan Normal Islam Amuntai di bawah kepemimpinan Idham Chalid yang bersamaan dengan masa revolusi kemerdekaan, banyak pengajar dan alumni sekolah ini yang terjun dalam kancah perjuangan kemerdekaan. Ustadz Idham Chalid menyusun pengajaran yang selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan eksakta, juga menyisipkan di dalamnya kesadaran politik menuju Indonesia merdeka. Bahkan para alumni dan pengajar pesantren perguruan Normal Islam Amuntai seperti Haji Muhai, Kurnain, Ahmad Sulaiman, Haji Antemas, dan Darwawi Munawir ikut ambil bagian dalam perang gerilya.

Nama lainnya yang ikut dalam perjuangan bersenjata adalah Haji Hasbullah Yasin, seorang elite agama yang dapat dikategorikan sebagai tuan guru. Ahli bidang “Nahwu” dan “Muthalaah Hadits”, disamping sastra Timur Tengah. Pernah belajar dengan Tuan Guru H. Abdurrazyid di Amuntai, kemudian memperdalam agama Islam pada “Ma’ahadul Islamis Su’udy” Mekkah. Ketika kembali ke tanah air di tahun 1930, ia mendirikan “Wustha Mu’allimin Muhammadiyah” dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah di Alabio. Revolusi fisik meletus, ia bergabung ke dalam perjuangan bersenjata dengan mengorganisir gerakan rahasia “Pasukan Berani Mati (PBM)”. Pada saat penyelenggaraan “Musyawarah Alim Ulama se Alabio”, ia mencetuskan fatwa, antara lain: “Orang-orang yang menghalangi perjuangan kemerdekaan adalah munafik dan kalau dia mati mayatnya “jangan diurus”. Di masjid, langgar atau surau, dan di tempat-tempat lainnya fatwa itu disebarluaskan, membakar semangat juang merdeka atau mati membela Republik. Belanda menjadikannya target yang harus ditangkap hidup atau mati. Pada 27 Oktober 1945 ia ditangkap ketika akan sholat zuhur. Dalam perebutan

Negarawan Agamis, (Amuntai: Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiah Khalidiyah, 2016), hlm.2-34.

senjata dengan militer Belanda, ia ditembak dan gugur seketika.²⁶

Pada tanggal yang sama, namun bulan dan tahun berbeda yakni 27 Maret 1949 ustadz Idham Chalid, pimpinan Normal Islam Amuntai ditangkap dan ditahan oleh tentara Belanda karena dituduh menjadi penasihat, pelatih dan mendalangi gerilya. Tuduhan didasari atas alasan karena pimpina gerilya dari kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yakni Letkol Hassan Basry pernah menjadi murid Idham Chalid saat belajar di Pesantren Gontor, Ponorogo. Alasan lainnya adalah Belanda menggrebek Studio Foto “Anek” di Banjarmasin terdapat foto Idham Chalid bersama J. Hamdi dan Chairul Lima dengan uniform Kwartir Cabang Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI) di Amuntai. Sekaligus ketiganya dituduh sebagai anggota gerakan bawah tanah Gerpindom (Gerakan Pengejar Indonesia Merdeka) Amuntai.



Gambar. 12 Tuan Guru H. Abdurrasyid
(Sumber: Dok. Pesantren Rakha).

26 Anggraini Antemas, *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan*, (Amuntai: Mega Sapura, 1988), hlm. 28-29.

BAB V

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PERGERAKAN

Pada tahun-tahun pertama abad ke-20, di Kalimantan Selatan berdiri berbagai usaha pendidikan. Ada yang didirikan oleh partai politik, organisasi masyarakat, dan juga oleh persatuan umat Islam. Usaha pendidikan ini lahir karena sekolah pemerintah tidak dapat menampung hasrat kebangsaan (nasional) dan keagamaan (Islam) dan agama lainnya. Sekolah Islam dapat dikatakan sebagai bagian sekolah kaum pergerakan, karena selain mengajarkan agama Islam, juga menanamkan kesadaran berbangsa kepada anak didiknya

Sekolah kaum pergerakan adalah sekolah yang dilihat dari segi motivasinya didirikan dengan motivasi nasionalisme yakni selain bertujuan agar anak didik memiliki rasa kebebasan dan tanggung jawab juga agar menjadi putera tanah air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme memiliki rasa pengabdian tinggi bagi nusa dan bangsa.¹

Pada umumnya sekolah kaum pergerakan dimiliki oleh swasta (partikelir) dan didirikan oleh perkumpulan dan/atau tokoh pergerakan, sebagian tidak bersubsidi, bergerak dalam bentuk sekolah maupun kursus seperti yang diselenggarakan oleh Perguruan Taman Siswa dan sekolah Perguruan Rakyat Parindra. Di samping itu ada pula sekolah kaum pergerakan yang bercorak Islam yang sebenarnya swasta juga selain mengajarkan mata pelajaran agama Islam untuk anak didik juga memberikan pelajaran umum dan

1 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm. 251.

mengajarkan konsepsi dan doktrin nasionalisme (agama) dan pembaharuan untuk kemajuan umat Islam terbebas dari penjajahan, kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan, seperti yang dilaksanakan oleh Sekolah Persatuan Perguruan Islam, Sekolah Sarekat Islam, Sekolah Muhammadiyah, dan Sekolah Musyawaratutthalibin.

Terhadap sekolah sekolah partikelir atau swasta, Pemerintah Hindia Belanda seringkali menekan, mengawasi sekolah-sekolah partikelir dengan “*Wilde Schoolen Ordonnantie 1932*” yang bertujuan untuk mengendalikan perasaan kebangsaan di kalangan pelajar. Berdasarkan ordonansi itu, sekolah partikelir dan guru-gurunya harus minta izin dahulu kepada pemerintah, dan isi pelajarannya tidak boleh melanggar peraturan pemerintah.² Jika sekolah partikelir tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam “*Wilde Schoolen Ordonnantie 1932*” maka sekolah itu dianggap sekolah liar.

Sekolah partikelir yang nasionalistis dan anti kolonial, didirikan oleh perkumpulan dan/atau tokoh pergerakan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah atau kursus bebas seperti kursus memberantas buta huruf, kursus mengetik sampai dengan kursus politik. Sekolah dimaksud di Kalimantan Selatan antara lain sekolah Perguruan Taman Siswa dan sekolah Perguruan Rakyat Parindra. Mereka juga menyelenggarakan semacam kursus keterampilan yang bertujuan mendidik masyarakat agar mempunyai keterampilan sebagai usaha penopang ekonomi keluarganya kelak. Kursus keterampilan itu umumnya bersifat kerajinan tangan seperti kursus pertanian, menyulam, pertukangan, dan anyaman rotan. Kursus seperti itu merupakan bagian dari perjuangan untuk meningkatkan keterampilan dan mengangkat ekonomi rakyat.

2 Sjarifuddin' “*Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950*”, (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1974), hlm. 284-285.

5.1 Madrasah: Resistensi dan Adaptasi

Di samping itu ada pula sekolah kaum pergerakan yang bercorak Islam. Kehadiran sekolah ini tidak terlepas dari reaksi para ulama tentang adanya bahaya kristenisasi yang disokong pemerintah sehingga mereka berupaya menyempurnakan metode syiar agama dan pendidikan Islam di masyarakat melalui resistensi, adaptasi, dan identifikasi terhadap sekolah pemerintah dan *misionaris-zending*.

Raffles dan De Haan menyatakan bahwa kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda tidak didasari untuk menyebarkan Kristen di Indonesia. Beberapa sarjana Islam menolak anggapan keduanya dengan mengatakan bahwa pemerintah Belanda jelas-jelas menyokong organisasi-organisasi misi Kristen.³ Banyak alasan untuk mengatakan bahwa pemerintah menyokong kristenisasi di Kalimantan Selatan seperti pengenaan kewajiban guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal dan kaum masjid menjalankan *Ordonnantie Heeren Dienst* yang menyangkut *erakan* atau kerja *rodi* namun tidak untuk guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending, disamping mengeluarkan Ordonansi Guru 1905 dan Ordonansi Guru 1925 yang berisi kewajiban guru-guru agama Islam yang hendak melaksanakan pengajaran melapor kepada pemerintah.

Sejauh Islam dianggap sebagai anti kolonial, maka Kristenisasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk melawan gerakan-gerakan Islam, dan gerakan Islam sendiri sangat mudah memicu perasaan anti Belanda.⁴ Deliar Noer menulis bahwa dipandang dari sudut Islam, kerjasama antara pemerintah Belanda dan misi Kristen merupakan

3 Lihat Zamakhsyary Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hlm. 18.

4 J. Thomas Linblad, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*, (Leiden: Foris Publications-KITLV, 1998), hlm. 133.

ancaman bagi kehidupan agama Islam.⁵ Ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah umum, para ulama menilainya sebagai suatu usaha untuk mengasingkan anak-anak mereka dari agama Islam dan kemudian menasranikannya. Akibat dari itu, di beberapa daerah timbul gagasan mendirikan sekolah agama atau perguruan Islam bukan sekadar untuk menyaingi sekolah-sekolah umum yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga untuk melawan Belanda melalui jalur pendidikan.

Dengan semua keterbatasan, perlawanan melalui jalur pendidikan sejauh itu dapat dilakukan oleh elite agama dan organisasi pergerakan Islam. Akan tetapi, pendirian rumah sakit di beberapa daerah tidak dapat diimbangi oleh pengobatan tradisional kepunyaan orang-orang Islam saat itu.⁶

Nor Huda menulis bahwa kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Islam di Indonesia juga dipengaruhi gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah.⁷ Diilhami oleh *Wahabbisme*, Syekh Muhammad Abduh mengobarkan Persatuan Islam (*Pan Islamisme*) untuk menghadapi imperialisme. Pola pemikiran yang diemukakan antara lain: untuk menghadapi penetrasi Barat ini umat Islam harus dibangkitkan kekuatannya. Kekuatan akan terwujud apabila umat Islam kembali kepada pokok-pokok ajaran Islam yang murni yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad dan ulama-ulama Salaf.⁸ Salah seorang pengikut dan murid Abduh yang kelak pergi ke Indonesia adalah Ahmad Surkati yang mendirikan *Al Irsyad* pada tahun 1914 di Jakarta. Ahmad Surkati inilah yang banyak

5 Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 28.

6 Deliar Noer, *Loc.cit.*

7 Nor Huda, *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 106.

8 Syarkawi Ruslan, "Perkembangan Reformisme Islam di Kalimantan Selatan serta Pengaruhnya Dalam Lapangan Agama, Sosial, dan Pendidikan dari Tahun 1914-1942", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1975), hlm. 20-27.

memberikan inspirasi kepada K.H. Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Di Kalimantan Selatan paham pembaharuan berkembang sejak 1914 dengan didirikannya sekolah bernama *Arabische School* di Banjarmasin.⁹

Meski terjadi gelombang pembaharuan Islam melanda masyarakat Banjar, sebagian penuntut ilmu asal Banjar di awal abad ke-20 masih mempertahankan genealogi intelektual mereka kepada ulama Haramain yang berseberangan dengan Wahabisme. Ini yang mungkin membedakan *Arabische School di Banjarmasin* yang menjadi cikal bakal Muhammadiyah dengan *Arabische School* di Amuntai pimpinan Syekh Abdurrasyid yang kelak menjadi Ma'had Rasyidiyah (kini Rasyidiyah Khalidiyah/Rakha) yang bercirikan pesantren Nahdlatul Ulama.

Cikal bakal *Arabische School* di Amuntai bermula dari pengajian yang didirikan Tuan Guru H. Abdurrasyid pada tanggal 13 Oktober 1922 di rumah beliau sendiri. Beliau adalah alumni Al Azhar, Kairo, Mesir sehingga dipanggil juga sebagai syekh, dan mu'allim wahit (guru utama). Sistem pengajaran yang dipergunakan ialah "hilqah" yakni para santri duduk di samping guru dalam mengikuti pelajaran. Karena rumah tidak bisa menampung banyaknya santri, maka tempat pengajian pindah ke langgar (surau, musala) bertingkat dua. Di langgar, Abdurrasyid menerapkan sistem pengajaran baru dengan menggunakan perlengkapan meja, kursi, dan papan tulis. Suatu sistem pengajaran baru dan terkenalnya *Arabische School* sempat menimbulkan kecurigaan pada pemerintah Hindia Belanda, namun

9 Meski terjadi gelombang pembaharuan Islam melanda masyarakat Banjar, sebagian penuntut ilmu asal Banjar di awal abad ke-20 masih mempertahankan genealogi intelektual mereka kepada ulama Haramain yang berseberangan dengan Wahabisme. Ini yang mungkin membedakan *Arabische School di Banjarmasin* yang menjadi cikal bakal Muhammadiyah dengan *Arabische School* di Amuntai tahun 1922 pimpinan Syekh Abdurrasyid yang kelak menjadi Ma'had Rasyidiyah (kini Rasyidiyah Khalidiyah/Rakha) yang bercirikan pesantren Nahdlatul Ulama.

Abdurrasyid tetap tabah menghadapi sehingga kemudian kecurigaan itu hilang dengan sendirinya dan menuai simpati dari masyarakat. Tatkala langgar tak lagi menampung banyaknya santri, maka dibangunlah gedung baru yang kemudian pada awal pengajaran tahun 1928 diberi nama “Arabische School” yang berarti sekolah Arab. Sekolah ini menggunakan alat-alat belajar modern seperti papan tulis, meja, kursi dan bangku. Pada perkembangannya kemudian, dimasa kepemimpinan K.H. Juhri Sulaiman (1931-1942), *Arabische School* diganti dengan nama baru “Al Madrasatur Rasyidiyah”, kemudian menjadi “Ma’had Rasyidiyah” pada masa kepemimpinan H.M. Arif Lubis (1942-1944), dan sejak dipimpin Ustadz Idham Chalid¹⁰ di tahun 1945 menjadi “Normal Islam Amuntai”.¹¹

Melalui perguruan atau sekolah Islam, selain diajarkan mata pelajaran agama Islam untuk anak didik juga diberikan pelajaran umum dan mengajarkan konsepsi dan doktrin nasionalisme (agama) dan pembaruan Islam. Menurut Azyumardi Azra, penggagas pembaruan Islam di Kalimantan Selatan adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812). Karya-karyanya seperti *Sabilal Muhtadin* dan kitab-kitab beliau lainnya menjadi rujukan ulama dan masyarakat Banjar sepeninggal beliau wafat.¹² Salah satu kitabnya di bidang akidah yakni *Tuhfat al-Raghibin* banyak menyoroati beberapa tradisi yang dinilainya menyalahi

10 Kelak dikenal sebagai K.H. Dr. Idham Chalid, seorang ulama, negarawan agamis dan pahlawan nasional.

11 Abdulmuthalib Mohyidin, red., 50 Tahun Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai Kalimantan Selatan 1922-1972, (Amuntai: Yayasan Pemeliharaan Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan, 1973). Lihat juga Rif'an Syaf-ruddin dan Amir Husaini Zamzam, *Tuan Guru Haji Abdurrasyid*, (Amuntai: Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, 2015).

12 Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 327-332.

akidah Islam seperti membuang *pasilih* dan tradisi *manyannggar*.¹³

Pembaruan Islam bertujuan untuk kemajuan umat Islam terbebas dari penjajahan, kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan, seperti yang dilaksanakan oleh *Sekolah Islam Darussalam Martapura*, *Arabische School Banjarmasin*, *Ma'ahad Rasyidiyah Amuntai*, dan *Diniyah Islamiyah di Barabai*, Sekolah Persatuan Perguruan Islam, Sekolah Sarekat Islam, Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Musyawaratutthalibin, dan lainnya.

Terhadap sekolah Islam, Belanda sangat menguatirkan perkembangannya yang cepat. Sekolah pemerintah dimunculkan selain untuk kepentingan mencetak pegawai-pegawai rendahan yang berpendidikan Barat dalam konteks politik etis (politik balas budi) dengan slogan “*irigasi, edukasi dan emigrasi*”, juga merupakan strategi seperti dikatakan van der Prijs – untuk membentengi Belanda dari “volkano Islam”¹⁴ yakni sekolah Islam dan elite agama. Volkano Islam merupakan stigma yang ditujukan terhadap pergerakan Islam yang menurut kalangan penguasa Belanda seolah seperti volkano atau gunung berapi yang semakin aktif dan suatu saat meletus menghancurkan kekuasaan Belanda.

Surat kabar Java Bode melaporkan tentang kecemasan orang-orang Belanda di dalam pemerintahan kolonial, Zending dan Missi mengenai usaha dakwah Islamiyah yang mereka sebut propaganda Islam. Kekuatiran juga ditujukan kepada para Haji yang sampai Perang Dunia I jumlahnya

13 Lihat Rahmadi, M. Husaini Abbas, dan Abd. Wahid, *Islam Banjar Dinamika dan Tipologi Pemikiran Tauhid, Fikih dan Tasawuf*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2012), hlm. 2. Lihat juga, M. Suriansyah Ideham, *et al* (ed.), *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003), hlm. 139-140.

14 Lihat Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm. 122.

semakin meningkat. Persoalannya adalah bukan pada ketatan dan kesalehan, melainkan adanya “social impact” atau sentuhan pengaruh para haji sekembalinya dari tanah suci. Sementara di tanah suci mereka bersentuhan dengan gagasan yang dikembangkan di Mesir yang berkaitan dengan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.¹⁵ Bahkan para haji juga yang memelopori penentangan terhadap “Kerstening Politiek” yang dijalankan Missi dan Zending.

Terhadap sekolah sekolah partikelir atau swasta, Pemerintah Hindia Belanda seringkali menekan, mengawasi sekolah-sekolah partikelir dengan *Wilde Schoolen Ordonnantie*¹⁶ tahun 1932 yang bertujuan untuk mengendalikan perasaan kebangsaan di kalangan pelajar. Berdasarkan ordonansi itu, sekolah partikelir dan guru-gurunya harus minta izin dahulu kepada pemerintah, dan isi pelajarannya tidak boleh melanggar peraturan pemerintah.¹⁷ Jika sekolah partikelir tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam *Wilde Schoolen Ordonnantie* tahun 1932 maka sekolah itu dianggap sekolah liar.

Terhadap guru-guru sekolah Islam, pemerintah beranggapan bahwa pengaruhnya sangat signifikan terhadap siswa-siswanya, karena selain mengajarkan ilmu agama juga menanamkan paham kebangsaan. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925 mengeluarkan sebuah peraturan sebagai bentuk pengawasan terhadap para guru yang mengajarkan agama Islam. Peraturan tersebut dikenal dengan nama *Goeroe Ordonnantie* 1925 (Ordonansi Guru 1925) yang merupakan penyempurnaan dari *Goeroe Ordon-*

15 Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: PT Kartika Tama, 1971), hlm. 14-15.

16 *Wilde Schoolen Ordonnantie* atau Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932 bertujuan untuk mengendalikan perasaan kebangsaan di kalangan pelajar. Berdasarkan ordonansi itu, sekolah partikelir dan guru-gurunya harus minta izin dahulu kepada pemerintah, dan isi pelajarannya tidak boleh melanggar peraturan pemerintah.

17 Sjarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 284-285.

nantie 1905.¹⁸ Melalui ordonansi tersebut guru agama Islam yang hendak melaksanakan pengajaran diwajibkan melapor kepada pemerintah.

Ordonansi Guru 1905 dan Ordonansi Guru 1925 itu lahir dari adanya kekuatiran pemerintah terhadap aktivitas guru agama yang sering bertindak sebagai pelopor munculnya gerakan-gerakan sosial melawan pemerintah kolonial. Dalam menghadapi guru agama, pemerintah sampai-sampai merasa trauma sehingga muncul istilah *Islam phobia* atau *haji phobia*.¹⁹

Ordonansi itu sangat membatasi ruang gerak guru sekolah Islam, padahal untuk menghidupi perguruan Islam tidaklah mudah. Banyak kesulitan yang dihadapi agar tetap berdiri. Diantaranya adalah tentang nasib guru-gurunya. Kehidupan kebanyakan hanyalah bergantung kepada pembayaran murid-murid belaka. Sedikit sekali yang mendapat bantuan dari luar, umpama berupa derma yang diusahakan komite atau usaha-usaha lainnya.

Dari uang pembayaran murid-murid itulah yang umumnya amat rendah untuk nafkah guru-gurunya, untuk membeli kitab-kitab, pembelian kapur tulis, dan sebagainya. Sedang guru-guru, karena mesti di sekolah setiap hari dengan waktu yang tertentu maka kesempatan untuk mencari kehidupan lain, hampir tidak ada.

M Djafrie Zamzam-Kandangan dalam tulisannya berjudul “Memperbaiki Nasib Pergoeroean Islam” di surat kabar Kalimantan Raya melukiskan betapa beratnya tantangan yang dihadapi para guru sekolah Islam.

18 Tugas Tri Wahyono, 2013. “Pengawasan Pemerintah Hindia Belanda Tentang Pengajaran Agama Islam: Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (1912-1942)”. Jurnal Patrawidya Volume 14, Nomor 1, Yogyakarta Maret 2013, hlm. 174-175.

19 Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 31-32; Tugas Tri Wahyono, *Ibid.*, hlm. 175.

Saja tahoe berapa banjak goeroe2 Islam jang hanja berpenghasilan f3, f4, f5 seboelan dari pekerdjaan itoe. Dapat difikirkan sendiri, betapa soelitnja kehidoepan mereka. Apapoela bagi mereka jang telah mempoenjai tangoengan anak dan istri. Tidak tjoekeop...! dan tidak heran kalau goeroe2 itoe tak dapat memboelatkan hatinja dalam memadjoekan sekolah. Lihat, berapa banjak poela sekolah2 Islam jang merana atau terpaksa dimatikan. Sebab dan karenanja tidak lain adalahnafkah goeroe! Sedang kehidoepan persekolahannja, besar sekali pergantengannja kepada tetapnja goeroe2 djangan dikata lagi tentang serba kekoerangan di dalam segala matjam alat.²⁰

Selain sekolah-sekolah sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dilupakan pengajian dan pesantren. Pengajian dan pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang dinilai *indigenous*, asli dan berakar kuat dalam masyarakat.²¹ Oleh karena itu secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keindonesiaan.²² Di Indonesia, istilah pesantren populer disebut pondok pesantren. Secara teknis pesantren adalah tempat santri tinggal dan belajar.²³ Sebelum tahun

20 M Djafrie Zamzam-Kandangan, "MEMPERBAIKI Nasib Pergoeroean Islam", dalam Kalimantan Raya No. 216 Selasa 24 Nopember 2602 Tahoen Ke-I. Disalin sesuai ejaan aslinya.

21 Alfisyah, 2015. "Pengajian Sebagai Model Pengajaran Orang Dewasa Berbasis Kearifan Lokal", dalam Ersis Warmansyah Abbas (Penyunting), 2015. *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. (Banjarmasin: Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bekerjasama dengan Penerbit Wahana Jaya Bandung, 2015), hlm. 120.

22 Mislaini, "Pesantren: Karakteristik Pendidikan dan Unsur-unsur Kelembagaan", dalam Samsul Nizar, et al., *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 113.

23 Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 1.

1960-an, pesantren disebut Pondok, yang barangkali diambil dari bahasa Arab, *funduq*, yang artinya hotel atau asrama.²⁴ Perkataan pesantren bersinonim dengan pondok, karena berasal dari kata santri yang dengan awalan *pe* dan akhiran *an* menjadi pesantren. Baik pondok, pesantren, atau frase pondok pesantren mempunyai arti tempat tinggal para santri.²⁵

Pada umumnya para *tuan guru* di Kalimantan Selatan mempunyai lembaga pendidikan tradisional yang dikenal sebagai “pengajian” yakni sistem pengajaran untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, pada mulanya dilaksanakan di tempat tinggal atau rumah *tuan guru*, tetapi kemudian banyak yang berlangsung di langgar-langgar, surau, atau masjid. Biasa diberikan oleh tuan-tuan guru, sekali atau dua kali seminggu. Ini adalah terutama bagi orang yang dewasa, atau buat orang-orang tua.

Berbagai bentuk pengajian paling awal dapat ditelusuri dari proses Islamisasi Banjarmasin, seperti sejak abad ke-16. Masjid-masjid tua seperti Masjid Sultan Suriansyah, Masjid Palajau, Masjid Sungai Banar, dan Masjid Banua Lawas, Masjid Puain, merupakan tempat pengajian di samping bertempat di rumah Syekh “Mursyid”, dan pengajian dengan sistem lembaga seperti pengajian Datu Ujung-Banua Halat, Pengajian Datu Kandang Haji, Pengajian Datu Kalampayan (Syekh Muhammad Arsyad al Banjary)²⁶ di Dalam Pagar Martapura, dan pengajian yang dilaksanakan datu-datu lainnya.²⁷

24 Zamakhsyary Dhofier, *Op.cit.*, hlm. 377.

25 Secara teknis pesantren adalah tempat santri tinggal dan belajar, lihat Abdurrahman Mas’ud, *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 1.

26 Lebih jauh tentang pengajian pada masyarakat Banjarmasin dapat dilihat dalam tulisan Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 367-380.

27 Lebih jauh lihat Tim Sahabat, *Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan*, (Kandangan: Sahabat Mitra Pengetahuan, 2013).

Dalam Pagar Martapura sangat dikenal sebagai tempat belajar para santri dari berbagai pelosok Kalimantan Selatan sehingga ini banyak menghasilkan ulama-ulama Islam.²⁸ Sepeninggal Datu Kelampayan, pengajian ini diteruskan guru lainnya seperti Tuan Guru H. Kaspul Anwar.

Melalui mengaji duduk, pengajian dan pesantren yang diselenggarakan para *tuan guru* sangat berperan dalam mengembangkan anak didik atau santrinya, bukan hanya dalam bentuk ajaran agama melainkan juga dalam bentuk penanaman kesadaran berbangsa.

Di Kalimantan Selatan, pendidikan Islam berbentuk sekolah atau madrasah banyak diselenggarakan oleh organisasi pergerakan Islam, seperti organisasi Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratutthali-bin, sebagai organisasi Islam terbesar dan berperanan penting dalam pergerakan kebangsaan. Meski disadari pula bahwa terdapat organisasi lokal yang bersifat keislaman dan kebangsaan seperti Jam'iyatul Awqab (1927), Hidayatul Islamiyah, Fathal Islam (1931), dan lainnya.

5.1.1 Sekolah Sarekat Islam

Pada tahun 1914 cabang organisasi Sarekat Islam²⁹ disingkat SI berdiri di Banjarmasin dan mendapat pengakuan badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *besluit* Gubernur Jenderal Nomor 33 tanggal 30 September 1914. Organisasi ini dibawa H.M. Arip (H. Matarip atau H. Muhammad Arip Bakumpai)³⁰ seorang pedagang asal Marabahan yang berdagang pulang pergi antara Jawa dengan Kalimantan.

28 Sebagai contoh Tuan Guru H. Ali Mansur (1880-1950), Tuan Guru H. Usan Husaini (1891-1981), Tuan Guru H. Ismail (1894-1957) asal daerah Rantau pernah belajar di Dalam Pagar Martapura.

29 Sesuai dengan arsip-arsip yang ada organisasi ini ditulis Sarekat Islam, bukan Syarikat Islam atau Sarikat Islam.

30 Pada keterangan foto koleksi Kamaludin (anak H.M. Arip) bertanggal 20 November 1939 di Marabahan dan salinan Ma'loemat National Borneo Conferentie tertulis H.M. Arip, bukan H.M. Arif.

Dari Banjarmasin, SI berkembang di beberapa kota di Kalimantan Selatan. Di kota-kota yang ada cabang SI terdapat gedung kegiatannya yang dikenal dengan sebutan gedung *kalap* (club). Biasanya gedung ini dimanfaatkan pula sebagai tempat kegiatan madrasah yang dikelola SI.

Di Barabai, SI berdiri pada tahun 1921 dengan ketuanya yang pertama dipegang Gusti Muhammad Arif dan Sekretarisnya Habib Alwy. Pada waktu peresmiannya di Barabai langsung dihadiri pendiri Centraal Sarekat Islam (CSI) HOS Cokroaminoto dan Abi Kusno Cokrosoyoso, bertempat di gedung SI di jalan H. Hassan Basry sekarang.³¹

Di Banjarmasin terdapat Gedung Club yakni di Seberang Masjid, dan di gedung inilah SI mendirikan sekolah Islam lima tahun yang diberi nama "*Hadhihil Al-Madrastul Wathoniah*". Mata pelajaran yang diberikan meliputi pengetahuan agama dan sedikit pengetahuan umum. Guru-guru yang mengajar di sini adalah H. Mohammad Said (Kepala Sekolah), Said Idrus (Wakil Kepala Sekolah), dengan guru-guru pembantu Syekh Mohammad bin Amir, H. Makhmud, M. Ideham, M. Pasi, H. Anang Akhmad, H. Abdul Syukur dan H. Hamsyah.

Sekolah Islam yang sama tuanya dengan Sekolah Islam SI adalah *Arabische School* yang kemudian menjadi *Islamsche School* yang didirikan orang-orang Arab, khususnya untuk anak-anak mereka. Salah seorang pemimpin sekolah ini adalah Saleh Bal'ala. Ia sangat dikenal waktu itu, karena selain suka bergaul dengan pemuka masyarakat bumiputera, ia juga anggota SI yang kemudian menjabat ketua Fathal Islam yakni suatu organisasi dakwah Islamiyah, dan juga ketua PKU yakni organisasi filial dari Muhammadiyah.

31 Muderis Zaini dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Hulu Sungai Tengah*, (Barabai: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Tingkat II Hulu Sungai Tengah, 1998), hlm. 38.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, pada tahun 1922 di saat SI dipimpin Mohammad Horman, didirikanlah *Particuliere Hollands Inlandse School* atau HIS Swasta bertempat di Pasar Lama Banjarmasin dipimpin Abdul Gais, dibantu oleh Mansyur Ali Hasan.³²

Di Marabahan, atas dorongan H.M. Arip telah berdiri pula HIS Swasta yang dikelola Sarekat Islam dan di kemudian hari nantinya menjadi Perguruan Taman Siswa. Sedangkan di Kandangan, madrasah Sarekat Islam didirikan di Luklua yang kemudian menjadi Madrasah Islam Pandai.³³

Sekolah Sarekat Islam merupakan bagian dari upaya organisasi Sarekat Islam dalam pergerakan kebangsaan melalui pendidikan untuk mengatasi kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Keberadaannya merupakan bagian dari kebangkitan nasionalisme Islam pada masa awal pergerakan kebangsaan.

5.1.2 Sekolah Persatuan Perguruan Islam

Pada mulanya, sekolah yang diselenggarakan dengan sistem klasikal merupakan peningkatan dari sistem pengajaran yang telah berkembang sebelumnya. Sekolah-sekolah yang berkembang tersebut tidak memiliki hubungan antar yang satu dengan lainnya, baik dari segi administratif maupun pengelolaannya. Tidak hanya itu, meski sama-sama sekolah agama, sekolah tersebut tidak memiliki keseragaman bentuk dan isi kurikulum.

Perjuangan melalui lembaga pendidikan merupakan sarana yang ampuh untuk mencetak dan menumbuhkan kader-kader bangsa. Hal itulah yang dimanfaatkan guru-

32 Sjamsuddin, "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah Fkg Unlam, 1970), hlm. 31-33.

33 Ramli Nawawi ed., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan, 1992), hlm. 54.

guru yang ada di Barabai dengan mendirikan Sekolah *Persatuan Perguruan Islam* (PPI) yang berpusat di Pantai Hambawang.³⁴ Pendirinya adalah alumni Universitas Al Azhar Kairo, diantaranya H. Mansur Ismail, H.M. As'ad, H.A. Hamid Abdulkarim, H. Muhammad Rafi'i, H. Mugeni Marwan, serta alumnus *Madrasah Ash-Sholatiyah* Makkah H.M. Mukri.³⁵

PPI dibentuk dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sekolah-sekolah Islam dan menyeragamkan bentuk serta isi kurikulumnya. Dari Barabai sekolah PPI berkembang di Pantai Hambawang, Haruyan, Jatuh, Birayang, Kandangan, Amuntai, Banjarmasin dan lain-lain. Semuanya berjumlah 36 cabang se Kalimantan Selatan, namun yang terbanyak berlokasi di daerah Barabai.³⁶

Sekolah PPI mempunyai tingkatan pendidikan, yaitu tingkat Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan tingkat Aliyah. Mata pelajaran yang diajarkan selain pengetahuan agama juga ilmu pengetahuan umum. Cara mengajar yang dipergunakan adalah sistem guru vak (guru pemegang pelajaran). Untuk itu, PPI banyak melibatkan tokoh agama untuk bersama-sama membina madrasah PPI, dan setiap guru diberi wewenang untuk memegang mata pelajaran yang disenangi.³⁷

34 Di antara alumni PPI itu antara lain H. Abdul Gani (Pensiunan ABRI, mantan Bupati Hulu Sungai Tengah) dan Idjus Saidi (Komisaris pada staf Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan), lihat Sjarifuddin, *Op.cit.*, 304.

35 Muderis Zaini dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Hulu Sungai Tengah*, Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Tingkat II Hulu Sungai Tengah, Barabai, 1998, hlm. 17.

36 Ahmad Basuni, "Menenal Perjuangan Ummat Islam di Kalimantan, Menuju Kesatuan Tenaga Islam di Dalam RIS", dalam *Almanak Indonesia 1950*, Pustaka Djaja, Bandung, 1950, hlm. 212.

37 Ramli Nawawi ed., *Op.cit.*, hlm. 50-52.

PPI sangat berperan penting dalam menanamkan semangat persatuan, karena dalam proses belajar dan mengajar ditanamkan semangat kesadaran berbangsa dan usaha menghapus penjajahan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika guru-guru PPI banyak yang ditangkap seperti yang terjadi pada sekolah Islam yang diselenggarakan PPI di Birayang.³⁸

5.1.3 Sekolah Muhammadiyah

Perkembangan sekolah Muhammadiyah sejalan dengan perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Paham Muhammadiyah sudah masuk ke Kalimantan Selatan pada tahun 1920-an. Namun organisasi Muhammadiyah baru pertama kali berdiri di Alabio pada tahun 1925.³⁹ Bila bertolak dari masuknya paham pembaharuan, maka proses kedatangan Muhammadiyah bermula sejak 1914 dengan didirikannya sekolah bernama *Arabische School* di Kampung Bugis Banjarmasin yang di kemudian hari menjadi *Islamsche School* sebagai tempat penanaman paham pembaruan oleh perkumpulan orang-orang Arab.⁴⁰

Usaha pertama dari Muhammadiyah cabang Alabio di bidang pendidikan adalah mendirikan sekolah Islam dengan nama *Standaard School* dengan mata pelajaran agama sebagai dasar dan ditambah dengan ilmu pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, sekolah ini menjadi *Vervolgschool met den Qor'an*, dimana pelajaran agama menjadi dasar pendidikan.

Pada tahun 1928 di Alabio berdiri sekolah lanjutan yaitu *Wostha School* dengan lama pendidikan tiga tahun

38 Muderis Zaini, dkk., *Op.cit.*, hlm. 17.

39 M. Syahrani, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (1914-1942)", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hlm. 17.

40 Syarkawi Ruslan, *Op.cit.*, hlm. 65; M. Syahrani, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (1914-1942)", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hlm. 11.

dan merupakan sekolah guru dari perguruan Muhammadiyah. Mereka yang lulus ditetapkan menjadi guru-guru di sekolah-sekolah cabang atau ranting Muhammadiyah lainnya.

Muhammadiyah menekankan kepada pembaharuan pendidikan. Sistem pendidikan tradisional seperti pengajian dan pesantren sangat ketinggalan zaman, sementara sekolah pemerintah yang bersifat sekuler semakin maju dan berkembang dan alumninya mempunyai prospek untuk bekerja di birokrasi pemerintahan. Pesantren menghasilkan ulama, sekolah pemerintah menghasilkan intelektual sekuler.⁴¹ Perbedaan ini menguatirkan terutama cara berfikir alumninya, karena para murid yang dididik di sekolah pemerintah tanpa pendidikan agama Islam alumni sekolah pemerintah memandang agama Islam sebagai merintang kemajuan zaman. Sebaliknya, pihak pengajian dan pesantren memandang belajar di sekolah pemerintah sekolah akan menjadikan muridnya sekuler atau bahkan kafir.

Mengatasi persoalan tersebut, Muhammadiyah membutuhkan guru-guru yang berpengetahuan ganda, tidak hanya mumpuni di pengetahuan agama namun juga mempunyai wawasan pengetahuan ilmiah. Muhammadiyah mengirim guru agama Islam di Sekolah Guru Negeri (Kweek-school) dan juga mendirikan *Madrasah Muallimat* dan *Muallimin*.⁴² Di sekolah ini tidak hanya mengajarkan agama Islam melainkan juga pengetahuan umum. Karena sekolah Muhammadiyah tidak meninggalkan pengetahuan umum, maka sekolah ini mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda, berupa bantuan tenaga guru yang dibesluitkan

41 Tugas Tri Wahyono, 2013. *"Pengawasan Pemerintah Hindia Belanda Tentang Pengajaran Agama Islam: Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (1912-1942)"*. Jurnal Patrawidya Volume 14, Nomor 1, Yogyakarta Maret 2013, hlm. 177.

42 Tugas Tri Wahyono, Ibid.

Muhammadiyah namun gajinya dibayar melalui dana subsidi pemerintah.⁴³

Selain sekolah-sekolah tersebut terdapat pula sekolah lainnya yang didirikan Muhammadiyah, seperti SD Muhammadiyah Teluk Tiram (didirikan tahun 1929), SD Muhammadiyah Kelayan (1932), HIS Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1935 di jalan Kalimantan,⁴⁴ dan HIS Muhammadiyah di jalan Pasar Lama.

HIS Muhammadiyah di jalan Kalimantan⁴⁵ didirikan atas inisiatif H. Masykur dan kawan-kawan di atas tanah wakaf Abdul Galib seorang pedagang besar di Pasar Baru. Pada mulanya Abdul Galib ingin memasukkan anaknya bernama Saleh ke sekolah HIS yang dikelola Pemerintah Hindia Belanda, namun keinginan itu tidak terwujud, karena ---konon kabarnya--- ditolak pihak sekolah dengan alasan Saleh bukan anak pegawai negeri.⁴⁶

HIS Pemerintah itu memang diperuntukkan untuk siswa bumiputera, akan tetapi tidak semua anak bumiputera dapat mengecap pendidikan di sekolah itu. Yang dapat diterima adalah para siswa yang orang tuanya berkategori A yakni kaum bangsawan, pegawai pemerintah berpangkat minimal Asisten Kiai, dan pengusaha kaya yang berpenghasilan bersih di atas 75 gulden sebulan, dan yang berkategori B yakni yang orang tuanya memperoleh pendidikan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dan *Kweekschool* ke atas.

Boleh jadi Abdul Galib mampu menyekolahkan anaknya ke HIS Pemerintah, karena ia seorang pedagang besar dengan penghasilan per bulan mungkin lebih dari 75 gulden. Akan tetapi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan terhadap bumiputera telah mendorongnya untuk mendiri-

43 Ramli Nawawi ed., *Op.cit.*, hlm. 58-59.

44 M. Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 48.

45 Pada saat itu dikenal dengan nama jalan *Militaire Weg*, kemudian menjadi jalan Kalimantan, dan terakhir jalan S. Parman.

46 Hasil wawancara dengan H. Anang Ahmad Nawier, Banjarmasin.

kan sekolah sendiri yang dapat dimasuki segala lapisan masyarakat.

Akhirnya dengan dukungan tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin seperti H. Masykur, H. Muhammad Yasin Amin, H. Ahmad Amin, H. Zamzam Jakfar, dan H. Husnan, didirikanlah HIS Muhammadiyah di atas tanah yang Abdul Galib wakafkan di jalan Kalimantan.⁴⁷

Pada mulanya Pemerintah Hindia Belanda menganggap HIS Muhammadiyah di jalan Kalimantan sebagai sekolah liar. Pemerintah mengatakan sekolah itu tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam “*Wilde Scholen Ordonnantie 1932*”. Tetapi nyatanya, meski dianggap sekolah liar, HIS Muhammadiyah di jalan Kalimantan dapat berkembang pesat seperti halnya sekolah Muhammadiyah lainnya.

Sesuai dengan cita-cita pembaharuan pemikiran, Muhammadiyah mempelopori organisasi pendidikan dan kurikulum yang teratur. Sistem pendidikan menanamkan kepada pengertian, bukan semata hapalan. Oleh karena itu, sumbangan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan cukup besar, khususnya dalam pendidikan Islam di Kalimantan Selatan.

5.1.4 Sekolah Musyawaratutthalibin

Organisasi Musyawaratutthalibin berdiri tanggal 12 Sya'ban 1349 H/2 Januari 1931 M di Banjarmasin.⁴⁸ Untuk melaksanakan ayat 4 pasal 3 Statuten Musyawaratutthalibin

47 Menurut Anang Ahmad Nawier, sesudah selesai Perang Kemerdekaan, HIS Muhammadiyah yang kemudian menjadi Komplek Perguruan Muhammadiyah di jalan S. Parman direnovasi. Yang mempelopori renovasi itu adalah H. Muhammad Ghani seorang pedagang mas dengan tokonya bernama “Toko Banjar”. Ia dikenal sebagai seorang yang amanah sehingga dipercaya untuk menjalankan pengumpulan dana dan penyimpanannya untuk keperluan renovasi.

48 M. Nur Maksum dkk., “Musyawaratutthalibin: Organisasi Islam Lokal Terbesar di Kalimantan Selatan Pada Masa Kebangkitan Nasional”, (Banjarmasin: Balai Penelitian IAIN Antasari, 1991), hlm. 4.

yang berbunyi: “*Mendirikan sekolah2 jang diberi pengadjaran Agama Islam dan ilmoe pengetahoean oemoem*”, maka organisasi Musyawaratutthalibin mendirikan Madrasah Syafi’iyah di hampir semua cabang yang dikenal dengan sebutan Sekolah Musyawarah.⁴⁹

Bahkan di beberapa cabang, Musyawaratutthalibin memiliki gedung sekolah sendiri, antara lain: Normal Islam di Rantau, Sekolah Puteri di Kelua, Qismul Mudarrisin di Kandangan, Madrasah Diniyah di Sungai Tabukan dan Hambuku Hulu, Madrasah Syafi’iyah dan Sekolah Kulliyatul Mu’allimin di Samarinda, Hollands Indonesische Arabische School di Tembilahan, Sekolah Awaliyah dan Ibtidaiyah di Sapat, Madrasah Asy-Syafi’iyah Musyawaratutthalibin di Sungai Pandan Alabio.⁵⁰

Setelah kongresnya yang pertama tahun 1934 di Banjarmasin yang memutuskan mendirikan cabang dan sekolah di berbagai tempat, maka didirikanlah sekolah-sekolah Islam di cabang-cabang Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan dan Timur seperti Banjarmasin, Hulu Sungai, Berau, Bulungan, Tarakan hingga ke wilayah pesisir Timur Sumatera, terutama di daerah komunitas perantauan Banjar berada seperti Sapat, Kuala Tungkal, Enok, Tembilahan, Rengat, Parigiraya, Pulau Palas, dan bahkan sampai ke Pulau Bangka dan Belitung.⁵¹

49 Mohammad Yusran, “Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942”, (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1972), hlm. 48.

50 M. Nur Maksum dkk., *Op.cit.*, hlm. 27-28.

51 M. Nur Maksum dkk., *Ibid.*



Gambar. 13 Elite Islam dari organisasi
Musyawaratutthalibin, Mei 1932.
(Sumber: dok. Keluarga Muhammad Zein)

Sekolah yang terkenal adalah Normal Islam di jalan Keraton Rantau didirikan oleh tokoh-tokoh organisasi Musyawaratutthalibin pada tahun 1931. Sekolah yang tertua setingkat ibtidaiyah terdapat di Lumbu yang disebut Sekolah Arab tahun 1930, dan kemudian diambil alih pengelolaannya oleh Musyawaratutthalibin menjadi Madrasah Hidayah Islamiyah. Pada tanggal 25 Januari 1940 kedua sekolah itu diresmikan menjadi Sekolah Normal Islam Musyawaratutthalibin Rantau. Sekolah itu memiliki dua jenjang pendidikan, yakni Madrasah Ibtidaiyah lama pendidikan 4 tahun, dan Madrasah Tsanawiyah lama pendidikan 3 tahun.

Madrasah Normal Islam setingkat Tsanawiyah merupakan madrasah yang tertinggi di seluruh Kalimantan Selatan, diasuh H. Mahyudin dan tokoh-tokoh agama lainnya di Rantau.⁵² Pelopor dalam pendirian Normal Islam

52 A. Gazali Usman, *Sejarah Perjuangan Rakyat Tapin Periode Revolusi Fisik 1945-1949*, (Rantau: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, 1995), hlm. 44 – 45.

ini adalah H. Hasyim Thaib yang pada waktu itu dikenal sebagai pengusaha karet dan terkenal dengan kedermawannya. H. Hasyim Thaib sangat aktif dalam mengembangkan Normal Islam Rantau bukan saja pemikiran yang beliau sumbangkan melainkan juga berupa materi (uang).

H. Hasyim Thaib mendatangkan guru-guru tamatan dari Pesantren Gontor Ponorogo Jawa Timur sebagai pengajar di Normal Islam. Sebagai pengajar, selain guru lokal juga didatangkan guru seperti Maisyir Thaib guru asal Padang yang mengajar Gontor Ponorogo, Bey Arifin⁵³ alumni dari Islamic College Padang Sumatera Barat dan Khatib Sarbaini yang berasal dari Normal Islam Padang Sumatera Barat.⁵⁴

Selain pengajar yang diambil dari Pesantren Gontor, Normal Islam juga diajar Tuan Guru H. Gazali Kadhi bin H. Muhammad Said. Setelah kedatangannya dari belajar di Mekkah, Tuan Guru Gazali Kadhi diminta untuk mengajar di Normal Islam. Tuan Guru H Gazali Kadhi banyak membimbing murid-murid di Normal Islam untuk pelajaran pidato (muhadarah).

Sekolah Normal Islam berkembang dengan pesat serta cukup terkenal terutama untuk daerah benua lima dan muridnya berasal dari berbagai daerah di Tapin dan juga ada yang berasal dari luar Tapin yaitu dari Kandangan, Barabai dan bahkan ada yang berasal dari Samarinda (Kalimantan Timur). Pendidikan yang dikembangkan dalam Normal Islam berbagai ilmu pengetahuan agama dan dikembangkan juga pelajaran bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris dan Belanda. Dalam pendidikan yang dikembangkan di Normal

53 Dengan menumpang kapal *Slout van Dieman* Maisyir Thaib (19 tahun) dan Bey Arifin (22 tahun) berangkat dari Jawa ke Banjarmasin untuk kemudian terus ke Rantau untuk mengajar di Sekolah Normal Islam dengan gaji yang dijanjikan sebesar f. 25 dan bisa mendapatkan f.25 lagi jika mengajar lagi di malam hari, misalnya memberikan kursus bahasa Inggris. Meski sebagian muridnya sudah ulama, mereka yang berusia muda itu cukup cakap menunaikan tugasnya, lihat M. Nur Maksum dkk., *Op.cit.*, hlm. 46.

54 Ramli Nawawi ed., *Op.cit.*, hlm. 560.

Islam salah satunya pelajaran mengenai pidato (muhadarah), makanya para alumni dari Normal Islam banyak yang menjadikan/mencetak para ustad dan ustadzah sebagai penceramah agama.

Pendirian Normal Islam dilakukan pada masa penjajahan Belanda, makanya Normal Islam cukup disegani dan berpengaruh dalam pergerakan untuk menuju kemerdekaan. Karena Normal Islam dalam pelajarannya banyak menganjurkan pentingnya kesadaran kepada para murid untuk bangkit dari penjajahan bangsa asing, maka pimpinan Normal Islam pada waktu itu yang dipimpin oleh ustad Maisyir ditangkap Belanda.

Sebagai pengganti pimpinan Normal Islam yang ditinggalkan ustad Maisyir Thaib, maka Tuan Guru H. Mahyudin ditunjuk sebagai pimpinan sekaligus pengasuh Normal Islam. Pada masa pendudukan Jepang yang dimulai tahun 1942, perkembangan Normal Islam mulai menurun karena para pengajarnya dikembalikan ke Sumatera oleh Jepang. Hanya yang masih bertahan di Normal Islam adalah ustad Khatib Sarbaini yang merupakan menantu dan Tuan Guru H. Mahyudin. Setelah di Normal Islam, Khatib Sarbaini pindah ke Banjarmasin dan beliau mendirikan Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP). Beberapa tahun di Banjarmasin, ustad Khatib Sarbaini diminta untuk mengajar di Pontianak Kalimantan Barat. Akhirnya ustad Khatib Sarbaini menetap di Pontianak Kalimantan Barat sampai beliau meninggal dunia dan dikuburkan di Pontianak.

Normal Islam merupakan pelopor pada masa pergerakan dan setelah kemerdekaan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang menginginkan lepas dari penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan 1945 makanya pada masa penjajahan Belanda, pimpinan Normal Islam yaitu ustad Maisyir Thaib ditangkap Belanda karena dianggap dapat membahayakan mereka di Rantau. Kemudian pada masa

pendudukan Jepang, Normal Islam diawasi Jepang dan para pengajarnya di pulangkan ke Sumatera.

Dalam mempertahankan kemerdekaan, Tuan Guru H. Mahyudin ikut serta mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan Selatan. Beliau dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan tergabung pada Mandau Telabang Kalimantan Indonesia (MTKI). Kelompok ini banyak bergerak di daerah Banjarmasin, Kertak hanyar dan Gambut. Banyak pejuang Rantau yang tergabung dalam Mandau Telabang Kalimantan Indonesia (MTKI) dan komandan MTKI waktu itu adalah Abrani Sulaiman.

Di cabang Musyawarutthalibin Samarinda terdapat sekolah Musyawarah yang terdiri dari tujuh kelas, yang dikepalai H. Majedi Effendi dibantu Parhan Hasan dari Banjarmasin. Di sekolah ini, pendidikan agama diajarkan dengan cara yang lebih modern. Jika sebelumnya guru agama mengajar dengan memakai sarung, maka H. Majedi Effendi mengajar dengan memakai celana panjang dan berdasi. Bahasa Arab sangat ditekankan waktu itu, akan tetapi bahasa Inggris dan Belanda juga harus dikuasai, sebagaimana pesan yang merupakan peribahasa H. Majedi Effendi yang disampaikan kepada murid-muridnya waktu itu, yaitu:

*Kalau kamu ingin menjadi ulama, kamu tidak usah sekolah terlalu tinggi; tetapi kalau kamu ingin menguasai dunia, maka kamu perlu menguasai bahasa Belanda dan Inggris.*⁵⁵

Anjuran tidak perlu sekolah tinggi untuk menjadi ulama tidak juga dapat dibenarkan. Namun dibalik anjuran itu dapat dipahami bahwa untuk menjadi maju, berpengetahuan, dan pergaulan luas maka penguasaan bahasa sangatlah diperlukan.

55 M. Nur Maksum dkk., *Op.cit.*, hlm. 49.

5.2 Pengajian dan Pesantren

Selain sekolah-sekolah tersebut di atas, tidak dapat dilupakan pengajian dan pesantren. Pengajian dan pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang dinilai indigenous, asli dan berakar kuat dalam masyarakat.⁵⁶ Oleh karena itu secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keindonesiaan.⁵⁷ Di Indonesia, istilah pesantren populer disebut pondok pesantren. Secara teknis pesantren adalah tempat santri tinggal dan belajar.⁵⁸ Sebelum tahun 1960-an, pesantren disebut Pondok, yang barangkali diambil dari bahasa Arab, *funduq*, yang artinya hotel atau asrama.⁵⁹ Perkataan pesantren bersinonim dengan pondok, karena berasal dari kata santri yang dengan awalan *pe* dan akhiran *an* menjadi pesantren. Baik pondok, pesantren, atau frase pondok pesantren mempunyai arti tempat tinggal para santri.⁶⁰

Pada umumnya para *tuan guru* di Kalimantan Selatan mempunyai lembaga pendidikan tradisional yang dikenal sebagai “pengajian” yakni sistem pengajaran untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, pada mulanya dilangsungkan di tempat tinggal atau rumah *tuan guru*, tetapi

56 Alfisyah, 2015. “Pengajian Sebagai Model Pengajaran Orang Dewasa Berbasis Kearifan Lokal”, dalam Ersis Warmansyah Abbas (Penyunting), 2015. *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. (Banjar-masin: Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bekerjasama dengan Penerbit Wahana Jaya Bandung, 2015), hlm. 120.

57 Mislaini, “Pesantren: Karakteristik Pendidikan dan Unsur-unsur Kelembagaan”, dalam Samsul Nizar, et al., *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 113.

58 Abdurrahman Mas’ud, *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 1.

59 Zamakhsyary Dhofier, *Op.cit.*, hlm. 377.

60 Secara teknis pesantren adalah tempat santri tinggal dan belajar, lihat Abdurrahman Mas’ud, *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 1.

kemudian banyak yang berlangsung di langgar-langgar, surau, atau masjid. Biasa diberikan oleh tuan-tuan guru, sekali atau dua kali seminggu. Ini adalah terutama bagi orang yang dewasa, atau buat orang-orang tua.

Berbagai bentuk pengajian paling awal dapat ditelusuri dari proses Islamisasi Banjarmasin, seperti sejak abad ke-16. Masjid-masjid tua seperti Masjid Sultan Suriansyah, Masjid Palajau, Masjid Sungai Banar, dan Masjid Banua Lawas, Masjid Puain, merupakan tempat pengajian di samping bertempat di rumah Syekh “Mursyid”, dan pengajian dengan sistem lembaga seperti pengajian Datu Ujung-Banua Halat, Pengajian Datu Kandang Haji, Pengajian Datu Kalampayan⁶¹, dan pengajian yang dilaksanakan oleh datu-datu lainnya.⁶²

Contoh lainnya, dapat disebut nama dan Tuan Guru Syekh Salman Al Farisi di desa Gadung, Tapin yang membuka pengajian dengan cara muzakarah (diskusi) mengenai keagamaan bertempat di langgar (musala) yang di sampingnya dibikin kamar-kamar.⁶³ Di kamar inilah para murid yang jauh menginap. Dengan demikian menuntut ilmu dapat dilakukan siang dan malam karena tempat mengaji dan tempat menginap menjadi satu.

Sistem yang sama juga ada pada pengajian yang dipimpin Tuan Guru H. Ahmad Barwawi (1882-1942) bertempat di langgar (musala) di desa Pabaungan, Tapin. Langgar yang beliau bangun dengan bentuk bertingkat yang digunakan disamping sebagai tempat untuk salat melainkan juga sebagai tempat pengajian (belajar) bagi murid beliau. Bentuk langgar bertingkat ini merupakan inisiatif beliau agar murid-murid beliau yang jauh dapat menginap di

61 Lebih jauh tentang pengajian pada masyarakat Banjarmasin dapat dilihat dalam tulisan Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 367-380.

62 Lebih jauh lihat Tim Sahabat, *Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan*, (Kandangan: Sahabat Mitra Pengetahuan, 2013).

63 Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin, *Op.cit.* hlm. 62-63.

langgar (musala) dan tidak perlu pulang ke rumah. Lantai atas digunakan untuk beristirahat sedangkan lantai bawah digunakan untuk salat dan pengajian yang dipimpin Tuan Guru Ahmad Barwawi.⁶⁴ Apabila habis persediaan makanan maka para murid akan pulang mengambil perbekalan, dan Tuan Guru Ahmad Barmawi memberikan pengajian secara ikhlas semata mengharapkan keredhaan Allah SWT semata.

Berbeda dengan Tuan Guru Ahmad Barwawi yang menggunakan langgar sebagai tempat pengajian, tokoh ulama lainnya yakni Tuan Guru H. Ali Mansur (1880-1950) menggunakan rumah beliau sebagai tempat pengajian. Rumah dibuat kamar-kamar untuk para santri yang mengikuti pengajian. Biasanya diisi para santri yang tempat tinggalnya jauh. Banyak tantangan yang dihadapi Tuan Guru H. Ali Mansur saat membuka pengajian kepada masyarakat seperti pernah dipukuli orang Belanda bersama kaki tangannya.⁶⁵

Pengajian lainnya dapat disebut nama Syekh atau Datu Qadhi Haji Abdusamad Bakumpai bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Marabahan. Beliau menggunakan tempat tinggal sebagai tempat pengajian, namun karena banyak orang dari berbagai daerah untuk belajar, sehingga tidak bisa menampung mereka, maka di pinggir sungai depan rumah dengan nama langgar Bani Arsyadi (kini Bani Arsyadi I) dan membangun balai sebagai tempat masyarakat belajar ilmu agama.⁶⁶

64 Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin, *Tapin Bertabur Ulama*, (Rantau: Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2007), hlm. 36. Tuan Guru H. Ahmad Barmawi boleh dikatakan sebagai salah satu pelopor pendidikan Islam dengan menggunakan seperti pondok pesantren di Kabupaten Tapin. Banyak murid-murid beliau yang menjadi ulama besar, dan ulama-ulama tersebut membuka majelis ta'lim di desa-desa para ulama tinggal.

65 Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin, *ibid.*, hlm. 44-45.

66 Lihat Hendraswati, Wajidi, Zulfa Jamalie, *Peranan Qadhi Abdusshamad Dalam Penyebaran Islam Pada Masyarakat Dayak*

Sepeninggal Abdusshamad, pengajian itu diteruskan anaknya Qadhi Muhammad Jafri. Beliau membangun langgar Bani Arsyadi II yang juga difungsikan sebagai tempat pengajian, disamping melakukan *rihlah* atau perjalanan dalam rangka silaturahmi dan berdakwah, terutama sekali apabila diundang orang yang punya hajatan, memperingati hari besar Islam yang diisi dengan ceramah agama di langgar (musala) dan masjid.

Pelajaran yang diberikan para *tuan guru* dalam pengajian adalah ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Selain itu ada pula yang mempelajari bahasa Arab secara pasif, di samping pelajaran membaca Alqur'an dan Hadits. Kitab yang digunakan pada umumnya adalah kitab berbahasa Arab dan dibawa oleh *tuan guru* yang pernah belajar di Mekkah. Kitab itu dikenal sebagai Kitab Kuning. Dalam perkembangannya digunakan pula kitab beraksara Arab berbahasa Banjar atau Melayu, sehingga disebut kitab berbahasa Arab Melayu, sebagaimana kitab-kitab yang ditulis Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Pengajian yang umum berlangsung adalah dengan cara guru membacakan dan menguraikan isi kitab, sedangkan murid-muridnya memegang kitab yang sama dan diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Ada pula yang disebut “mengaji duduk” seperti yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari kepada anak cucunya, agar sampai kelak mewarisi kealiman bapaknya. Di samping itu, adapula pengajian *maahad* karena dilaksanakan pada hari ahad (minggu), atau *manyanayan*, *manyalasa*, *maarba*, *mangamis*, *manjumahat*, dan *manyabtu* sesuai dengan nama hari pelaksanaan pengajian, yang mana murid hanya mendengarkan saja dan tidak menggunakan kitab, sedangkan guru menguraikan isi kitab yang dibacanya.⁶⁷

Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala, (Yogyakarta: Kepel Press-BPNB Pontianak, 2014), hlm. 79.

67 Ramli Nawawi ed., *Op.cit.*, hlm. 14.

Untuk menjadi ulama, ahli Qur'an, Hadits, dan sebagainya diperlukan beberapa orang guru yang waktu mengajinya memakan waktu puluhan tahun, bahkan kadang-kadang dilanjutkan di Mekkah. Mereka yang kembali, kemudian menjadi *tuan guru* yang memberikan pengajian di rumah atau di langgar-langgar.

Melalui mengaji duduk, pengajian dan pesantren yang diselenggarakan para *tuan guru* sangat berperan dalam mengembangkan anak didik atau santrinya, bukan hanya dalam bentuk ajaran agama melainkan juga dalam bentuk penanaman kesadaran berbangsa. Tuan guru, atau kyai umumnya di Indonesia oleh penduduk dianggap orang suci, karomah, dan kekuatan gaib. Karena tingginya kehormatan para tuan guru, maka dengan mudahnya mereka membangkitkan gerakan pemberontakan. Apalagi jika tuan guru bekerjasama dengan pemimpin pemberontakan maka akan sangat membahayakan pemerintah Hindia Belanda.

Berbagai pemikiran, fatwa, konsep, atau doktrin yang berkaitan dengan nasionalisme (agama) seperti jihad, perang fii sabilillah, amar makruf nahi munkar, serta cinta tanah air sebagian dari iman (*hubbul wathon minal iman*) yang disampaikan *tuan guru* sangat berpengaruh di masyarakat. Seringkali para *tuan guru* tidak sekedar mengajar, melainkan juga “membakar” santrinya agar lebih mencintai tanah airnya.

Sekiranya pemerintah Belanda menyadari betul tentang hal ini. Sebagaimana dikatakan Raffles bahwa para kiai ternyata selalu aktif dalam berbagai pemberontakan, sebagaimana ia lihat di Jawa dan Minangkabau.⁶⁸ Sebagaimana dikatakan Adhyaksa Dault bahwa resistensi melalui ideologi jihad merupakan salah satu ciri khas gerakan sosial akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan basis keagamaan, yakni perang jihad. Basis nilai itu mampu menyihir masyarakat tradisional untuk melakukan gerakan massa, karena misi ideologis jihad adalah perang melawan

68 Nur Huda, *Op.cit.*, hlm. 99.

ketidakadilan dan kekafiran yang dijamin masuk surga bagi bersedia berkorban untuk perang suci itu.⁶⁹

H. Kraemer mengemukakan meski Belanda melakukan pembatasan-pembatasan, kenyataannya Islam justru menjadi daya tarik utama sebagai wadah perjuangan melawan penjajah Belanda selama tiga setengah abad.⁷⁰ Gambaran itu setidaknya pernah terjadi pada Perang Banjar yakni ketika Penghulu Rasyid sebagai seorang pimpinan agama mengorbankan semangat juang, sebagai gerakan *Baratib Baamal*⁷¹ yang berpusat di masjid dan langgar untuk membela Kerajaan Banjar yang dijajah Belanda. Perjuangan Penghulu Rasyid hanyalah satu dari contoh dari banyaknya perlawanan dan pemberontakan serupa yang terjadi di Nusantara yang melibatkan pimpinan agama, pengajian atau pesantren. Pada masa revolusi fisik banyak tokoh perjuangan lulusan pesantren seperti Idham Chalid dan Haji Hasbullah Yasin keduanya adalah lulusan Pesantren Ma'ahad Rasyidiyah Amuntai. Idham Chalid juga diketahui pernah mengaji kepada Tuan Guru H. Sagir di desa Lok Bangkai Amuntai.⁷² Nama lainnya, seperti Zafry Zamzam yang dikenal sebagai tokoh wartawan, dan Hassan Basry sebagai Komandan dan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan adalah lulusan Pesantren Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, satu almamater dengan gurunya Idham Chalid. Selain menjadi anggota PRI di Banjarmasin,

69 Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme, Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka Al –Kautsar, 2005), hlm. 31.

70 Lihat Zamakhsyary Dhofier, *Op.cit.*, , hlm. 21.

71 Secara etimologis *Baratib Baamal* terdiri dari dua kata, yaitu *baratib* yang berarti *berdzikir* dan *Baamal* yaitu melakukan perbuatan atau *berdoa* untuk memohon *kebaikan*. Berdasarkan kenyataan aksi Baratib Baamal lebih cenderung dianggap sebagai khalwat dalam usaha memohon keselamatan untuk memerangi orang kafir, lihat P.J. Veth dan A. Gazali Usman dalam M. Suriansyah Ideham, *et al* (ed.), *Op.cit*, hlm. 204-205.

72 Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 59.

Idham Chalid memimpin Sermi di Amuntai, anggota SOPIK, ALRI Divisi IV, dan anggota Dewan Banjar.⁷³

Para tuan guru seringkali mempunyai maunah, karomah, dan kemampuan supranatural seperti diyakini bahwa doa-doa mereka akan dikabulkan. Oleh karena itu para pejuang kemerdekaan seringkali mendatangi para tuan guru untuk meminta doa agar diberikan keselamatan dalam membela tanah air, kepada para pejuang datang diberi *rajah* badan atau baju agar terhindar dari niat jahat, tidak terkena peluru. Kemampuan merajah diperlihatkan Tuan Guru H. Zainal Abidin di Gadung Tapin, dan juga Tuan Guru H. Sagir kepada pejuang kemerdekaan Martinus pimpinan Pasukan Banteng Buas, dan Suriani Batung (Pembalah Batung).⁷⁴

Contoh lain adalah Tuan Guru H. Mahyudin (1900-1970) asal Banua Padang Rantau yang membuka pengajian di berbagai tempat, masjid, langgar atau desa-desa yang menghajatkan beliau pernah berpesan agar orang Islam tidak mudah dipermainkan bangsa asing yang waktu itu masih dijajah Belanda dan kemudian Jepang. Dalam hal pendidikan Islam patut dicatat peran Tuan Guru H. Mahyudin dalam pendidikan Islam. Setelah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Islam di Rubat, sekarang menjadi Masjid Baiturrahman Rantau, beliau mendirikan sekolah yang lebih tinggi lagi yakni Sekolah Normal Islam pada tahun 1940.⁷⁵

73 Sebagian peran Idham Chalid dalam perjuangan kemerdekaan dapat dilihat dalam tulisan Nur Hidayatullah, *Idham Chalid Dimensi Spritual Negerawan Agamis*, (Amuntai: Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, 2016).

74 Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 52.

75 Ahmad Gazali Usman dan M. Syarifuddin, *Op.cit.* hlm. 95.

BAB VI

ANALISIS PERANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN

Sebagaimana telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, agama Islam memegang peranan penting dalam perkembangan nasionalisme. Secara faktual dapat dilihat dalam berbagai bentuk peran elite agama dan fungsi pendidikan Islam pada masa pergerakan seperti memberantas kebodohan dan mencerdaskan umat, menjadikan muslim yang beriman dan bertakwa, menanamkan kesadaran kebangsaan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Pendidikan Islam yang dibangun oleh para elite agama Islam telah berkontribusi terhadap upaya pencarian identitas dan ikatan solidaritas nasional, karena pendidikan telah membuat orang menjadi semakin rasional. Peran pendidikan Islam ini diperkuat oleh kapitalisme cetak. Sebagaimana dikatakan oleh Benedict Anderson, bahwa nasionalisme Indonesia beriringan dengan berkembangnya *print capitalisme*, terutama surat kabar dan majalah, maka dapat dipahami betapa besarnya peran bahasa-bahasa cetak dalam membentangkan landasan bagi kesadaran nasional.¹

Di sini peran pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pun swasta termasuk pendidikan Islam berkorelasi dengan media massa. Para guru dan santri dapat mengetahui perkembangan dunia luar, karena mereka

1 Benedict Anderson, *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*, (Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2008), hlm. hlm. xxi, 66-67, 175-178.

menjadikan media cetak seperti buku, surat kabar dan majalah sebagai sumber informasi.

Berbagai bentuk bahasa cetak seperti buku, surat kabar dan majalah itu hanya dapat dipahami oleh kalangan terpelajar. Melalui dunia pendidikan dan perpustakaan mereka ini mengenal huruf latin, memiliki kebiasaan membaca buku, koran atau majalah, dan mengenal dunia lain di luar tanah Hindia. Mereka juga mengenal faham-faham kebebasan, kesetaraan, dan *liberti*, *egalite*, dan *fraternite* sebagaimana terdapat dalam kredo Revolusi Perancis. Karena adanya pendidikan itulah, mereka mempunyai wawasan dan pola pikir yang lebih maju dibanding dengan kebanyakan masyarakat awam, sehingga lebih memiliki kesadaran akan rasa kebangsaan yang mereka tuangkan dalam berbagai bentuk, baik melalui tulisan, mengajar, maupun sebagai pengurus organisasi pergerakan.

Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, namun juga menjadi medium yang baik untuk meletakkan pengaruh pada publik.² Dalam konteks meletakkan pengaruh pada publik, maka keberpihakan media massa dalam mendukung nasionalisme Indonesia dapat dilihat dari berbagai fungsi atau perannya dalam memajukan peradaban, penyebar informasi dan ide-ide kebangsaan, mengukuhkan kesadaran, media penyampaian sikap politik, kritik, dan agitasi dan sebagainya yang merupakan bagian dari pergerakan nasional di daerah ini. Peran itu dimainkan oleh dimainkan oleh wartawan dan penulis artikel yang pada umumnya adalah aktivis pergerakan.

Contoh fungsi media sebagai penumbuh kesadaran terlihat ketika majalah *Malam Djoema'* terbitan tanggal 24 November 1927 dengan judul "Perasaan Bandjar Totok". Amir Hasan Bondan membandingkan pemberitaan *Malam*

2 Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 108.

Djoema'at dengan koran yang ia baca di Jawa, dan ternyata menurutnya terdapat persamaan antara isi surat kabar di Jawa dengan Borneo yang sama-sama hangat bunyinya. Dalam tulisannya itu, Amir Hasan Bondan juga menganjurkan perlunya anak-anak Banjar bersekolah dan bergotong royong mengadakan sekolah bagi kaum perempuan seperti yang ia lihat di Jawa.

Peran pendidikan Islam, dalam konteks pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan pendidikan Islam (pengajian, pesantren, sekolah Islam atau madrasah) dan oleh elite agama dan organisasi Islam. Hal ini selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang peranan (*role*)³ sehingga pendidikan Islam pada masa pergerakan kebangsaan yang melaksanakan fungsinya sesuai kedudukannya sebagai lembaga bertujuan untuk mencerdaskan, menanamkan iman dan takwa, serta kesadaran berbangsa maka berarti pendidikan Islam itu menjalankan suatu peranan.

Melalui pendidikan Islam dapat dilihat hubungannya dengan kebangkitan nasionalisme karena melalui pengajian, pesantren, sekolah atau madrasah, para tuan guru atau guru-guru agama dapat menumbuhkan kesadaran, menggerakkan, menginformasikan tentang pergerakan kebangsaan, meyakinkan (persuasi), menyadarkan, mengukuhkan dan mengubah pemikiran, dan mempropagandakan semangat kebangsaan kepada santri atau peserta didik.

Perjuangan para tuan guru atau guru-guru agama melalui pendidikan adalah sebuah upaya untuk mengangkat rakyat pribumi dari kebodohan dan keterbelakangan. Upaya melalui jalur pendidikan dapat dilihat dari beberapa bentuk. Ada yang berupa pengajian, pesantren, madrasah, atau bahkan kursus-kursus keterampilan. Kursus ini bertujuan mendidik masyarakat agar mempunyai keterampilan

3 Lihat Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 210-211.

sebagai usaha penopang ekonomi keluarganya kelak. Kursus keterampilan itu umumnya bersifat kerajinan tangan seperti kursus pertanian, menyulam, pertukangan, dan anyaman rotan. Kursus seperti itu merupakan bagian dari perjuangan untuk meningkatkan keterampilan dan mengangkat ekonomi rakyat.



Gambar. 14 Kursus Bagian Pertanian di Barabai
“Landbouwklassse Barabai Cursus 1940-1941”
(Sumber: dok. H. Abdul Muis).

Keberadaan sekolah Islam atau madrasah yang mereka bangun merupakan sebuah resistensi dan sekaligus kompetisi terhadap pendidikan Pemerintah Hindia Belanda, *misionaris-zending*, dan kelompok Timur Asing, khususnya Cina. Sebagaimana dikatakan bahwa pengertian nasionalisme tidak selalu identik dengan perlawanan terhadap penjajah, namun ia sebuah kerja keras untuk bisa bangkit dari segala keterbelakangan, di antaranya adalah melalui pendidikan.

Madrasah yang dikelola oleh organisasi-organisasi Islam adalah bentuk sistem persekolahan yang yang memadukan pola-pola pendidikan Barat dan Islam. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, latar belakang kemunculan

madrasah adalah karena adanya pandangan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional (pengajian dan pesantren) dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat, dan adanya kekuatiran atas kecepatan perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Oleh karena itu, para reformis kemudian menyeimbangkan pendidikan Islam dan umum dalam sekolah Islam yang disebut madrasah. Melalui madrasah, para elite Islam yang berpikiran progresif berkeyakinan bahwa umat Islam bisa lebih maju jika mendapatkan pendidikan.

Banyak elite Islam yang menjadi motor dan aktivis pergerakan atau menjadi guru sekolah Islam seraya menanamkan kesadaran kebangsaan. Boleh jadi, keterlibatan mereka dalam pergerakan didorong oleh adanya kesadaran tentang beratnya kehidupan rakyat yang terjajah, adanya diskriminasi, dan rendahnya emansipasi masyarakat pribumi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hukum.

Sebagai aktivis atau motor pergerakan kebangsaan yang sering berseberangan dengan pemerintah dan aparat kolonial, peranan elite Islam pada awal pergerakan di Kalimantan Selatan sangatlah menonjol. Para tuan guru, guru-guru agama, dan para haji yang memposisikan diri berlawanan dengan pemerintah kolonial dapat dikategorikan sebagai “elite tandingan” atau *counter elite*. Kemunculannya seiring menurunkan kewibawaan elite tradisional yakni *ambtenaar* dari kalangan kiai dan keturunan bangsawan Banjar. Menurut M.Z. Arifin Anis, para elite tandingan yang diaktori oleh para tuan guru, para haji dan pribadi yang dianggap oleh pendukungnya mempunyai sifat *ketuahan* (adikodrati) mempunyai pengetahuan luas dan mendalam tentang agama, ditunjang oleh sikap moral yang terpuji, dan kemampuan lain yang melekat pada dirinya, menjadikan mempunyai kedudukan

yang terpendang, berwibawa, dan dihormati masyarakat, dan tidak jarang mereka juga dianggap sebagai Wali Allah.⁴



Gambar. 15 Sekolah Agama Islam untuk memajukan pendidikan masyarakat di Pulang Pisau.

(Sumber: repro. Kempen “Kalimantan”).

Mengacu kepada teori pelapisan sosial maka kewibawaan *tuan guru* dapat dilihat dari latar belakang *ascribed-status* yakni keturunan orang berpengaruh, seperti keturunan langsung dari ulama terkemuka, atau juga karena memiliki *achieved-status* yakni kedudukan yang ia capai sebagai ulama yang berperanan besar (*role*) dalam syiar Islam di dalam masyarakat.⁵ Atau bisa pula karena ia juga seorang haji. Menurut Rosihan Anwar, di antara haji ada yang telah mendapatkan gagasan pembaruan dari Mesir, dan ketika kembali ke tanah air menyebarkan pikiran-pikiran dan gagasan baru itu. Menurutnya

4 Lihat M.Z. Arifin Anis, *Elite Tandingan dan Gerakan Massa di Kalimantan Tenggara Bagian Selatan Pada Abad XIX* (Bahan Ajar Muatan Lokal), dalam *Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan Vidya Karya* Tahun XXI, Nomor 1, April 2003, hlm.91.

5 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Op.cit.*, hlm. 216-222.

betapa semua itu dikuatirkan oleh kekuasaan kolonial Hindia Belanda.⁶

Dalam masyarakat Islam tradisional, dalam sosok *tuan guru* melekat karomah. Karomah di sini adalah pemberian khusus berupa kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih, atau kepada hamba-Nya yang telah bersih jiwa dan rohaninya. Dalam konteks ini maka tak mengherankan bahwa seorang *tuan guru* karomah, tutur katanya diikuti. Ia mempunyai kemampuan memberi air penawar, *merajah* badan untuk keselamatan, memagari kampung dengan doa-doa, atau bahkan memobilisasi massa melalui pengajian, tarekat dan khotbah-khotbah yang memuat anjuran dan fatwa dan atau doktrin bahwa cinta tanah air sebagian dari iman (*hubbul wathon minal iman*).

Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa agama Islam terbukti dapat berfungsi sebagai lambang pemersatu sekaligus sebagai ideologi politik sehingga menimbulkan kekuatan politik yang luar biasa.⁷ Sedangkan Harsono Tjokroaminoto mengatakan Islam adalah landasan utama nasionalisme.⁸ Islamisme dan nasionalisme adalah dua sendi utama sebagai alat pengikat persatuan bangsa. Pendapat Sartono itu dapat dilihat bahwa ketika Islam menjadi ideologi maka perlawanan terhadap kolonial menjadi masif dan radikal. Ini terjadi karena para *tuan guru* tidak sekadar mengajar, melainkan juga “membakar” santrinya agar lebih mencintai tanah airnya, memberikan fatwa bahwa berjuang di jalan Allah (*fii sabilillah*) adalah jihad. Banyak *tuan guru* yang melibatkan diri dalam perjuangan bersenjata pada masa revolusi kemerdekaan

6 Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: PT Kartika Tama, 1971), hlm. 15

7 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1988/1999), hlm. 94-95.

8 Harsono Tjokroaminoto, *Menelusuri Jejak Ayahku*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1983), hlm. 56.

1945-1950. Tuan Guru H. Gazali Kadhi dan Haji Hasbullah Yasin yang telah mengeluarkan fatwa adalah sedikit contoh dari banyaknya peran tuan guru dalam perjuangan kemerdekaan.

Sebagaimana dikatakan di muka, bahwa banyak elite agama yang berperan sebagai motor, pelopor atau aktivis pergerakan kebangsaan. Mereka yang berada di dalam organisasi pergerakan Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratutthalibin menjadikannya sebagai wadah perjuangan. Mereka sebagai nasionalis lokal mendapat ide-ide kebangsaan dan menunjukkan ikatan solidaritas kebangsaan dengan berbagai cara dan jalur seperti melalui pendidikan, organisasi kebangsaan, media massa, atau melalui kontak-kontak dengan tokoh nasionalis khususnya dari Jawa dan Sumatera.

Sarekat Islam sebagai organisasi Islam pertama merupakan inspirasi bagi perkembangan organisasi berikutnya. Organisasi ini berperan memperjuangkan rakyat. Misalnya, bagaimana ketika organisasi ini melalui Kongres Sarekat Islam tanggal 14 sampai 16 April 1923 menelorkan sejumlah Mosi Kongres yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda agar menghilangkan diskriminasi terhadap masyarakat pribumi.⁹ Atau organisasi Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan pembaruan Islam agar umat Islam bangkit dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan melalui berbagai upaya pembaruan pemikiran, pembangunan sekolah, panti asuhan, rumah sakit, musala dan masjid. Atau organisasi Musyawaratutthalibin sebagai sebuah organisasi kaum terpelajar yang menghendaki persatuan Islam karena adanya pertentangan antara “kaum tua” dan “kaum muda”. Kesemuanya itu merupakan ekspresi kebangkitan bangsa Indonesia untuk bebas dari penderitaan.

9 Sjamsuddin “*Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942*”,

Karena peran penting organisasi Islam di awal pergerakan, maka pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan diawali dengan nasionalisme Islam. Islam dan nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan merupakan satu kesatuan erat yang saling mengisi. Islam menurut J.M. Pluvier sebagai suatu “pra-nasionalisme”, dan menurut W.F. Wertheim menunjukkan peranan Islam di dalamnya.¹⁰ Rosihan Anwar yang melihat peran besarnya peran organisasi Sarekat Islam pada awal pergerakan, mengatakan: “*pelopor gerakan nasionalisme, gerakan membebaskan diri dari kolonialisme-imperialisme Belanda ialah Islam. Tariklah pelajaran ini dari sejarah Indonesia*”.¹¹

Menurut Bambang Purwanto¹² nasionalisme tidak identik dengan perlawanan terhadap penjajah, namun ia sebuah kerja keras untuk bisa bangkit dari segala keterbelakangan. Nasionalisme Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang baik itu politik, sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan dan budaya. Nasionalisme Islam adalah juga bagaimana memajukan umat agar terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Selaras dengan apa yang dikatakan Anthony Reid dan Benedict Anderson bahwa nasionalisme berkaitan dengan proses pencarian identitas dan ikatan solidaritas.¹³ Di Kalimantan Selatan, para nasionalis termasuk elite

10 Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: PT Kartika Tama, 1971), hlm. 27-28.

11 Rosihan Anwar, *Ibid.*, hlm. 28.

12 Syaharuddin, *Orang Banjar Menjadi Indonesia: Dinamika Organisasi Islam di Borneo Selatan, 1912-1942*, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2009), hlm. 15.

13 Lihat kembali Anthony Reid, “Jejak Nasionalis Indonesia Mencari Masa Lampainya”, dalam Anthony Reid dan David Marr (Editor), *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*, (Jakarta: Grafitipers, 1983), dan Benedict Anderson, *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*, (Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2008).

agama berperan dalam membangun kesadaran identitas. Mereka memandang pulau Jawa sebagai sentral pergerakan kebangsaan tanpa mempersoalkan dialektika atau pengumpulan antara Nasionalisme Jawa dan Nasionalisme Hindia.

Dari pulau Jawa berbagai paham dan organisasi pergerakan rakyat tersebar di Kalimantan Selatan, termasuk organisasi pergerakan Islam. Lebih dari itu, dengan sikap egaliternya, mereka menerima tokoh-tokoh pergerakan dari daerah lain yang mereka pandang sebagai tokoh nasionalis Indonesia. Mereka menjadi tokoh pergerakan partai atau menjadi guru-guru sekolah kebangsaan dan perguruan Islam di Kalimantan Selatan. Hubungan antar tokoh pergerakan dan masyarakat setempat, menjadikan ikatan solidaritas dan semangat kebangsaan antar suku bangsa menjadi semakin menguat. Di sini timbul perasaan senasib dan tujuan yang sama untuk meraih kemerdekaan.

Ikatan solidaritas diperkuat oleh media massa lokal maupun dari Jawa dan Sumatera di Kalimantan Selatan. J. Van Goor menyatakan bahwa pertumbuhan surat kabar berkaitan dengan pendidikan dan nasionalisme karena pendidikan menjadi lahan pertumbuhan gagasan dan organisasi nasionalis.¹⁴ Menurutny, fenomena penting yang mengiringi tumbuhnya sekolah dan kebutuhan akan pendidikan adalah meningkatnya surat kabar Melayu. Di sini juga terdapat kaitan kuat dengan politik. Di antara para pendiri berbagai partai politik, misalnya Sarekat Islam, terdapat sejumlah wartawan.

Pendapat J. Van Goor itu selaras dengan pendapat Suratmin bahwa peranan pers sangatlah penting artinya dalam upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Media pers kita dijadikan sarana menyebar-

14 J. Van Goor, "350 Tahun Penjajahan Belanda?", Makalah Seminar Aspek-aspek Internasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, (Jakarta: Bagian Pers dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, 1997), hlm. 73.

luaskan paham kebangsaan dan menentang segala bentuk kedholiman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.¹⁵ Keberadaan media massa sebagai medium perjuangan telah mendorong perkembangan kebudayaan dan kemajuan peradaban masyarakat, mendapatkan informasi dan ide-ide tentang kemerdekaan, liberalisme, parlementarisme, dan perkembangan politik kebangsaan.

Mengutip pendapat Syaharuddin bahwa pendidikan Islam dan tentu juga peran pendidikan kebangsaan lainnya telah berpengaruh kepada pemahaman masyarakat terhadap keadaan diri dan lingkungannya. Suatu keadaan yang berada dalam wilayah yang "dijajah" yang cenderung "merampas" hak-hak pribumi. Kesadaran ini berproses dalam waktu yang tidak begitu lama dan mencapai puncaknya ketika bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya.¹⁶

Mereka itu yang karena memiliki pendidikan, pengalaman, pengetahuan, pergaulan atau hubungan dengan dunia luar, menjadikan mereka mempunyai kemampuan untuk merasakan dan melihat adanya kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap kalangan pribumi. Melalui media massa mereka menyuarakan pentingnya persatuan, memberitakan tentang diskriminasi, eksploitasi, dan ketimpangan antara kehidupan masyarakat di Jawa dengan Kalimantan, dan sebagainya yang merupakan bagian dari pergerakan nasional di daerah ini.

Para elite (agama dan kebangsaan) berpendapat kondisi itu harus diubah dan perlakuan diskriminatif harus dilawan, dan menurut mereka perjuangan melawan penjajah Belanda akan lebih efisien jika menurut contoh-

15 Suratmin, "Peranan Pers pada Masa Revolusi Fisik di Yogyakarta, Tahun 1945-1949", dalam Zulfikar Ghazali (Penyunting), *Sejarah Lokal; Kumpulan Makalah Diskusi*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, 1995), hlm. 32.

16 Syaharuddin, *Orang Banjar Menjadi Indonesia*, (Yogyakarta: Eja Publisher, 2009), hlm.139-143.

contoh Barat. Mereka tidak lagi mengadakan perlawanan bersenjata seperti yang pernah dilakukan oleh penguasa tradisional pada masa atau abad sebelumnya, melainkan berjuang melalui organisasi pergerakan dan pendidikan.

Benih nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan kebangsaan tumbuh dari akumulasi proses berbagai faktor yang memengaruhinya seperti faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bahkan agama. Faktor utama berasal dari situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sendiri sebagai dampak dari penjajahan yakni kebijakan modernisasi dan eksploitasi yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda. Dampak dari kebijakan itu, baik bersifat positif maupun negatif, kesemuanya berperan dalam pertumbuhan pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

Pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh kebangkitan Islam dalam segala manifestasinya. Keberadaan elite agama, organisasi Islam, dan pendidikan Islam telah menjadikan pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan dimulai dengan nasionalisme Islam. Sebagaimana dikatakan Rosihan Anwar, “Pelopor Gerakan Nasionalisme di Indonesia adalah Islam”, maka itu sesuai juga dengan kenyataan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Di sini terlihat dari keberadaan organisasi Islam pada awal pergerakan seperti Sarekat Islam, Persatuan Perguruan Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Musyawaratutthalibin yang banyak melakukan upaya-upaya untuk mengangkat masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta sering berlawanan dengan pemerintah kolonial.

Beberapa organisasi-organisasi yang berwatak kebangsaan yang umumnya berasal dan/atau cabang dari induknya di Jawa seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru/PNI Pendidikan),

Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Perguruan Taman Siswa juga mendapat simpati dari masyarakat Kalimantan Selatan. Bahkan diantaranya ada yang mempunyai basis massa pendukung yang sangat banyak seperti Parindra sehingga sangat menonjol perjuangannya di Kalimantan Selatan.

Keberadaan elite agama tidak terlepas dari kehadiran pendidikan Islam berupa madrasah yang dikelola oleh organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Musyawaratutthalibin, dan organisasi Islam lainnya. Keberadaan madrasah merupakan bentuk resistensi dan adaptasi terhadap sistem persekolahan pemerintah yang sekuler. Meski diakui, bahwa sistem pendidikan tradisional yang bernafaskan keagamaan seperti pengajian dan pesantren sudah lama hadir di tengah masyarakat, jauh sebelum kehadiran sekolah yang dikelola pemerintah dan madrasah. Peran pengajian dan pesantren sangatlah penting karena di dalamnya terdapat sosok kharismatik yakni *tuan guru* dan guru agama yang berperan dalam mendidik para santri.

Elite agama berpikiran progresif merupakan salah satu pelopor kesadaran kebangsaan di Kalimantan Selatan. Mereka sebagai nasionalis lokal mendapat ide-ide kebangsaan dan menunjukkan ikatan solidaritas kebangsaan dengan berbagai cara dan jalur seperti melalui pendidikan, organisasi kebangsaan, media massa, atau melalui kontak-kontak dengan tokoh nasionalis khususnya dari Jawa dan Sumatera.

Para elite agama berpikiran progresif yang diaktori oleh *tuan guru*, guru agama, dan para haji dapat dikategorikan sebagai “elite tandingan” karena posisi dirinya yang seringkali berlawanan dengan pemerintah kolonial atau kehadirannya menurunkan kewibawaan elite tradisional. Mereka seperti halnya elite nasionalis dari kalangan sekuler berpendapat bahwa perjuangan akan lebih efisien jika menurut contoh-contoh Barat. Mereka berjuang melalui

organisasi pergerakan, pendidikan, dan media massa untuk meraih kemajuan, kebebasan, menuntut keadilan, perbaikan dan kesejahteraan bangsanya.

Meski tidak perlu disandingkan, antara nasionalisme dan Islam mempunyai hubungan yang mendasar karena Islam memberikan nilai-nilai terhadap nasionalisme. Berbagai konsepsi nilai-nilai keislaman yang terungkap secara verbal seperti cinta tanah air sebagian dari iman (*hubbul wathon minal iman*), jihad fii sabilillah, ajaran amar ma'ruf dan nahi munkar, serta pekik Allahu Akbar yang sering dikumandangkan dalam membakar semangat juang atau di dalam perang kemerdekaan, merupakan sebuah bukti bahwa Islam dan nasionalisme adalah dua konsep yang seiring dan sejalan dalam perjuangan kemerdekaan.

Islam dan nasionalisme di Kalimantan Selatan merupakan satu kesatuan erat yang saling mengisi. Islam sebagai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan sangat berperan sebagai pendorong tumbuhnya pergerakan nasional di daerah ini. Berbagai aliran atau organisasi-organisasi yang bernaafaskan Islam dapat dengan mudah tumbuh dan berkembang karena banyaknya pengikut atau anggotanya.

Pendidikan Islam yang dibangun oleh para elite agama Islam telah berkontribusi terhadap upaya pencarian identitas dan ikatan solidaritas nasional, karena pendidikan telah membuat orang menjadi semakin rasional. Peran pendidikan Islam ini diperkuat yang oleh Benedict Anderson disebut *print capitalisme* (kapitalisme cetak), yakni peran bahasa-bahasa cetak seperti buku, surat kabar dan majalah dalam membentangkan landasan bagi kesadaran nasional.

Pendidikan Islam berperan penting dalam pergerakan kebangsaan karena melalui pengajian, pesantren, dan madrasah, para elite agama yakni *tuan guru*, syekh, dan guru-guru agama sangat berperan dalam mendidik para santrinya. Pada umumnya, *tuan guru* juga mempunyai massa yang fanatik di pedesaan. Pemikiran atau fatwanya

juga sangat berpengaruh di masyarakat. Oleh karena itu, sekolah Islam dapat dikatakan sebagai bagian sekolah kaum pergerakan, karena para *tuan guru* tidak sekadar mengajar dan mendidik, melainkan juga “membakar” santrinya agar lebih mencintai tanah airnya, dan terbukti penyelenggara pendidikan ini yakni *tuan guru*, guru-guru agama Islam maupun alumninya banyak menjadi pelopor, aktivis pergerakan atau pejuang kemerdekaan di Kalimantan Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Surat Kabar

“Konferensi di Kandangan, Padjak diganti Oeroean Oemoem”, dalam *Kalimantan Raya* No. 13 Djoem’at 20 Maart 1942 Tahoen Pertama, hlm. 2.

“Pers di Kalimantan”, dalam *Indonesia Merdeka* edisi Nomor 99 Tahun ke VII, Sabtu 28 April 1951.

Harian Indonesia Merdeka, Senin 30 April 1951.

Zamzam, M Djafrie -Kandangan, “MEMPERBAIKI Nasib Pergoeroean Islam”, dalam *Kalimantan Raya* No. 216 Selasa 24 Nopember 2602 Tahoen Ke-I.

Niu, Aam. “Kisah-kisah Perjuangan Heroik, Edwar Sandan Meninggal di Penjara Sukamiskin”, dalam *Dinamika Berita*, 24 November 1984.

Sumber Kearsipan dan Memoar

Arief, Mohammad Nawawie. 1981. “Sepak Terjang Haji Mohammad Nawawie Arief Dalam Perjuangan”. Banjarmasin: naskah ketikan.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1975. *Sarekat Islam Lokal*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 7, 1975.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1996. *Inventaris Arsip Borneo*. Jakarta.

Artha, Artum. 1984. “Cita-Cita Mencapai Indonesia Mulia Merdeka dan Berdaulat”. Banjarmasin: naskah ketikan.

- Basuni, Ahmad. 1950. "Mengenal Perdjuaan Ummat Islam di Kalimantan, Menuju Kesatuan Tenaga Islam di Dalam RIS", dalam *Almanak Indonesia 1950*. Bandung: Pustaka Djaja.
- Darmawie, Achmad. 1981. "Detik-Detik Perjuangan Kemerdekaan di Banjarmasin Kalimantan Selatan". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Duraup, Aban. 1983. "Riwayat Singkat Perjuangan Aban Duraup Dalam Rangka Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan". Ulin-Banjarbaru: naskah ketikan.
- Hadharyah M. 1981. "Periode-periode Perjuangan di Indonesia yang Saya Alami". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Hamidhan. 1981. "Riwayat Hidup/Riwayat Perjuangan Hamidhan-Juhri". Haruai: naskah ketikan.
- Tjokroaminoto, Harsono. 1983. *Menelusuri Jejak Ayahku*. Penerbitan Sejarah Lisan No. 2. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Jurnal, Prosiding, atau Bunga Rampai

- Alfisyah, 2015. "Pengajian Sebagai Model Pengajaran Orang Dewasa Berbasis Kearifan Lokal", dalam Ersis Warmansyah Abbas (Penyunting), 2015. *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bekerjasama dengan Penerbit Wahana Jaya Bandung.
- Anderson, Benedict O'Gorman. 1983. "Masa Kegelapan dan Masa Terang Benderang, Perubahan Pemikiran Kaum Nasionalis Indonesia di Masa Awal", dalam Anthony Reid dan David Marr (editor). 1983. *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*. Jakarta: Grafitipers.
- Anis, M.Z. Arifin, 2003. *Elite Tandingan dan Gerakan Massa di Kalimantan Tenggara Bagian Selatan Pada*

- Abad XIX (Bahan Ajar Muatan Lokal)*". Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan *Vidya Karya* Tahun XXI, Nomor 1, April 2003.
- Goor, J. Van. 1997. "*350 Tahun Penjajahan Belanda?*". Makalah Seminar Aspek-aspek Internasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Jakarta: Bagian Pers dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia.
- Humaidy, "Tragedi Datu Abulung: Manipulasi Kuasa atas Agama". Jurnal *Kebudayaan Kandil* LK3 Banjarmasin, Edisi 2 Tahun I September 2003.
- Lamry, Mohammed Salleh. "Migrasi Pekerja Indonesia ke Malaysia: Sebuah Pengantar". Dalam M. Arif Nasution (Penyunting). 1997. *Mereka yang ke Seberang, Proses Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia*. Medan: USU Press.
- Mislaini, 2013. "Pesantren: Karakteristik Pendidikan dan Unsur-unsur Kelembagaan", dalam Samsul Nizar, et al. 2013. *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kencana.
- Mulkan, 2013. "Sistem Pendidikan Surau: Karakteristik, Isi, dan Literatur Keagamaan", dalam Samsul Nizar, et al. 2013. *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kencana.
- Reid, Anthony, 1983. "Jejak Nasionalis Indonesia Mencari Masa Lampaunya", dalam Anthony Reid dan David Marr (editor). 1983. *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*. Jakarta: Grafitipers.
- Sophian Manai. 1974. "Nasionalisme dan Sumpah Pemuda", dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Suratmin. 1995. "Peranan Pers pada Masa Revolusi Fisik di Yogyakarta, Tahun 1945-1949", dalam Zulfikar Ghazali (Penyunting), 1995. *Sejarah Lokal*;

- Kumpulan Makalah Diskusi*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan Depdikbud.
- Wahid, Abd. Hamid. 2007. "*Pengelolaan Madrasah Era Sentralistik: Masalah atau Solusi*". Jurnal Edukasi Volume 5, Nomor 3, Jakarta Juli-September 2007.
- Wahyono, Tugas Tri. 2013. "*Pengawasan Pemerintah Hindia Belanda Tentang Pengajaran Agama Islam: Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (1912-1942)*". Jurnal Patrawidya Volume 14, Nomor 1, Yogyakarta Maret 2013.
- Wajidi, "Membangun Perikat ke-Indonesia-an Melalui Lawatan Sejarah di Kalimantan Selatan". Jurnal Jnana Budaya BPNB Bali, NTB dan NTT, Vol. 21, No. 2 Agustus 2016.

Disertasi, Tesis, Skripsi, dan Laporan Penelitian

- Koroh, Alex A dkk. 1994. "*Mengenal Pertumbuhan dan Perkembangan Nasionalisme di Kalimantan Selatan Selama Tiga Dasawarsa 1912–1942*". Banjarmasin: Laporan Penelitian FKIP Unlam.
- Makmur, Ahdi dkk. 2006. *Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari.
- Maksum, M. Nur. 1998. "*Gerakan Islam Modern di Kalimantan Selatan (1900-1942)*". Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari.
- Ruslan, Syarkawi. 1975. "*Perkembangan Reformasi Islam di Kalimantan Selatan Serta Pengaruhnya Dalam Lapangan Agama, Sosial dan Pendidikan Dari Tahun 1914 Sampai 1942*". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.
- Sjamsuddin. 1970. "*Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun*

- 1942". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.
- Sjarifuddin. 1974. "*Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950*". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.
- Syahrudin. 2015. *Transformasi Nilai-nilai Kejuangan Masyarakat Banjar Pada Periode Revolusi Fisik (1945-1950) di Kalimantan Selatan (Studi Etnopedagogi Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPS)*. Disertasi, Jurusan Pendidikan IPS UPI Bandung, tidak diterbitkan.
- Syahrudin, H.M. 1972. "*Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (1914-1942)*". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.
- Yusran, Mohammad. 1972. "*Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942*". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.

Buku

- Abbas, Ersis Warmansyah (Penyunting), 2015. *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bekerjasama dengan Penerbit Wahana Jaya Bandung.
- Abdullah, Taufik (ed.). 2013. *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Ditjen Kebudayaan Kemdikbud.
- Agung, Anak Agung Gde Putra. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Amanwinata, Rukmana *et al.* 1985. *Kamus Istilah Tata Negara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama INSIST Press dan Pustaka Pelajar.
- Antemas, Anggraini. 1988. *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan*. Amuntai: Mega Sapura.
- Anwar, Rosihan. 1971. *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: PT Kartika Tama.
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bondan, Amir Hasan Kiai. 1953. *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Fadjar: Banjarmasin, 1953.
- Caldwell, Malcom dan Erns Utrecht. 2011. *Sejarah Alternatif Indonesia*. Jakarta: Djaman Baroe.
- Dault, Adhyaksa. 2005. *Islam dan Nasionalisme, Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*. Jakarta: Pustaka Al –Kautsar.
- Dekker, I. Nyoman. 1971. *Sejarah Indonesia Baru 1900-1945 (Pergerakan Nasional)*. Malang: Lembaga Penerbit IKIP Malang.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 1977. *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex Digul*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhofier, Zamakhsyary. 2015. *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hendraswati, Wajidi, Zulfa Jamalie. 2014. *Peranan Qadhi Abdusshamad Dalam Penyebaran Islam Pada*

- Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala*. Yogyakarta: Kepel Press-BPNB Pontianak.
- Hidayatullah, Nur. 2016. *Idham Chalid Dimensi Spritual Negarawan Agamis*. Amuntai: Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah.
- Huda, Noor. 2007. *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ideham, M. Suriansyah *et al.*, (ed.). 2003. *Sejarah Banjar*. Cetakan Pertama. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Ideham, M. Suriansyah *et al.*, (ed.). 2007. *Sejarah Banjar*. Cetakan Ketiga. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. dan Julianto. 1984. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kartodirdjo, Sartono. 2016. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kartodirdjo, Sartono dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1988/1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah* (Edisi Kedua). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya bekerjasama

- dengan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.
- Linblad, J. Thomas. 1998. *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*. Leiden: KITLV-Foris Publications.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2004. *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS.
- Mohyidin, Abdulmuthalib, red., 1973. *50 Tahun Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai Kalimantan Selatan 1922-1972*. Amuntai: Yayasan Pemelihara Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan.
- Muthalib, A. 2008. *Tuan Guru Sapat, Kiprah dan Perannya Dalam Pendidikan Islam di Indragiri Hilir Riau pada Abad XX*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Nawawi, Ramli Ed. 1992. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan.
- Nawawi, Ramli (ed.). 1992. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Kalimantan Selatan.
- Niel, Robert Van. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Noor, Yusliani. 2016. *Islamisasi Banjarmasin*. Yogyakarta: Ombak.

- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. 1990. *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*. Banjarmasin.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, Bambang , 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*, . Yogyakarta: Ombak.
- Rahmadi, M. Husaini Abbas, dan Abd. Wahid. 2012. *Islam Banjar Dinamika dan Tipologi Pemikiran Tauhid, Fikih dan Tasawuf*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Reid, Anthony dan David Marr (editor). 1983. *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*. Jakarta: Grafitipers.
- Riyanto, Bedjo. 2000. *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915)*. Yogyakarta: Tarawang.
- Sahriansyah, dkk.. 2012. *Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (1925-2007)*. Banjarmasin: Antasari Pers.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 1986. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Paham dalam Agama Islam*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Saleh, M. Idwar dkk. 1978/1979. *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Saleh, M. Idwar dkk. 1978/1979. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Simanjuntak, Togi (ed.). 1998. *Wartawan Terpasung*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

- Sitorus, L.M. 1951. *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakjat N.V.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soeratman, Darsiti. 1985. *Ki Hajar Dewantara*. Jakarta: Depdikbud.
- Subhan, Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad ke-20 Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana.
- Sudiyo. 2002. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafruddin, Rifan dan Amir Husaini Zamzam. 2015. *Tuan Guru Haji Abdurrahyid*. Amuntai: Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah.
- Syahrudin. 2009. *Orang Banjar Menjadi Indonesia: Dinamika Organisasi Islam di Borneo Selatan, 1912-1942*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Tim Sahabat. 2013. *Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan*. Kandangan: Sahabat Mitra Pengetahuan.
- Tirtoprodjo, Susanto. 1961. *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Usman, A. Gazali. 1995. *Sejarah Perjuangan Rakyat Tapin Periode Revolusi Fisik 1945-1949*. Rantau: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin.
- Usman, Ahmad Gazali dan M. Syarifuddin. 2007. *Tapin Bertabur Ulama*. Rantau: Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
- Wajidi. 2011. *Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950*. Yogyakarta: Debut Press.
- Wajidi. 2007. *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Zaini, Muderis dkk. 1988. *Sejarah Perjuangan Rakyat Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan*

Republik Indonesia di Hulu Sungai Tengah. Barabai:
Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 DHC
Angkatan 45 Tingkat II HST.

INDEKS

A

Abdul Karim Corong 70, 71
Abdurrasyid 87, 101, 107, 108
Adi Martono 46,
afrondings-politiek 12
Agus Salim 68
Ahlu Al Sunnah Wa Al-Jamaah 76
Ahmad Barmawi 47, 129
Al Irsyad 69, 106
Al Madrasatul Arabiah al Walaniah 69
Algemene Middelbare School 46
Amir Hasan Bondan 33, 34, 35, 42, 46
Arabische School 69, 87, 88, 90, 107, 108, 109, 115, 118, 122
Artum Artha 21, 33,
Asisten Kiai 120

B

Barisan Indonesia 36, 47, 50
Bea Invoerrechten 60
Belanda 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 26, 27, 29, 30,
33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 54, 56, 59, 68, 73, 75, 77, 78,
79, 81, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 104, 1
95, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 12
9, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147
Bestuur Commissie 3
Bintang Islam 32
Bond Indonesische Chauffeur 50
Budi Sempurna 42,
Budi Utomo 38, 39, 40

C

Centraal Sarekat Islam 38, 55, 66, 69, 115

D

Diniyah Islamiyah 88,90,109
dr. A.K. Gani 45
dr. Sosodoro Jatikusomo 45, 74
dr. Sumarno 45, 46
dr. Suranto 45, 46
dr. Susilo 45

E

elite agama 2,3,5,6,7,9,14,18,19,37,40,85,86,88,
90,91,93,101,109,142,143,144,147,148,149
elite sekuler 41
elite tradisional 89,139
ELS (*Europese Lagere School*) 3
Europese Lagere School 3,7,

F

Fathal Islam 114,115

G

gedung Cahaja Tatas 62
Gerakan Rakyat Indonesia 43, 48
Gerindo 43,45,48

H

Hadhariyah M 45
Hadhihil Al-Madrastul Wathoniah 115
Hans Kohn 11
Harian Oemoem 32
Hasbullah Yasin 101,132,142
Hassan Basry 66,102, 132
Heeren Dienst 26, 60,105
Het Leesgezelschap 32,42
Hindia Baroe 32
HIS Muhammadiyah 120, 121
HIS Swasta 61

Hizbul Wathon 21
Hollands Indonesische Arabische School 122
Hoofd van Plaatselijk Bestuur 91
Housman Babu 46

I

Idham Chalid 100,101,102
Imperialisme 2,4,10,106,143
Inggeris 10, 34, 124,126
Inkomsten Belasting 27
Islamsche School 69, 92,115,118

J

Johanes Baker 38,45,46

K

Kaum pergerakan 38, 41,43,45,85,88,90,103,105
Kepanduan Nasrul Umum 83
Keresidenan Borneo Selatan 8
KH. Ahmad Dahlan 69
Ki Hajar Dewantara 38, 45
Kiai Besar Merah Nadalsyah 42
Kolonialisme 10, 99,100,141, 143
Kongres Sarekat Islam 28,56, 142

L

Lailatul Ijtima 74,75
Landbouwklasse Barabai Cursus 138
Landrente 27, 60
Leesgezelschap 32

M

M. Yusak 38
Ma'ahad Rasyidiyah Amuntai 88,90,92,109,132
Madrasah Asy-Syafi'iyah Musyawarutthalibin 122
Majedi Effendi 80,126

Muhammad Arip Bakumpai 44,46,53,114
 Muhammad Jafri 130
 Muhammad Yasin Amin 78,121
 Madrasah Islam Pandai 116
 Madrasah Syafi'iyah 122
Madrasatul 'Imad Fie Ta'lilil Aulad "Darussalam 75
 Majalah Bulanan *Taman Siswa* 32
 Majalah *Malam Djoema'at* 33,34,35
 Maraja Sayuthi Lubis 38,45,55,56,59
Meer Uitgebroid Lager Onderwijs 120
 Merah Johansyah 38,42,47
 Mohammad Horman 21,46,55,56,67,70,116
 Mohammad Husni Thamrin 46
 Mosi Kongres 27,28,56,59,60,142
 Mr. Rusbandi 45,46
 Muhammad Yasin Amin 78, 121
 MULO 21,42, 120
 Musyawaratutthalibin 4,47,50,77,78,79,80,81,82,83,
 84,91,92,100,121,122,123,142

N

Nahdlatul Ulama 8,21, 47,50,78,79,80,91,92,107,114, 142,
 147,148
 Nasionalisme 1,2,3,4,5,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,23,28,
 30,34,37,39,47,48,49,55, 97,98,103,104, 106,108, 116,
 131,132,143,144
 Nasrul Umum 83
nation state 11,
 National Borneo Conferentie 21,44,61,63,66,68,114
Nederlands Indische Onderdanschap 26
non-cooperatif 78

O

Openbare Vervolgschool 90
Ordonnantie Heeren Dienst 26, 60,105
 OS Cokroaminoto 21,44, 66,67,68,115

P

Pajak Erakan 27

Pajak Kepala 27

Pajak Pencaharian 27

Pajak Penjualan 27

Pajak Tanah 27

Pan Islamisme 1, 28,106

Parindra 21, 32,38,41,43,45,46,47,50,78,103,104

Partai Ekonomi Kalimantan 21, 50

Partai Indonesia Raya 43,47

Partai Nasional Indonesia 43,47

Partai Republik Indonesia 43,47

Particuliere Hollands Inlandse School 61,116

pemberontakan Gusti Darmawi 28

Pemerintah Hindia Belanda 33,41,45,68,77,78,79, 81,92,
97,119, 120,121,138,142,147

Perang Banjar 47, 98,132

Perguruan Taman Siswa 21,48,61,103,104,116

Persatuan Bangsa Indonesia 39

Persatuan Pemuda Marabahan 32

Persatuan Perguruan Islam 17, 41,84,104,109,116,117

PHIS 61

PKU 73,115

PNI 16,43,47

Soeloeh Indonesia 32

Politik Etis 30,85,109,

Q

Qismul Mudarrisin 122

R

R. Sukarjo Wiryopranoto 45,

R. Sunyoto 45

Raden Imam Subekti 46

Residentie Zuider Afdeling van Borneo 8
Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo 9
Rodi 26,28,60,105
Ridwan Syahrani 80,81

S

Saleh Bal'ala 74,92,
Sarekat Islam 17,21,36, 38,41,44,45,47,48,50,75,
80,92,109,114,115,116m142,143,144,147,148
Sarekat Kalimantan 21,50
School Commissie 3
Sekolah Muhammadiyah 17,118
Sekolah Musyawatutthalibin 17,121
Sekolah Sarekat Islam 104,109,114
Sekolah Agama 14,43,45
Sekolah Arab 108,123
Sekolah Awaliyah 122
Sekolah Islam Darussalam Martapura 88,90,92,109
Sekolah Kulliyatul Mu'allimin 122
Sekolah Medan Antara 41
Sekolah Muhammadiyah 41,89,90,92
Sekolah Partikelir 2,41,45, 85,109,110
Sekolah Persatuan Perguruan Islam 104,109,117
Sekolah Puteri 122
Slachbelasting 27
Soeara Kalimantan 33
Surya Wirawan 50
Sutomo 45
Syekh Muhammad Abduh 106
Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari 130
Syekh Salman Al Farisi 128

T

Taman Bacaan 32,40,42
Taman Siswa 16,21,32,38,41,43,45,48,61,116
Tempo 32,34, 63

tuan guru 19, 45, 75,86,87,88,92,93,94,95,96,97,101

U

Usman Amin 44, 70, 73

V

van der Prijs 109

Vervolgschool 90,118

volkano Islam 85,115

Volksraad 45,81

W

Wilde Schoolen Ordonnantie 1932 104,121

Wostha School 118

Yusyadi 38

Z

Zafry Zamzam 100, 132

Zainal Abidin 133

Zamzam Jakfar 121

Riwayat Hidup Penulis



Drs. Wajidi, M.Pd dilahirkan di Pagat Hulu Sungai Tengah, 15 Januari 1969. Peneliti Madya bidang Ilmu Sejarah dan Arkeologi pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan kesarjanaannya ditempuh di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin (1992), dan Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat (2017). Selain peneliti atau penulis, ia seorang pegiat di Dewan Harian Daerah Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi Kalsel dan Lembaga Budaya Banjar (LBB) Kalimantan Selatan.

Ia menulis di surat kabar dan webblog bubuhanbanjar.wordpress.com, dan juga memublikasikan artikel ilmiah/semi ilmiah/opini: di Jurnal Amerta Puslit Arkeologi Nasional, Jurnal Jnana Budaya BPNB Bali, NTB, NTT, Jurnal Kebudayaan Puslitbang Kemdikbud, Jurnal Patanjala BPNB Bandung, Jurnal Patrawidya BPNB Yogyakarta, Jurnal penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional BPNB Bali, NTB, NTT, Jurnal kebijakan Pembangunan Balitbangda Provinsi Kalsel, Majalah Ilmiah Komunika LIPI, dan surat kabar Banjarmasin Post, Kalimantan Post, Radar Banjarmasin, Barito Post, Mata Benua, Serambi Ummah, Dinamika Berita, Buletin Bandarmasih, buletin Masa Depan, dan majalah Kebudayaan.

Publikasi berupa buku yang sudah terbit, antara lain adalah Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik (Pustaka Benua, 2007; diterbitkan kembali oleh Penerbit Ombak tahun 2015 dengan judul: Revolusi Kemerdekaan di

Kalimantan Selatan 1945-1949), Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942 (Pustaka Banua, 2007), Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950 (Debut Press, 2008), Mozaik Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Sebuah Catatan Ringan (Debut Press, 2008), Artum Artha: Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan (Debut Press, 2008), Akulturasi Budaya Banjar di Banua Halat (Pustaka Book Publisher, 2012), Gerakan Tengkorak Putih Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949-1950 (Pustaka Book Publisher, 2012).

Ia anggota tim penulis/editor buku: Sejarah Banjar (Balitbangda Kalsel, 2003), Urang Banjar dan Kebudayaannya (Balitbangda Kalsel, 2005), Model Arsitektur Keraton Banjar di Teluk Selong Ulu, Martapura (Pustaka Book Publisher, 2011), Model Arsitektur Keraton Banjar, Pendekatan Model Berdasar Kajian Historis dan Arkeologis (Pustaka Book Publisher, 2011), Muatan Lokal Kebudayaan Banjar (Disbudparpora Kalsel, 2011), Upacara Daur Hidup Masyarakat Suku Banjar di Kalimantan Selatan (STAIN Pontianak Press-BPNB, 2012), salah seorang penulis artikel buku bunga rampai: Merawat Adat, Memaknai Sejarah, Perkembangan dan Peradaban Adat Tradisi Banjar (UPT Taman Budaya-Pustaka Banua, 2013), dan bersama Hendraswati dan Zulfa Jamalie telah menulis dan menerbitkan buku: Peranan Qadhi Abdusshamad Dalam Penyebaran Islam Pada Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala (2014).

Dalam kedinasan ia aktif dalam penelitian dan penulisan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Kalsel, dan beberapa SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dan pernah terlibat dalam penelitian Balai Arkeologi Kalsel, BPNB Pontianak, hibah Kemenristik Dikti, dan Banpem Direktorat Sejarah Ditjen Kemdikbud. Pemakalah dalam kegiatan seminar, lokakarya, narasumber Lasenas dan Laseda, dan kegiatan lainnya.

Penghargaan lomba karya tulis yang pernah ia terima diantaranya: (1) Pemenang II LKTI Bidang Pendidikan Tingkat Universitas Lambung Mangkurat (dalam tim, 1991); (2) Pemenang II LKT Tingkat Nasional Seniman Republik dari Harian Republik Jakarta 1994; (3) Pemenang II LKT Tingkat Nasional Dwidarasawarsa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari ibu Tien Soeharto 1995; (4) Pemenang I LKT Peringatan Hari AIDS Internasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2000; (5) Pemenang II Lomba Penulisan Artikel Tingkat Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2003; (6) Pemenang I Lomba Penulisan Jurnalistik Tingkat Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Mendiknas 2005; (7) Pemenang III Lomba Penulisan Kebencanaan tahun 2009 kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mapiptek) BPPT. Di tahun 2013 menerima Piagam Penghargaan Anugerah Budaya dari Gubernur Kalimantan Selatan, dan di tahun 2014 menerima Anugerah Astapra dari Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu'tashim Billah. Alhamdulillah.

Korespondensi dapat melalui surat elektronik: wajidi.amberi@gmail.com, wadjidi@yahoo.com. Anda juga bisa mengontak saya melalui akun: <https://www.facebook.com/wajidi.amberi>, atau HP/WA 0812 518 1044.

PERANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN DI KALIMANTAN SELATAN

Islam dan nasionalisme di Kalimantan Selatan merupakan satu kesatuan erat yang saling mengisi. Islam sebagai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan sangat berperan sebagai pendorong tumbuhnya pergerakan kebangsaan di daerah ini. Besarnya peran Islam elite agama, organisasi Islam, dan pendidikan Islam di daerah ini mengakibatkan nasionalisme yang berkembang di Kalimantan Selatan sebelum tahun 1930 adalah nasionalisme Islam, dan setelah itu baru berkembang menjadi nasionalisme Indonesia.

Pendidikan Islam yang dibangun oleh para elite agama telah berkontribusi terhadap upaya pencarian identitas dan ikatan solidaritas nasional, karena pendidikan telah membuat orang menjadi semakin rasional. Peran pendidikan Islam ini diperkuat oleh print *capitalisme* (kapitalisme cetak), yakni peran bahasa-bahasa cetak dalam membentangkan landasan bagi kesadaran nasional.

Melalui pendidikan Islam dapat dilihat hubungannya dengan kebangkitan nasional karena melalui pengajian, pesantren, sekolah Islam atau madrasah, para tuan guru atau guru-guru agama tidak hanya mengajar dan mendidik melainkan juga “membakar” santrinya agar lebih mencintai tanah airnya.



Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2017

ISBN 978 - 602 - 50690 - 3 - 1



9 786025 069031